

LAPORAN TAHUNAN 2014

SEMANGAT
PERUBAHAN BARU
DEMI PENGANGGARAN
YANG LEBIH
BERKUALITAS



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Directorate General of Budget

DAFTAR ISI CONTENTS

- 4 **RINGKASAN EKSEKUTIF**
EXECUTIVE SUMMARY
- 8 **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN**
MESSAGE FROM THE DIRECTOR GENERAL OF BUDGET
- 12 **VISI DAN MISI**
VISION AND MISSIONS
- 14 **PROFIL PEJABAT DITJEN ANGGARAN**
PROFILES OF THE DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET OFFICIALS
- 26 **ORGANISASI DITJEN ANGGARAN**
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET
 - 30 **Penataan Organisasi**
Organizational Restructuring
 - 35 **Capaian IKU DJA**
KPI Achievements by the DGB
 - 38 **Transformasi Kelembagaan**
Organizational Transformation
- 44 **PROFIL DITJEN ANGGARAN**
PROFILE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET
 - 46 **Sumber Daya Manusia**
Human Resources
 - 52 **Alokasi Anggaran DJA dan Realisasinya**
Allocated Budget and its Spending
 - 56 **Pagu Anggaran K/L**
Budget Ceiling for Ministries/Agencies
 - 65 **Laporan BA 999.07 dan 999.08**
BA 999.07 and 999.08 Reports
- 74 **Mitigasi Risiko dan Perkembangan Pemberian Bantuan Hukum**
Risk Mitigation and Development in Provision of Legal Counsel
- 77 **Layanan Perpustakaan**
Library Service
- 80 **KINERJA DITJEN ANGGARAN**
PERFORMANCE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET
 - 82 **Kebijakan Sistem Penganggaran**
Policies on Budgeting System
 - 87 **Penggunaan Logic Model / ADIK dalam Penyusunan Penganggaran**
Implementation of a Logic Model / ADIK in Budget Planning Process
 - 89 **Penelaahan RKA-K/L Online**
Online Review of Work and Budget Planning of Ministries/Agencies
 - 91 **Peran pusat Layanan dalam proses revisi anggaran**
How the Service Center Facilitates Budget Revision Process
 - 94 **Kebijakan APBN dan APBN-P**
Policies on the Indonesian Budget and the Revised Indonesian Budget
 - 97 **Proses Penyusunan APBN 2015**
The Process of Compiling the Indonesian Budget 2015
 - 111 **Kebijakan PNB**
Policies on Non-Tax Revenues
 - 117 **Prestasi atas Capaian PNB terhadap Target Penerimaan Negara**
Collected Non-Tax Revenue and its Contribution to the Target State Revenue
 - 199 **Pelimpahan Sebagian Wewenang PNB kepada Ditjen Perbendaharaan**
Shared Responsibilities Concerning Non-Tax Revenues with the Directorate General of Treasury
 - 199 **Penyusunan Peraturan Pelaksanaan RUU PNB**
Non-Tax Revenue Bill
- 122 **KALEIDOSKOP 2014**
KALEIDOSCOPE 2014



RINGKASAN EKSEKUTIF

EXECUTIVE SUMMARY



RINGKASAN EKSEKUTIF EXECUTIVE SUMMARY

Reformasi birokrasi membutuhkan komitmen untuk melakukan transformasi kelembagaan menuju lembaga publik yang mampu mewujudkan Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Transformasi kelembagaan di DJA tahun 2014 diarahkan untuk mewujudkan visi DJA terutama melalui penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Sistem organisasi yang kokoh sebagai bagian transformasi kelembagaan menjadi dasar penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Restrukturisasi organisasi dilakukan untuk memperoleh sistem organisasi yang kokoh.

Penganggaran berbasis kinerja memerlukan adanya perbaikan atas informasi anggaran dan penguatan monitoring dan evaluasi atas *outcome*. Untuk dapat bekerja analitis, perlu dilakukan pergeseran fungsi Kementerian/lembaga dan optimalisasi aparat pemeriksa internal di masing-masing Kementerian/Lembaga. Peningkatan fungsi pada Kementerian/Lembaga dan DJA ditujukan untuk mendukung kerja Pemerintah lebih efektif.

DJA mempunyai komitmen untuk menjadi institusi pemerintah yang bersih dalam melayani para pemangku kepentingan. Pada tahun 2014, DJA telah menetapkan dan melaksanakan Rencana Aksi Jangka Pendek Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan DJA.

Penggunaan konsep *Logic Model* dalam penataan arsitektur dan informasi kinerja perlu dilakukan agar informasi kinerja dan capaian program dari masing-masing K/L dapat terukur, relevan, dan lebih jelas. Pada tahun 2014, DJA mempersiapkan landasan hukum sebagai langkah awal penerapan penyusunan anggaran berbasis *logic model*, membekali para *stakeholder* dan pihak-pihak

Bureaucracy reform requires a commitment to transform the organization towards a public institution that is capable to realize a wealthy, democratic, and just Indonesia. DGB's 2014 Organizational Transformation program is aimed at manifesting its vision through the implementation of Ministry of Finance's values. As part of the transformation, a strong organization became the foundation of the ministry's values implementation. An organizational restructuring was done to obtain such robust organizational system.

Performance-based budgeting demands an improvement on budgeting information and a stronger monitoring and evaluation over outcomes. To be able to function analytically, measures must be taken to shift the functions of ministries/agencies and to optimize their internal audit apparatus. Such improvements are aimed at supporting government endeavors more effectively.

DGB has a commitment to be the most ethical government institution in serving its stakeholders. In 2014, DGB has laid the groundwork and implemented Short Term Communication Strategy Plan for Anti-Corruption Education and Culture. This is done in support of corruption prevention and eradication in DGB.

The deployment of Logic Model concept in the performance information and architecture restructuring needs to be done so that the ministries'/agencies' performance information and achievement can be more measurable, clear, and relevant. In 2014, DGB prepared the legal foundation as a preliminary step for the implementation of logic model based budgeting. DGB also organized budget

terkait lainnya dalam proses perencanaan penganggaran, menyampaikan surat ke seluruh K/L agar menyampaikan rumusan *logic model* masing-masing K/L, dan proses *developing* tabel-tabel referensi terkait penataan arsitektur dan informasi kinerja yang diperlukan untuk disesuaikan dengan aplikasi RKA-K/L DIPA.

Penelaahan RKA-K/L merupakan forum penelaahan RKA-K/L antara kementerian/lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Pada tahun 2014, jumlah K/L yang menggunakan Penelaahan *Online* dalam penelaahan RKA-K/L terus diperbanyak. Terobosan melalui pemanfaatan teknologi ini telah memotong jalur birokrasi dan efisiensi pengeluaran negara.

Pusat Layanan DJA adalah unit yang melaksanakan salah satu tugas dan fungsi DJA dalam hal penyediaan Layanan Unggulan DJA kepada para pemangku kepentingan. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan layanan yang disediakan oleh Pusat Layanan DJA antara lain, penyelesaian revisi anggaran yang menjadi kewenangan DJA, verifikasi kelengkapan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), konsultasi seputar sistem dan aplikasi penganggaran, dan *Helpdesk* Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI).

Ditjen Anggaran berkomitmen untuk mewujudkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat. Sebagai sistem pembayaran PNBPN, SIMPONI juga mengakomodasi integrasi dengan berbagai sistem pembayaran/ penyetoran PNBPN yang telah dibangun K/L melalui fasilitas *web service*. Pada tahun 2014, penggunaan SIMPONI membawa dampak positif bagi penerimaan negara terutama dalam pencapaian target PNBPN.

planning for its stakeholders and other relevant parties, issued a letter to urge ministries/agencies to submit their respective logic model and the required reference table development process in relation to architecture restructuring so that they could be aligned via RKA/KL application.

RKA-K/L discussion is a forum in which Ministry of Finance, Ministry of National Planning and line ministries scrutinize their RKA-K/Ls. In 2014, there was growing number of ministries/agencies that were using Online Discussion as a method of scrutiny. This technological breakthrough is a bureaucratically shortcut and thus creates more efficiency.



DGB Service Center is a unit responsible for delivering DGB's Flagship Services to stakeholders. In 2014, the center added several services to its list, such as budget revision that is within DGB's authority, RKA-K/L document verification, Budget Implementation List (DIPA) processing, consultation on budgeting system and application, and Non-Tax Revenue Information System (SIMPONI) Helpdesk.

DGB has committed to realize optimum non-tax revenue (PNBP) while sustaining public service provision. As a form of non-tax revenue payment system, SIMPONI also accommodates the integration to various non-tax revenue payment/billing that have been built by line ministries through web service facility. In 2014, the implementation of SIMPONI brought positive impact to state revenue, especially in terms of non-tax revenue target fulfillment.

Sambutan Direktur Jenderal Anggaran

Message from Director General of Budget



Askolani
Direktur Jenderal Anggaran

Sambutan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Anggaran telah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik.

Sepanjang tahun 2014 Direktorat Jenderal Anggaran telah melaksanakan berbagai program/kegiatan, baik sebagai kelanjutan atas kebijakan tahun-tahun sebelumnya maupun berupa kebijakan baru, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Seluruh program/kegiatan dijalankan dengan semangat transparansi dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Selaku pimpinan Ditjen Anggaran, besar harapan saya, organisasi ini akan mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang ideal di Indonesia. Reformasi birokrasi membutuhkan komitmen untuk melakukan transformasi kelembagaan menuju lembaga publik yang mampu mewujudkan Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penguatan aspek kelembagaan diharapkan dapat membangun dan mengembangkan organisasi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Our gratitude to Allah SWT for His blessings, mercy, and for the fact that in 2014 the Directorate General of Budget could manage to complete its tasks well.

Throughout 2014, the Directorate General of Budget carried out various programs / activities reflecting policies from previous years as well resulting from new policies, in accordance with its assigned duties and functions.

All programs / activities have been carried out in the spirit of transparency and accountability within the framework of good governance. As the director of the Directorate General of Budget, it has been my expectation that this organization manages to contribute to effectuating the ideal bureaucratic reform in Indonesia. Bureaucratic reform requires a commitment to institutional transformation towards a public institution that is able to bring about prosperous, democratic, and fair Indonesia.



yang dinamis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan keuangan negara, dan dinamika administrasi publik. Di DJA, pelaksanaan transformasi kelembagaan diarahkan untuk mewujudkan visi DJA sebagai pemacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perubahan dan perbaikan telah berhasil dilakukan oleh seluruh unit kerja Ditjen Anggaran dari waktu ke waktu. Di samping memfokuskan pencapaian target-target kinerja, DJA juga melaksanakan target-target pekerjaan lain di luar IKU. Selama tahun 2014 terdapat beberapa keberhasilan pelaksanaan (di luar IKU) yang cukup menonjol, antara lain pencapaian penganugerahan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), penggunaan *logic model*

It is expected that our efforts to do institutional strengthening will help build and develop a dynamic organization that caters for the changing needs of the people, the development of state financial policies, and the dynamics of public administration. The institutional transformation within the DGB is geared towards realization of its vision, to be an agent accelerating quality management of state budget in order to achieve sustainable and equitable development.

All units within the DGB have successfully undergone changes and improvements from time to time. In addition to attaining its predefined targets, the DGB could also manage to complete other tasks beyond the KPI. Among prominent achievement of non-KPI targets in 2014 are the conferring of Corruption-Free Zone (WBK), the



(ADIK) dalam penyusunan penganggaran, penelaahan RKA-K/L *Online*, implementasi Sistem Penerimaan PNB *Online* (SIMPONI), dan tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi atas pembahasan anggaran di DPR RI.

Akhir kata, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh *stakeholder*, mitra kerja, dan pegawai Direktorat Jenderal Anggaran atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. "Semoga Direktorat Jenderal Anggaran lebih baik di masa yang akan datang".

Wassalamu'alaikum Wr Wb.


Askolani
 Direktur Jenderal Anggaran
 The Director General of Budget

implementation of a logic model (ADIK) in budget planning process, online review of RKA-KL, online Non-Tax Revenues Information system (SIMPONI), and the follow-up to the ruling by Constitutional Court on budget discussion with the House of Representatives.

Finally, allow me to take this opportunity to express my appreciation to all stakeholders, partners and employees of the Directorate General of Budget for their cooperation and support that have enabled performance improvement within the Directorate General of Budget. I hope the Directorate General of Budget performs better in the future.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

VISI

Dalam mengemban tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai visi sebagai berikut:

Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memacu kualitas pengelolaan APBN dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaporan;
2. Menggunakan monitoring dan evaluasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan;
3. Mendorong kerjasama dengan *stakeholders* dalam rangka pemberdayaan di keseluruhan proses;
4. Terus-menerus meningkatkan kualitas sistem dan proses penganggaran;
5. Membangun kapabilitas SDM dan organisasi internal.

VISION

In carrying out its duties and functions, the Directorate General of Budget envisions:

To accelerate quality management of Indonesian Budget in order to achieve sustainable and equitable development.

MISSIONS

To effectuate its vision, the Directorate General of Budget has set the following missions:

1. To accelerate quality management of the state budget covering planning, setting, and reporting stages;
2. To effectively use monitoring and evaluation to improve the quality of planning;
3. To encourage cooperation with stakeholders to empower all personnels along the whole process;
4. To continuously enhance the quality of budgeting system and processes;
5. To build up the capability of human resources and internal organization.



VISI DAN MISI DITJEN ANGGARAN
VISION & MISSION OF DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET



Agung Widiadi
Direktur Sistem Penganggaran
Director of Budgeting System

Purwanto
Direktur Anggaran II
Director of Budget II

And. Kunta Wibawa D.N
Direktur Penyusunan APBN
Director of Indonesian Budget Planning

Askolani
Direktur Jenderal Anggaran
Director General of Budget

Anandy Wati
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak
Director of Non-Tax Revenues

Dwi Pudjiastuti Handayani
Direktur Anggaran III
Director of Budget III

Mariatul Aini
Sekretaris Ditjen Anggaran
Secretary of Directorate General of Budget

R. Erman Jaya Kusuma
Tenaga Pengkaji Bidang PNB
Non-Tax Revenues Reviewer

Parluhutan Hutahaean
Direktur Anggaran I
Director of Budget I

Made Arya Wijaya
Plt. Direktur HPP
(Duty Substitute) Director of Budgeting Regulation Alignment

PROFIL PEJABAT DITJEN ANGGARAN

PROFILE OF DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET OFFICIALS



Alumnus Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1990 dan penyanggah gelar Master of Arts (M.A.) jurusan Economic dari University of Colorado – Amerika Serikat pada tahun 1999, dilahirkan di Palembang – Sumatera Selatan, 11 Juni 1966.

Menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran terhitung tanggal 27 November 2013 yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran.

After graduating from Sriwijaya University in South Sumatera majoring in Economics and Development Study in 1990, Askolani pursued a higher education at Colorado University in 1999 and has a Master's degree in Economics. He was born in Palembang – South Sumatera on June 11, 1966.

Assuming responsibilities as the Director General of Budget since November 27, 2013, he formulates and implements policies and technical standardization in budgeting.

Askolani

Direktur Jenderal Anggaran
The Director General of Budget



Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1963. Gelar insinyur bidang ilmu tanah diraihnya pada tahun 1987 dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan pada tahun 1994 meraih gelar Master of Business Administration dari University of Wisconsin at Whitewater – Amerika Serikat.

Menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran terhitung tanggal 24 Maret 2014 yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Born in Jakarta on October 11, 1963, Mariatul Aini completed her undergraduate program in Soil Science in Bogor Agricultural Institute in 1987 and obtained her Master of Business Administration degree from University of Wisconsin at Whitewater – US in 1994.

She started her position as the Secretary of the Director General of Budget on March 24 2014 and among her responsibilities are fitting together different activities and providing administrative support to all units within the DGB.

Mariatul Aini

Sekretaris Ditjen Anggaran
Secretary of the Director General of Budget



Lahir di Jakarta pada tanggal 30 November 1968. Peraih gelar sarjana ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999, Master of Arts (M.A.) bidang economics dari Universitas Boston (Amerika Serikat) tahun 1999 serta Doctor of Philosophy in Economics dari University of Canberra pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Direktur Penyusunan APBN terhitung mulai tanggal 24 Maret 2014, dengan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Born in Jakarta, November 30, 1968. He completed his undergraduate degree in economic at Gajah Mada University in 1999, Master of Arts in Economics from Boston University (USA) in 1999 and also Doctor of Philosophy in Economics of University of Canberra in 2013.

Serving as the Director of Indonesian Budget Planning since March 24, 2014, he is responsible for formulation and implementation of policies and technical standardization in state budget planning.

And. Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Direktur Penyusunan APBN
The Director of Indonesian Budget Planning



Lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 1965. Sarjana Ekonomi diraihnya pada tahun 1988 dari Universitas Kristen Satya Wacana dan pada tahun 1995 meraih gelar Master of Science dari University of Illinois, Amerika Serikat.

Menjabat sebagai Direktur Sistem Penganggaran pada tanggal 24 Maret 2014, dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Sistem Penganggaran.

Born in Blora, Jawa Tengah on May 11, 1965. He completed his undergraduate degree in economics of Satya Wacana University in 1995 and obtained his Master of Science degree in from Illinois University (US) in 1995.

On March 24, 2014 he started his job as the Director of Budgeting System and he formulates and implements policies and technical standardization in Budgeting System.

Agung Widiadi

Direktur Sistem Penganggaran
The Director of Budgeting System



Lahir pada tanggal 28 September 1956 di Balige – Sumatera Utara. Gelar sarjana ekonomi diraihinya pada tahun 1981 dari Universitas Gajah Mada dan gelar Master of Arts (M.A.) di bidang Public Finance dari Michigan State University – Amerika Serikat diraihinya pada tahun 1988.

Diangkat menjadi Direktur Anggaran I pada tanggal 15 September 2004, dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Born on September 28, 1956 in Balige – North Sumatera, Parluhutan Hutaeen obtained his economics degree from Gadjah Mada University in 1981 and Master of Arts in Public Finance from Department of Economics of Michigan State University in 1988.

He has been serving as Director of Budget I since September 15, 2004 and within his scope of responsibilities are formulation and implementation of policies and technical standardization in budgeting central government expenditure as instructed by the Director General of Budget.

Parluhutan Hutahaean

Direktur Anggaran I
The Director of Budget I

Lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1969. Gelar sarjana ekonomi diraihinya dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993 dan gelar Master in Economics di bidang Finance and Economics dari University of Nottingham United Kingdom pada tahun 2002.

Terhitung mulai tanggal 24 Maret 2014 diangkat menjadi Direktur Anggaran II, dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Born in Jakarta, April 21, 1969. He completed his undergraduate degree in economic at Jenderal Soedirman University in 1993, Master of Economics in Finance and Economics from University of Nottingham United Kingdom in 2002.

Assuming the position as the Director of Budget II since March 24, 2014 he is responsible for formulation and implementation of policies and technical standardization in budgeting central government expenditure as instructed by the Director General of Budget.

Purwanto

Direktur Anggaran II
The Director of Budget II





▼ **Dwi Pudjiastuti Handayani**
Direktur Anggaran III
Director of Budget III

Lahir di kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 1 Januari 1966. Meraih gelar sarjanaekonomipada1989dariUniversitas Diponegoro. Gelar Pasca Sarjana (Magister Sains) jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan diraihnya dari Universitas Gajah Mada tahun 1997.

Pada tanggal 24 Maret 2014 diangkat menjadi Direktur Anggaran III dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Dwi Pudjiastuti Handayani was born in Madiun, East Java on January 1, 1966. After graduating from economics department, Diponegoro University in 1989, she finished her Master program from Economics and Development Study of Gadjah Mada University in 1997.

On March 24, 2014, she was appointed as the Director of Budget III and within the line of her responsibilities are formulation and implementation of policies and technical standardization in budgeting central government expenditure and Budgeting Section of General Treasurer (BA BUN), except for Center-Regions Fiscal Transfer, and compilation of financial report on subsidy and other expenditures, as instructed by the Director General of Budget.

Alumnus Universitas Sebelas Maret Jurusan Ekonomi Umum tahun 1983 dan penyandang gelar Master of Public Management (M.P.M.) jurusan Public Management dari Carnegie Mellon University tahun 1991, dilahirkan di Semarang – Jawa Tengah, 4 Januari 1958.

Menjabat sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak terhitung tanggal 24 Maret 2014 yang bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumasan kebijakan, standarisasi dan evaluasi di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat.

Anandy Wati finished her General Economics program, Sebelas Maret University in 1983. She has a Master of Public Management degree majoring in Public Management that she obtained in 1991. She was born in Semarang, Central Java on January 4, 1958.

She started her position as the Director of Non Tax Revenue on March 24, 2014 and she is responsible for formulation and implementation of policies and technical standardization in Non Tax Revenue and also subsidy on the Directorate.



▼ **Anandy Wati**
Direktur PNBP
Director of Non Tax Revenue



Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1960. Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1983 ini, meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998.

Memangku jabatan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang PNBPN sejak 25 Mei 2012, dengan tugas melaksanakan penyusunan telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Anggaran.

Erman Jaya Kusuma was born in Jakarta on March 28, 1960. He graduated from State Accountancy Institute (STAN) in 1983 and continued to University of Indonesia and obtained his degree in economics in 1998.

He has been serving as the Non-Tax Revenues Reviewer since May 25, 2012. He makes reviews and recommendation on non-tax revenues and he reports directly to the Director General of Budget.

▼ **R. Erman Jaya Kusuma**
Tenaga Pengkaji Bidang PNBPN
Non-Tax Revenues Reviewer

Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Agustus 1965. Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987 ini, meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Islam Jakarta pada tahun 1995 dan Master of Science dari University of Colorado pada tahun 2001.

Pada tanggal 1 September 2014 diangkat menjadi Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan PNBPN sekaligus bertugas sebagai Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

Born in Singaraja on August 17, 1965. State Accountancy Institute (STAN) in 1987 and continued to University of Islam Jakarta and obtained his degree in economics in 1995 and also Master of Science from Colorado University on 2001.

He began serving as the Head of Non Tax Revenue Regulation Alignment and also duty substitute Director of Budgeting Regulation Alignment in Sept 1, 2014 and it is his duty to formulate and implement policies and technical standardization in budgeting regulation alignment.

▼ **Made Arya Wijaya**
Plt. Direktur HPP
(Duty Substitute) The Director of Budgeting Regulation Alignment



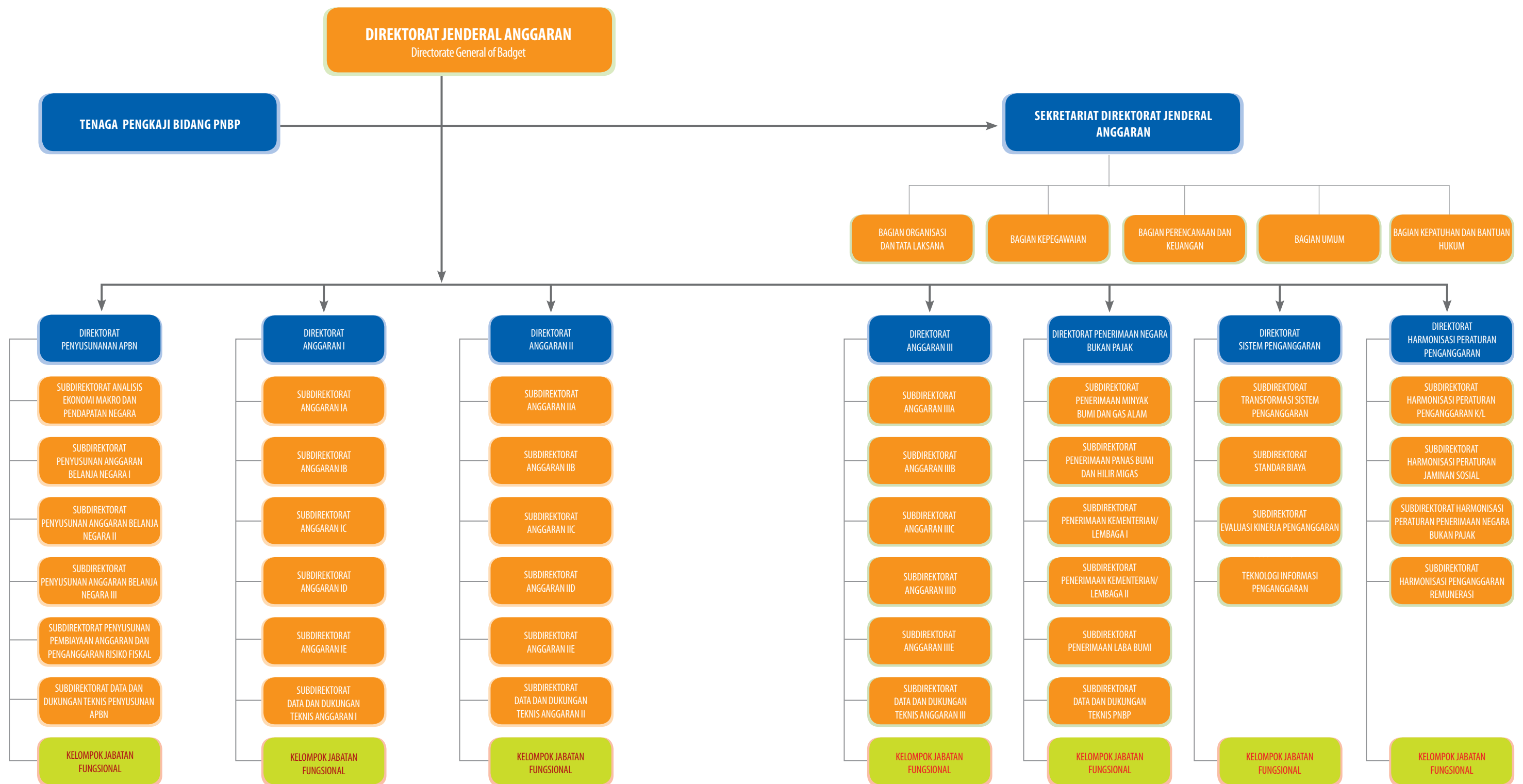


**ORGANISASI
DITJEN ANGGARAN**
ORGANIZATION OF DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET



PENATAAN ORGANISASI

ORGANIZATIONAL RESTRUCTURING

A. Latar Belakang

Salahsatu pilar reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan adalah penataan organisasi yang meliputi modernisasi organisasi, pemisahan, penggabungan, dan penajaman fungsi organisasi. Penataan organisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada publik.

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi tersebut, proses penataan organisasi di Kementerian Keuangan terus berlangsung hingga saat ini. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan terbitnya PMK nomor 184/PMK.01/2010. Perubahan tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan yang antara lain terkait dengan perubahan beban kerja yang signifikan, perluasan wilayah kegiatan, perubahan strategi organisasi, maupun perubahan kebijakan pemerintah dan tuntutan para pemangku kepentingan.

A. Background

One of the milestones in bureaucratic reform within the Ministry of Finance is organizational restructuring which includes modernizing the organization, separating, merging, and fine-tuning functions of the organization. Organizational restructuring is expected to bring about an effective and efficient bureaucracy which enables the organization to provide excellent service to the public.

To implement bureaucratic reform, the process of organizational restructuring within the Ministry of Finance continues to progress to date. Regulation of the Finance Minister (PMK) on the Organization and Administration of the Ministry of Finance has been amended several times, and the most recent update is PMK number 184/PMK.01/2010. Such changes are necessary to address various challenges which, among others, are related to significant changes in workload, expansion in scope of activities, modification to organizational strategy, a shift in government policies, and demands of stakeholders.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran. Apabila dilihat dari pasal 179 PMK nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas DJA adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran. Selanjutnya dalam pasal 180 disebutkan bahwa fungsi DJA adalah sebagai berikut:

- perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, DJA senantiasa melakukan kajian tentang proses bisnis dan efektifitas kinerja organisasi guna memastikan DJA dapat beroperasi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Berdasarkan hasil kajian tersebut, disadari bahwa perlu dilakukan penyesuaian terkait tugas dan fungsi organisasi DJA saat ini.

B. Penataan Organisasi

Reformasi birokrasi membutuhkan komitmen untuk melakukan transformasi kelembagaan menuju lembaga publik yang mampu mewujudkan Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penguatan aspek kelembagaan diharapkan dapat membangun dan mengembangkan organisasi yang dinamis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan keuangan negara, dan dinamika administrasi publik. Di DJA, pelaksanaan transformasi kelembagaan diarahkan untuk mewujudkan visi DJA sebagai pemacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

The Directorate General of Budget (DGB) is among first-echelon units within the Ministry of Finance whose main duties and functions are related to the formulation and implementation of policies in budgeting. As stipulated in Article 179 PMK number 184/PMK.01/2010 on Organization and Administration of the Ministry of Finance, it is the duty of the DGB to formulate and implement policies and technical standardization in budgeting. Furthermore, Article 180 states that the function of the DGB is as follows:

- to formulate policies in budgeting;
- to implement policies in budgeting;
- to formulate norms, standards, procedures, and criteria in budgeting;
- to provide technical guidance and evaluation in budgeting; and
- to manage administrative work of the Directorate General of Budget.

In carrying out its duties and functions, the DGB always reviews the effectiveness of its business processes and organizational performance to ensure optimal performance in satisfying the needs and expectations of its stakeholders. Such review reveals the fact that there is a need for an adjustment to the current duties and functions of the DGB.

B. Organizational restructuring

Bureaucratic reform entails a commitment to carrying out transformation towards a public institution that brings about prosperous, democratic, and fair Indonesia. It is expected that efforts to do institutional strengthening will help build and develop a dynamic organization that caters for the changing needs of the people, the development of state financial policies, and the dynamics of public administration. The institutional transformation within the DGB is geared towards realization of its vision, to be an agent accelerating quality management of state budget in order to achieve sustainable and equitable development.



Dalam mewujudkan visi tersebut, DJA perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, diantaranya melalui upaya penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut membutuhkan suatu sistem organisasi yang kokoh sehingga dapat mendorong seluruh anggotanya untuk turut berperan aktif dalam menciptakan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Namun demikian, DJA menyadari bahwa pembentukan sistem organisasi yang kokoh membutuhkan reformasi administrasi yang antara lain dilakukan dengan cara restrukturisasi organisasi.

DJA dalam penataan organisasi DJA tahun 2014 adalah pada penambahan 1 (satu) eselon IV, penajaman tugas dan fungsi organisasi serta penyesuaian nomenklatur. Penataan organisasi DJA Tahun 2014 adalah untuk menindaklanjuti:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2013 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi eks Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu:
 - a. Penambahan 1 (satu) unit eselon IV di Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran Direktorat Sistem Penganggaran, untuk menangani tugas monitoring dan evaluasi pengelolaan dana program pensiun PNS

In accordance with the vision of the DGB, a conducive working environment is created by setting into action values of the Ministry of Finance: integrity, professionalism, synergy, service, and excellence. To ensure internalization of the values, a robust organizational system is needed to encourage all personnel to actively take part in the creation of a value-inspired working culture. Yet, the DGB is fully aware that such a robust organizational system requires organizational restructuring.

The 2014 restructuring in the DGB adds one (1) echelon IV level, fine-tunes organizational tasks and functions, and makes nomenclatural adjustments. The 2014 restructuring aims to respond to:

1. Decree of the Minister of Finance No. 210/KMK.01/2013 on how to perform the tasks and functions of the former Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency, which includes:
 - a. The addition of one (1) unit of echelon IV within the Sub-directorate of Budget Performance Evaluation of the Directorate of Budgeting System. This unit monitors and evaluates how pension fund of civil servants and military/police personnel is managed in accordance with the estimated workload;

dan TNI/Polri sesuai dengan perhitungan perkiraan beban kerja;

- b. Perubahan uraian tugas Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Jaminan Sosial, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran untuk mengakomodasi tambahan tugas perumusan kebijakan dana pensiun PNS dan TNI/Polri.

2. Perubahan uraian tugas di Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II dan Direktorat Anggaran III untuk mengakomodasi pelaksanaan tugas terkait DIPA dan revisinya tidak terakomodir dalam penataan organisasi tahun 2014 (perubahan PMK 184/PMK.01/2010 menjadi PMK 206/PMK.01/2014).
3. Surat penyampaian penataan organisasi angka 1 (satu) dan 2 (dua) disampaikan ke Biro Organta dengan Surat nomor S-682/AG.1/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
4. DJA melalui surat nomor S-580/AG.1/2014 tanggal 5 September 2014 menyampaikan susulan penataan di lingkungan DJA yaitu:
 - a. Perubahan nomenklatur pada Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam menjadi Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Penggabungan antara Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas dengan Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN menjadi Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN;
 - c. Pembentukan Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga III sehingga pengelolaan PNBPN secara integral dan komprehensif dapat ditangani baik penerimaan SDA non Migas maupun PNBPN lainnya;
 - d. Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi seksi verifikasi dengan merubah seksi verifikasi pada Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I dan II menjadi seksi teknis.

- b. Modification to the job description of Sub-directorate of Alignment of Social-Security-related Budgeting Regulations of the Directorate of Budgeting Regulations Alignment, which is intended to accommodate the additional task of formulating policies related to pension fund of civil servants and military/police personnel.

2. Alterations in the job description of the Directorate of Budget I, II, and III to accommodate tasks related to DIPA and revision to it, which are not accommodated by 2014 organizational restructuring (amendment to PMK 184/PMK.01/2010 which transforms into PMK 206/PMK.01/2014).
3. A notification letter, S-682/AG.1/2013, about organizational restructuring number 1 (one) and two (2), sent to Organta Bureau on October 10, 2013.
4. In a letter numbered S-580/AG.1/2014, dated September 5, 2014, the DGB proposes restructuring measures within its own units:
 - a. A nomenclatural modification in which Sub-directorate of Revenues from Petroleum and Natural Gas is now known as Sub-directorate of Revenues from Oil and Natural Gas, which is in accordance with Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas;
 - b. Merging of Sub-directorate of Revenues from Geothermal and Downstream Oil and Gas activities into Sub-directorate of Revenues from State-owned Companies;
 - c. Formation of Sub-directorate of Revenues from Ministries/Agencies III to ensure an integrated and comprehensive management of Non-Tax Revenues, including revenues from non-oil and gas activities and others;
 - d. Transformation of verification section within Sub-directorate of Revenues from Ministries/Agencies I and II into a technical section to enhance its effectiveness.

These restructuring measures are intended to reshape the DGB into a more effective,



Pelaksanaan penataan organisasi DJA sebagaimana dituangkan di atas diharapkan akan mendorong terbentuknya organisasi DJA yang lebih efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel, *check and balances*, serta sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

C. Penutup

Penataan organisasi Tahun 2014 dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang merupakan perubahan terakhir dari PMK nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Secara keseluruhan, susunan struktur serta rincian tugas dan fungsi sebagaimana disampaikan di atas dirancang untuk mewujudkan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran yang lebih efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel, *check and balances*, serta sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

efficient, responsive, transparent, and accountable organization that maintains checks and balances and satisfies better the needs of the people within the framework of good governance.

C. Conclusion

The 2014 organizational restructuring reflects the essence of Minister of Finance Regulation No. 206/PMK.01/2014 dated October 17, 2014, itself the latest amendment to PMK number 184/PMK.01/2010 dated October 11, 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Finance.

Overall, the new organizational structure and details of duties and functions are designed to ensure that the Directorate General of Budget transforms into a more effective, efficient, responsive, transparent, and accountable organization that maintains checks and balances and satisfies better the needs of the people within the framework of good governance.



CAPAIAN IKU DJA KPI ACHIEVEMENTS BY THE DGB

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) guna memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, setiap tahun disusun peta strategis. Sasaran strategis tersebut mencerminkan hal-hal strategis yang ingin dicapai DJA dalam tahun tertentu.

Sasaran strategis yang ingin dicapai DJA pada tahun 2014 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran strategis. Meliputi Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas, Pemenuhan Layanan Publik, Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi, Perencanaan APBN yang Berkualitas, Sistem dan Proses Penganggaran yang Optimal, Monitoring dan Evaluasi yang Efektif, SDM yang Kompetitif, Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi, TIK yang Terintegrasi, dan Pelaksanaan Anggaran yang Optimal.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut DJA menyusun 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui IKU dimaksud diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan Kementerian Keuangan sejauh mana masing-masing unit kerja berhasil mewujudkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja DJA tahun 2014 terdapat 3 IKU yang tidak memenuhi target dan 11 IKU yang sesuai/ melebihi target yang telah ditetapkan. IKU yang tidak memenuhi target adalah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (indeks capaian 99,25%), Indeks Kesehatan Organisasi (indeks capaian 98,5%) dan Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja (indeks capaian 93,04%).

Selanjutnya, pengelompokkan berdasarkan *perspective* pada peta strategi dibagi menjadi

To spur quality management of the state budget and to achieve sustainable and equitable development, a strategic map is drawn up each year. This map reflects strategic objectives that the DGB wants to achieve in a given year.

There are ten 2014 strategic objectives which cover Quality Budgeting Policies, Delivery of Public Services, High User Compliance, Quality State Budget Planning, Optimal Budgeting Process and System, Effective Monitoring and Evaluation, Competitive Human Resources, Healthy and Highly-performing Organization, Integrated ICT, and Optimal Budget Spending.

To accomplish the afore-mentioned strategic objectives, the DGB draw up 14 (fourteen) Key Performance Indicators (KPI). These indicators keep the leadership of the Ministry of Finance informed about the extent to which each business unit manages to achieve the agreed goals.

While the fiscal year 2014 saw three indicators fell short of their expectations, eleven indicators were successfully attained/exceeded. The DGB missed its target on these indicators: User Satisfaction Index (achieved index 99.25%), Organizational Health Index (achieved index 98.5%), and Percentage of Budget Spent and Spending Output Achievement (achieved index 93.04%).

Meanwhile, the strategic map comprises four different layers reflecting different perspectives.

4 (empat) *layer*. Pada *Stakeholder Perspective* seluruh target dalam sasaran strategis dan IKU seluruhnya dapat tercapai, yaitu IKU Akurasi Perencanaan APBN (indeks capaian 106,4%), dan IKU Jumlah Penerimaan PNBPN (indeks capaian 100,11%). Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan yang diberikan DJA kepada *stakeholder* memberikan nilai positif dan sesuai ekspektasi *stakeholder*.

Selanjutnya, pada *Customer Perspective* terdapat IKU yang tidak mencapai target, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (indeks capaian 3,97 dari yang ditargetkan sebesar 4). Artinya, ke depannya membutuhkan upaya yang lebih serius seluruh pegawai DJA untuk meningkatkan pelayanan kepada *customer* DJA.

Sedangkan pada *Internal Process Perspective* semua IKU memenuhi target yang ditetapkan. Adapun untuk *Learning and Growth Perspective* terdapat 2 (dua) IKU yang tidak mencapai target yaitu IKU Indeks Kesehatan Organisasi dan IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja.

Adapun rincian capaian masing-masing IKU sebagaimana tabel dibawah ini:

All indicators within Stakeholder Perspective are all well-achieved: State Budget Planning Accuracy (achieved index 106.4%) and Total Collected Non-Tax Revenues (achieved index 100.11%). The achieved indexes demonstrate that the service DGB delivers has met the expectation of stakeholders.

There is one indicator within Customer Perspective, User Satisfaction Index, whose actual achievement is behind the target (achieved index 3.97, lower than the set target of 4). This translates into the need for all employees of the DGB to show further improvement in their service to customers in the future.

Although all indicators within Internal Process Perspective are all successfully met, two indicators within Learning and Growth Perspective, Organizational Health Index and Percentage of Budget Spent and Spending Output Achievement, do not come up to expectation.

Presented below are detailed achievements of each Key Performance Indicators:

Capaian IKU Kemenkeu One Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2014
KPI Achievements by Kemenkeu One, Directorate General of Budget in Fiscal Year 2014

No.	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
Stakeholders Perspective (25%)					103,68
1	Kebijakan penganggaran yang berkualitas				103,68
	1a-N	Akurasi perencanaan APBN	90,00%	95,70%	106,39
	1b-N	Jumlah Penerimaan PNBPN	386,94T	390,70	100,98
Customer Perspective (15%)					105,14
2	Pemenuhan Layanan Publik				99,17
	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,00	3,97	99,17
3	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi				111,11

	3a-N	Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program	90,00%	100,00%	111,11
Internal Process Perspective (30%)					116,41
4	Perencanaan APBN yang berkualitas				120,00
	4a-CP	Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L *	20,00%	11,30%	120,00
5	Sistem dan proses penganggaran yang optimal				109,22
	5a-N	Penerapan sistem PBK	100,00%	100,00%	100,00
	5b-CP	Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08)	4,00	4,00	120,00
	5c-N	Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu	100,00%	107,65	107,65
6	Monitoring dan evaluasi yang efektif				120,00
	6a-N	Penyempurnaan sistem reward dan punishment	50,00%	50,00%	120,00
Learning & Growth Perspective (30%)					98,05
7	SDM yang kompetitif				100,10
	7a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan *	97,00%	97,10%	100,10
8	Organisasi sehat yang berkinerja tinggi				99,07
	8a-CP	Indeks Kesehatan Organisasi *	68,00	67,00	98,52
	8b-CP	Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan	100,00%	100,00%	100,00
9	TIK yang terintegrasi				100,00
	9a-N	Implementasi penelaahan RKA-K/L online	50,00%	50%	100,00
10	Pelaksanaan anggaran yang optimal				93,04
	10a-CP	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja *	95,00%	88,40%	93,04
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					106,03

Disamping memfokuskan pencapaian target-target kinerja, DJA juga melaksanakan target-target pekerjaan lain di luar IKU. Selama tahun 2014 terdapat beberapa keberhasilan pelaksanaan tugas (diluar IKU) yang cukup menonjol, antara lain pencapaian penganugerahan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), penggunaan *logic model* (ADIK) dalam penyusunan penganggaran, penelaahan RKA-KL *Online*, implementasi Sistem Penerimaan PNBPN *Online* (SIMPONI), dan tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi atas pembahasan anggaran di DPR RI.

In addition to attaining the preset targets, the DGB has also performed activities to achieve goals beyond what are stated in KPI. Among significant achievement of such goals in 2014 are the conferring of Corruption-Free Zone (CFZ), implementation of a logic system (ADIK) in budget planning, online RKA-KL review, online Non-Tax Revenue payment system (SIMPONI), and follow-up to the ruling of Constitutional Court on budget discussion with the House of Representatives.

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION

Inisiatif Transformasi Kelembagaan DJA tidak terlepas dengan pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan secara menyeluruh. Transformasi Kelembagaan lingkup Kementerian Keuangan telah ditetapkan dalam *blueprint* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/MK.01/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. *Blueprint* tersebut merupakan acuan pelaksanaan transformasi kelembagaan di dalam Kementerian Keuangan dengan 4 tema yang menjadi fokus transformasi tersebut, yaitu Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, Tema Perpajakan, Tema Bea Cukai, dan Tema Sentral.

Berkenaan dengan hal tersebut, DJA sebagai salah satu unit yang harus mengimplementasikan TK telah proaktif untuk mengimplementasikan substansi *blueprint* dimaksud. Hal ini ditunjukkan dengan telah bergulirnya inisiatif transformasi sebelum *blueprint* ditetapkan dengan ditetapkannya Tim Implementasi Transformasi Kelembagaan DJA berdasarkan Keputusan Dirjen Anggaran Nomor 70/AG/2013 tanggal 5 Desember 2013 (telah diperbarui dengan Surat Keputusan Dirjen Anggaran Nomor 2/AG/2014 tanggal 28 Januari 2014). Tim tersebut dibentuk untuk memastikan guna memfasilitasi pelaksanaan transformasi kelembagaan pada DJA, dimana keterhubungan antara Tim di DJA dengan Tim di Kemenkeu diwakili dengan adanya *Project Management Office* (PMO) di DJA dan *Central Transformation Office* (CTO) di Sekjen.

Substansi transformasi DJA mencakup tiga tema transformasi yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2019, transformasi DJA dirumuskan dari visi dan misi baru DJA, terdiri dari:

- Mengubah Ke Fokus Kinerja dan Analisis Anggaran,

The DGB's decision to transform itself conforms to the blueprint for organizational transformation throughout the ministry of finance. The plan to embark on transformation is made formal after the issue of Minister of Finance decree number 36/MK.01/2014 on the Blueprint for Organizational Transformation within the Ministry of Finance 2014-2025. The Blueprint has since become a reference on organizational transformation within the ministry. There are four points of transformation focus, which are called themes: Budgeting, Treasury, Taxation, Customs and the Central Theme.

The DGB, however, has already started the process of transformation even before the ministerial decree was issued and binding. On December 5, 2013 the DGB issued a decree Number 70/AG/2013 concerning transformation within its own organization. The decree – later revised by decree No. 2/AG/2014 dated January 28, 2014 – serves as a basis for the formation of a team that ensures and facilitates transformation within the directorate. To keep the work of transformation team within the directorate in concord with the one within the whole Ministry of Finance, a Project Management Office (PMO) has been set in the DGB and Central Transformation Office (CTO) in the Secretary General.

The DGB has set three themes as its main focus of transformation, scheduled to run until 2019. These focus of transformation has been formulated as the DGB's new vision and missions:

- focus shift upon Performance and Budget Analysis,

- Menyederhanakan Proses Anggaran, dan
- Memperkuat Kapabilitas Penganggaran di Seluruh Pemerintahan.

- simplified Budget Process, and
- increased budgeting capability in the entire government.

Tiga tema transformasi dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam 6 inisiatif dengan gambaran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

The above three themes are further elaborated in 6 initiatives described below:

TEMA	INISIATIF	URAIAN
Berkokus kepada kinerja anggaran dan analisis	1. Menerapkan arsitektur Penganggaran Berbasis Outcome	- Mendefinisikan Logic Model dan merancang format dokumen anggaran yang baru - Meluncurkan ke K/L pilot (Kemenkeu, Kemendiknas, Kemen-PU, Polri)
	2. Memperkuat monitoring dan evaluasi pada outcome anggaran	- Mengonsolidasikan fungsi MONEV serta merancang proses untuk menggunakan hasilnya sebagai feedback pada anggaran ditahun mendatang dan early warning pada tahun berjalan - Membagi tanggung jawab yang jelas pada sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis outcome <i>Single point of contact</i> (SPOC) untuk K/L dalam menyerahkan data dan menerbitkan laporan resmi - Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dalam menyusun desain SPOC dan Sistem Monev
Menyederhanakan proses/ birokrasi anggaran	3. Menyederhanakan Proses Anggaran End-to-End	- Membangun proses anggaran yang efektif, efisien, dan kolaboratif - Memperbaiki pendekatan dalam penyusunan pagu anggaran - Menerapkan satu putaran dalam pengajuan inisiatif baru - Memperkuat proses penilaian RKA-KL - Mengurangi jumlah satker dan dokumen DIPA - Membatasi revisi level output hanya pada APBN-P
	4. Meningkatkan interaksi yang efektif dengan para stakeholder	- Menata ulang peran DJA dalam interaksi dengan para stakeholder utama untuk menghasilkan outcome anggaran yang lebih baik - Memetakan tanggung jawab antara DJA dan BAPPENAS dengan jelas melalui petunjuk teknis gabungan (juknis) - Mengembangkan pedoman prosedur interaksi yang jelas antara DJA dengan DPR
Memperkuat kapabilitas penganggaran di seluruh Pemerintahan	5. Membangun Kapabilitas dari Pengguna Anggaran (K/L)	- Mengembangkan panduan proses anggaran end-to-end yang sederhana dan user-friendly (APBN 101) - Mengembangkan help desk penganggaran yang berbasis web - Menerapkan delivery task force anggaran untuk menyediakan bimbingan dan monitoring yang real time kepada KL
	6. Membangun Kapabilitas Internal pada DJA	- Meningkatkan kapabilitas DJA dalam rangka memainkan peran yang lebih strategis dan analitis - Fokus kepada pembangunan kapabilitas pada semua elemen di DJA - Mendesain perangkat analisis untuk peran budget analyst yang baru - Menyusun program pembangunan kapabilitas yang berkelanjutan

Penjelasan dari keterhubungan dari tiga tema dimaksud dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Untuk dapat merubah fokus dari penganggaran line item ke berbasis kinerja, perlu adanya perbaikan atas informasi anggaran yang disajikan agar analisis lebih lanjut dapat dilaksanakan. Selanjutnya, penguatan monitoring dan evaluasi atas outcome menjadi kebutuhan lanjutan guna memberikan pemaknaan atas hasil perbaikan arsitektur penganggaran dimaksud. Penguatan monev juga merupakan langkah DJA menuju pekerjaan yang mengandalkan kemampuan analisis mengingat selama ini DJA dipandang hanya berkutat pada hal administratif;
- b. Untuk bisa bekerja analitis, DJA perlu menekan jumlah pekerjaan administrasi yang dilakukan seminim mungkin sehingga para pegawai lebih memahami substansi dari proposal daripada hanya compliance atas suatu aturan. Sejalan dengan itu guna menjaga compliance atas aturan, pergeseran fungsi ke Kementerian/ Lembaga dilakukan, termasuk optimalisasi aparat pemeriksa internal pemerintah di masing-masing K/L. Dengan demikian Penyederhanaan proses end-to-end menjadi *crusial*. Dilain pihak guna memastikan proses tetap sederhana komunikasi efektif dengan pihak eksternal perlu dijalin agar sistem berjalan sebagaimana mestinya;
- c. Terakhir adalah konsekuensi dari dua hal diatas adalah peningkatan kapabilitas, baik K/L dan DJA. K/L perlu disiapkan untuk melaksanakan kegiatan yang memang seharusnya dilakukannya yakni menyiapkan RKAKL. Dilain pihak jika posisi DJA menjadi analitis yang selamanya administratif maka DJA perlu upgrading kemampuan harus mempersiapkan para personelnnya untuk naik kelas. Kita akan persiapan sesuai dengan kebutuhan proses yang baru. Personel DJA akan disiapkan untuk memahami substansi dan mengaitkan usulan dengan efeknya pada fiskal saat ini bahkan proyeksinya mendatang. Lebih lanjut, redundancy, duplikasi dan lain-lain perlu juga dipahami guna mendukung kerja Pemerintah yang efektif.

The following is a brief description of how the aforementioned themes connect to each others:

- a. To shift focus away from line-item to performance-based budgeting system, there is a need to improve budget information so that further analysis can be carried out. Furthermore, consolidated monitoring and evaluation of outcome is needed to assign meaning to results of budgeting architecture improvement. Such consolidation will take the DGB a step higher towards a level where it relies more on analytical skills rather than administrative;
- b. To work analytically, the DGB needs to minimize the load of administrative work so that its employees are able to grasp the substance of the proposed idea, instead of merely complying with rules. To ensure compliance with rules, ministries/agencies are given more responsibilities, including optimization of government internal audit officials in each ministries/agencies. Therefore, simplification to end-to-end process is crucial. Meanwhile, to keep the process simple, the system needs to work properly and communication with external parties needs to remain effective;
- c. The logical consequence of focus-shifting and working analytically is the need for increased capability. Therefore, it is necessary that ministries and agencies are able to do their own Work and Budget Planning. On the other hand, it is imperative that the DGB upgrades the capability of its employees to enable them to take up the challenge of analytical – instead of the usual, administrative – work. Personnel of the DGB are expected to be able to understand the essence of an issue and associate a proposal with its consequence on the current and future fiscal year. Furthermore, they also need to be able to recognize any redundancy, duplication and other issues to ensure effective government work.

DJA secara umum telah mampu meraih momentum Transformasi Kelembagaan yang dilaksanakan lebih awal di tahun 2014. Diinisiasi pada akhir tahun 2013, tim implementasi telah bekerja mengidentifikasi kebutuhan dengan mensinkronkan rencana kegiatan yang ada dalam draft cetak biru transformasi kelembagaan yang ada pada saat itu, sebelum ditetapkan dengan KMK 36/MK.01/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Adapun hal-hal yang telah dicapai selama tahun 2014 antara lain:

a. Bidang Inisiatif I

1. Arsitektur anggaran yang berfokus pada outcome telah disiapkan panduannya dan menjadi bagian dalam pengaturan PMK 136/MK.02/2014 tentang Juksunlah RKAKL;
2. Modul pelatihan untuk perubahan arsitektur sebagaimana dimaksud pada butir 1) telah disusun dan digunakan sebagai bahan training internal dan eksternal;
3. TOT internal DJA dan Training secara berkala bagi K/L tentang arsitektur baru penganggaran telah dilaksanakan, antara lain:
 - TOT internal dilaksanakan pada akhir Juni 2014
 - Training berkala bagi K/L dimulai pada tanggal 15-19 September 2014
 - Workshop bagi K/L pada tanggal 20 November 2014
4. FAQs atas pertanyaan selama pelatihan dan pendampingan berlangsung disusun guna mempersiapkan implementasi secara penuh arsitektur baru.

b. Bidang Inisiatif II

1. Panduan Monev atas pelaksanaan RKAKL oleh DJA telah disusun;
2. Tim Rancangan Gabungan untuk SPOC sudah dibentuk dengan keputusan Dirjen Anggaran nomor Kep-22/AG/2014;
3. Pengembangan sistem IT untuk mendukung SPOC bagi K/L dalam menyajikan dan menyampaikan laporan hasil monev anggaran

In general the DGB has been able to take the most of opportunities to do organizational transformation since early 2014. Established in late 2013, the team responsible for the implementation of organizational transformation managed to identify the needs and synchronize its work plan with the then blueprint, prior to the enactment of KMK 36/MK.01/2014 on the Organizational Transformation Blueprint of the Ministry of Finance.

Among 2014 achievements are:

a. Initiative I

1. A handbook on outcome-based budgeting architecture has been made available as stipulated in PMK 136/MK.02/2014 on how to do Work and Budget Planning;
2. The handbook as referred to in point 1) has been used as material for internal and external training;
3. Internal TOT sessions for personnel of the DGB and regular training on the new budgeting architecture for personnel from ministries/agencies have been conducted:
 - Internal TOT sessions were held by the end of June 2014
 - Regular training for ministry/agency personnel was held on 15-19 September 2014
 - Workshop for ministry/agency personnel was held on November 20, 2014
4. A list of FAQs raised during training has been generated to assist total implementation of the new budgeting architecture.

b. Initiative II

1. A Monitoring and Evaluation Guide for the implementation of RKAKL by the DGB has been prepared;
2. The joint team responsible for designing SPOC has been established by the decree of the Director General of Budget No. Kep-22/AG/2014;
3. Development of an IT system, called Synergy Application System, to support SPOC and to facilitate ministries/agencies in presenting and

telah dibangun yaitu dengan “Sistem Aplikasi Sinergi”;

4. Pengembangan proses untuk memasukkan hasil monev sebagai *tools* dalam proses alokasi anggaran telah disusun panduannya;
5. Aplikasi Monev sudah diimplementasikan guna menyusun laporan monev kinerja penganggaran.

c. Bidang Inisiatif III

1. Pedoman Review Baseline 2015 telah dibuat dan telah digunakan untuk review baseline TA 2015. Saat ini sedang ditempuh langkah-langkah perbaikan untuk penyusunan pedoman review baseline 2016;
2. Implementasi *Single Round* Pengusulan Inisiatif Baru masih perlu upaya lebih lanjut untuk peningkatan kualitas proposal inisiatif baru. Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini pengaturan mengenai inisiatif baru ditetapkan oleh Bappenas sehingga DJA dalam hal ini hanya memberikan masukan atas hal dimaksud;
3. *Data Warehouse* Tunggal untuk *Baseline* dan *New Initiative* (tempat untuk menampung referensi inisiatif baru yang akan digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan *trilateral meeting*) telah tersedia;
4. Kajian Pengurangan Jumlah Satker telah dilaksanakan;
5. Pengaturan Revisi yang baru telah diselesaikan;

d. Bidang Inisiatif IV

1. *Data Warehouse* Tunggal Penganggaran sudah selesai (sama dengan bidang III);
2. Kajian Pembagian Peran pada Tahap Perencanaan Anggaran sudah dilakukan (Hubungan antara DJA dan Bappenas);
3. Kajian Standardisasi dan Mekanisme Interaksi Pemerintah dengan DPR dalam konteks penganggaran telah dilakukan dengan menghasilkan usulan format persetujuan DPR;

submitting budget Monitoring and Evaluation results;

4. Development of a tool to input Monitoring and Evaluation results as part of budget allocation process;
5. Monitoring and Evaluation Application is already available and is used to prepare reports on monitoring and evaluation of budget performance.

c. Initiative III

1. Baseline Review Guidelines 2015 have been drawn up and used to review Baseline Fiscal Year 2015. Formulation of Baseline Review Guidelines 2016 is in progress with revisions added to it;
2. As it turns out following the implementation of single-round procedure for proposing new initiatives, there are new proposals that need quality improvement. Currently, procedures to submit new initiatives are set by Bappenas and the DGB merely provides input on certain matters;
3. A single Data Warehouse to store information and references concerning Baseline and New Initiative, retrievable for trilateral meetings, has been made available;
4. A proposal to reduce the number of task forces has been reviewed;
5. Guidelines for new revisions have been set;

d. Initiative IV

1. A single, Budgeting Data Warehouse has been completed (similar to what is stated in Initiative III);
2. A clear distribution of responsibilities between the DGB and Bappenas regarding Budget Planning has been reviewed;
3. Standardized mechanism for interaction between the Government and the House of Representatives regarding discussion on Budget has been reviewed. As a result, a format for approval from the House of Representatives has been proposed;

e. Bidang Inisiatif V

1. Pemilihan dan pelatihan *Task Force* Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 21-22 Oktober 2014);
2. Pengembangan *Toolkits* dan Materi Petunjuk (catatan: disatukan dengan inisiatif I FAQs terkait dengan penataan ADIK);
3. Uji coba *Taskforce* pada K/L pilot dalam pelaksanaan Bimtek dan analisis atas keefektifannya telah dilaksanakan.

f. Bidang Inisiatif VI

1. Penyiapan proses percepatan penetapan jabatan fungsional *Budget Analyst* sebagai bagian dari Kajian Organisasi telah disusun naskah akademis pembentukan jabatan fungsional dan telah dibahas secara intens dengan Tim Transformasi Kelembagaan, perwakilan masing-masing Direktorat, serta telah dikoordinasikan dengan Biro Organta Kemenkeu;
2. Pengembangan program pelatihan untuk membangun kemampuan baru yang diperlukan oleh *Budget Analyst* di PNB, P. APBN dan unit lainnya telah dilakukan sebagai kelanjutan dari peningkatan kapabilitas pada Dit. Anggaran I, Dit. Anggaran II, dan Dit. Anggaran III;

Keberhasilan DJA dalam meraih momentum Transformasi Kelembagaan pada Tahun 2014 akan dilanjutkan dengan langkah-langkah nyata implementasi Transformasi Kelembagaan untuk masing-masing inisiatifnya. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mencapai peningkatan *value for money* atas alokasi APBN sesuai dengan visi dan misi baru DJA.



e. Initiative V

1. Selection of and Training for Task Force personnel was held on October 21-22, 2014;
2. A set of Toolkits and Instructions have been prepared (note: they are presented in FAQs list compiled in Initiative I together with information concerning (ADIK);
3. Performance of Task Force in pilot ministry/ agency has been tested, technical counseling and analysis of its effectiveness have been conducted.

f. Initiative VI

1. An academic paper on formation of functional ranks has been discussed intensely with the Organizational-Transformation Team and representatives of each Directorate and has been coordinated by the Organta Bureau of Ministry of Finance. It is a move to accelerate creation of functional Budget Analyst position;
2. A new training program has been designed to increase capabilities of Budget Analysts in Non-Tax Revenues, P. State Budget and other units. The program follows capability building carried out in Directorate of Budget I, II, and III;

Actions to carry out organizational transformation for each initiative are set to follow the DGB's success in transforming itself in 2014. This is necessary to increase the value of allocated money in the budget, and it reflects the DGB's new vision and missions.





PROFIL DITJEN ANGGARAN

PROFILE OF DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET

SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCE

Pembinaan dan Pengelolaan SDM di Direktorat Jenderal Anggaran

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Jenderal Anggaran tidak lepas dari suatu siklus yang keseluruhannya menggambarkan kegiatan mulai dari perencanaan SDM sampai pegawai memasuki masa pensiun/purnabakti. Kegiatan strategis yang dilakukan Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran terkait pembinaan dan pengelolaan SDM selama tahun 2014 adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan SDM

Perencanaan sumber daya manusia (*human resource planning*) di Direktorat Jenderal Anggaran dilakukan untuk menentukan proyeksi kebutuhan dan pergerakan SDM menuju kondisi yang diinginkan di masa depan. Perencanaan ini disusun

Policies on Human Resources

Policies on Human Resources in the Directorate General of Budget reflect a process ranging from making plan about personnel until preparation for retirement. Outlined below are strategic activities concerning human resources management in 2014.

1. Human Resources Planning

To plan human resources, a projection of the expected situation in the future and all personnel needed to fill up all necessary ranks and posts is drawn up. This plan is necessary to ensure that the organization performs effectively and efficiently. In 2014, the DGB recruited 75 new employees consisting of 45 people with undergraduate degree and 30 graduates of STAN batch 2013

untuk memenuhi kebutuhan SDM di semua level manajemen agar organisasi dapat lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Anggaran menerima pegawai baru sebanyak 75 orang terdiri dari 45 orang lulusan S-1 dan 30 orang pegawai lulusan DIII STAN tahun 2013 jurusan akuntansi. Pegawai lulusan S-1 sudah didistribusikan melalui SK Nomor KEP-63/AG./UP.9/2014 dan Nomor KEP-68/AG./2014 dan untuk lulusan DIII STAN telah ditempatkan sementara melalui Nota Dinas Nomor NDR-11/AG.1/2015.

Untuk menentukan komposisi pegawai, DJA menggunakan Analisis Beban Kerja sebagai teknik perencanaan SDM. Analisis Beban Kerja ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyektif mengenai suatu beban kerja yang diemban unit kerja dengan melakukan perbandingan antara jumlah beban kerja pegawai dan waktu pelaksanaan kerja.

Berdasarkan proses dan teknik perencanaan yang telah dilakukan, dalam rentang waktu lima tahun kedepan (2013-2017), Direktorat Jenderal Anggaran telah menyusun rencana rekrutmen pegawai dengan mempertimbangkan masing-masing kebutuhan unit eselon II DJA, jumlah pegawai yang pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia, pindah unit kerja, dll.

2. Rekrutmen

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Anggaran membutuhkan SDM baru sebanyak 30 orang. Pemenuhan kebutuhan SDM ini didapat dari jalur rekrutmen lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Proses rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi yang berkualitas dan berbobot. Seleksi dilakukan untuk mengetahui kemampuan akademis dan *soft-competency* para calon pegawai. Proses seleksi ini dilakukan disesuaikan dengan jalur rekrutmennya.

3. Induction Program

Guna mempercepat penyesuaian calon pegawai dalam lingkungan kerja Kementerian Keuangan

majoring in accounting. Decree No. KEP-63/AG./UP.9/2014 and No. KEP-68/AG./2014 formalize positions for new recruits with undergraduate degree, while Office Memorandum No. NDR-11/AG. 1/2015 provides graduates of STAN with temporary official status.

The DGB uses Workload Analysis to decide on and plan the composition of its employees. Workload analysis is a tool for making an objective picture of the workload of a certain unit. The amount of workload is derived from a ratio between the load of work that a unit has and the time spent to complete the work.

The analysis has helped the DGB take into account variables such as the number of employees needed by echelon II units, employees going into retirement, predicted number of those who resign, die, rotate around the different units, and plan its recruitment program within five-year term (2013-2017).

2. Recruitment

Since the DGB had been projected to require 30 new recruits by 2014, it recovered the need for new people by recruiting graduates of from State College of Accountancy (STAN). The recruitment process – credible and transparent – considers academic skill and soft skill demonstrated by applicants.

3. Induction Program

To accelerate the process in which new recruits adjust themselves to the new environment, the DGB organized an induction program on October



diselenggarakan kegiatan *induction program* pada tanggal 5 Oktober 2014 yang dibuka oleh Menteri Keuangan dan dihadiri para jajaran Eselon I Kementerian Keuangan. Kegiatan ini meliputi pengenalan internalisasi visi misi organisasi, budaya kerja yang berlaku, tugas dan fungsi, serta pengetahuan mendasar tentang mekanisme birokrasi. Pada tanggal 27 Oktober 2014 s.d. 12 November 2014 telah dilaksanakan kegiatan pemberian materi dari tiap-tiap direktorat pada Direktorat Jenderal Anggaran serta dilanjutkan dengan kegiatan *on the job training* pada tanggal 17 November 2014 – 22 Februari 2015.

4. Assessment Center

Perincian pejabat Eselon II, III, dan IV pada Direktorat Jenderal Anggaran yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan adalah sebagai berikut.

Target 2014		Capaian s.d. 30 Des 2014	Index Capaian	Penjelasan Capaian				
Q4	Y							
97%	97,00%	97,16%	100,00%					
				Eselon	Formasi	Bezeting	Sudah AC	Nilai JPM ≥72
				II	9	8	8	8
				III	43	43	43	42
				IV	161	161	160	155
				Total	213	213	211	205
Realisasi IKU				97,16%				

5. Pengembangan Kapasitas Pegawai SDM

Dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, pada tahun 2014 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut.

6. Pengelolaan Kinerja Pegawai

Pengelola kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran menggunakan *balanced scorecard*. Pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan

5, 2014. The Minister of Finance opened the event and all Echelon I officials were among the guests. New recruits learned in the program the vision and missions of the organization, the prevailing work culture, duties and functions, as well as basic knowledge about the mechanism of bureaucracy. Each directorate within the DGB presented its material from October 27, 2014 to November 12, 2014. New recruits participated in on-the-job training from November 17, 2014 to February 22, 2015.

4. Assessment Center

Presented below is detailed information about Echelon II, III, and IV of the Directorate General of Budget that have met the competency standards.

5. Personnel Capacity Development

Various activities were held in 2014 to develop capacity of the DGB's personnel. The following data show what has been achieved.

6. Employee Performance Management

To manage performance, the DGB employs balance scorecard. The use of scorecard is based on the Decree of the Minister of Finance No. 454/KMK.01/2011 on Performance Management in the Ministry of Finance. The decree coincides with Government Regulation No. 46 Year 2011 issued by the Minister of Administrative Reform

No	Materi (IKU)	Target 2014		Capaian s.d. 30 Des 2014	Index Capaian	Penjelasan Capaian
		Q4	Y			
1	Persentase Pegawai DJA yang memenuhi standar jamlat	100%	100%	99,76%	99,76%	Jumlah Pegawai DJA yang telah memenuhi Standar Jamlat: Jumlah Pegawai Memenuhi Es. II = 9 Es. II = 9 Es. III = 42 Es. III = 42 Es. IV = 160 Es. IV = 160 <u>Pelaksana = 620</u> <u>Pelaksana = 618</u> Jumlah = 831 Jumlah = 829 Persentase (829/833)x100% = 99,76%
2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Bagian Kepegawaian	95%	95%	93,86%	98,76%	A. Realisasi Anggaran (SP2D) = 87,71% (Rp5.116.379.442): B. Realisasi Output Target Realisasi Layanan DIKLAT : Diklat Hard. Comp 68 75 Diklat Soft. Comp 16 25 JUMLAH 84 100 Capaian Output 100/84x 100% = 119% ≈ 100%

Kementerian Keuangan. Seiring berjalannya proses implementasi KMK tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ditetapkan juga Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 sebagai aturan pelaksanaan PP 46 Tahun 2011.

7. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Sepanjang tahun 2014, sebanyak 106 penghargaan Satya Lencana Karya Satya telah dibagikan kepada para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun sebanyak 34 orang;
- Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun sebanyak 43 orang;
- Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun sebanyak 29 orang.

and Bureaucratic Reform on Job Performance Assessment of Civil Servants. Then regulation of the Head of BKN No. 1 Year 2013 acts as the implementation of Government Regulation No. 46 year 2011.

7. Satya Lencana Karya Satya Award

A total of 106 civil servants, employees of the Directorate General of Budget, were awarded with Satya Lencana Karya Satya Medals in 2014:

- Satya Lencana Karya Satya for 10 years of service awarded to 34 people;
- Satya Lencana Karya Satya for 20 years of service awarded to 43 people;
- Satya Lencana Karya Satya for 30 years of service awarded to 29 people.

8. Sistem Infomasi Kepegawaian

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG merupakan urat nadi bagi pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi modern. Dalam rangka membangun SIMPEG yang terintegrasi, telah dilakukan koordinasi dengan seluruh jajaran unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, terutama guna melaksanakan kegiatan sinkronisasi status atau kondisi data kepegawaian antar masing-masing direktorat dengan data kepegawaian pada *database* kepegawaian di Sekeretariat Direktorat Jenderal Anggaran.

9. Mutasi

Salah satu bentuk penghargaan PNS adalah mutasi. Hal ini sebagai wujud dari dinamika yang menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pemberian mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi pegawai agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Sepanjang tahun 2014, terdapat 345 mutasi pegawai dengan perincian sebagai berikut:

- Pejabat Eselon II : 6 orang;
- Pejabat Eselon III : 6 orang;
- Pejabat Eselon IV : 47 orang;
- Pelaksana : 286 orang.

Komposisi SDM Per 31 Desember 2014

KOMPOSISI PEGAWAI DJA**KOMPOSISI PENDIDIKAN**
LEVEL OF EDUCATION

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
S3	4	0.44%
S2	256	28.38%
S1	3888	43.02%
DIPLOMA	196	21.73%
SLTA	56	6.21%
SLTP	1	0.11%
SD	1	0.114%
TOTAL	902	100%

KOMPOSISI JABATAN
POSITIONS

ESELON	JUMLAH	%
ESELON I	1	0.11%
ESELON II	8	0.89%
ESELON III	43	4.77%
ESELON IV	160	14.74%
NON ESELON	690	76.49%
TOTAL	902	100%

8. Personnel Information Systems

SIMPEG or Personnel Information Systems is vital to human resources development in a modern organization. To build an integrated SIMPEG, the whole units within the directorate have worked together to synchronize employment data that they have with the one stored in personnel database of the Secretariat of Directorate General of Budget.

9. Rotations

One of the ways to recognize employee achievement, to maintain dynamics, and to help achieve organizational goals is rotation. It is a mechanism that provides an employee with an opportunity to develop his/her potential. There were 345 personnel rotated in 2014:

- Echelon II Officials : 6 people;
- Echelon III Officials : 6 people;
- Echelon IV Officials : 47 people;
- Regular Employees : 286 people.

Composition of Human Resources by December 31, 2014

KOMPOSISI GOLONGAN
COMPOSITION OF RANKS

GOLONGAN	JUMLAH	%
IV/E	0	0.00%
IV/D	3	0.47%
IV/C	3	0.47%
IV/B	15	1.30%
IV/A	85	8.16%
III/D	151	17.85%
III/C	157	19.03%
III/B	123	15.01%
III/A	127	12.06%
II/D	70	4.96%
II/C	143	17.38%
II/B	22	2.96%
IIA	3	0.35%
TOTAL	902	100%

KOMPOSISI AGAMA
RELEGION GROUP

AGAMA	JUMLAH	%
ISLAM	797	88.36%
PROTESTAN	77	8.54%
KATHOLIK	18	2.00%
BUDHA	0	0%
HINDU	10	1.11%

KOMPOSISI GENDER
GENDER PROPORTION

JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
LAKI-LAKI	697	77.27%
PEREMPUAN	205	22.73%
TOTAL	902	100%

KOMPOSISI UNIT**DATA PEGAWAI DITJEN ANGGARAN**

UNIT	JUMLAH	%
Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	89	9.87%
Direktorat Anggaran I	129	14.30%
Direktorat Anggaran II	123	13.64%
Direktorat Anggaran III	124	13.75%
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak	101	11.20%
Direktorat Sistem Penganggaran	95	10.53%
Direktorat Jenderal Anggaran	1	0.11%
Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran	195	21.62%
Tenaga Pengkaji Bidang PNB	1	0.11%
Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran	44	4.88%

KOMPOSISI USIA
AGE GROUP

KELOMPOK USIA	JUMLAH	%
>50	84	9.31%
41 - 50	263	29.16%
31 - 40	228	25.28%
18 - 30	327	36.25%

KOMPOSISI STATUS KEPEGAWAIAN
AGE GROUP

KELOMPOK USIA	JUMLAH	%
Calon PNS	75	8.31%
PNS	827	91.69%

ALOKASI ANGGARAN DJA DAN REALISASINYA

ALLOCATED BUDGET AND ITS SPENDING

Alokasi Anggaran dan Realisasi DIPA TA 2014

A. Alokasi Anggaran DIPA Tahun 2014

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-760/MK.02/2013 tanggal 28 Oktober 2013, hal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2014, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) memperoleh alokasi pada awal tahun 2014 sebesar Rp171.781.463.000,-. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN-P Tahun Anggaran 2014 ditetapkan pagu anggaran Direktorat Jenderal Anggaran berubah menjadi Rp130.618.343,-. Pada bulan Juli 2014 dilakukan pemotongan anggaran belanja sebesar Rp41.163.120.000,-, sehingga pada akhir tahun anggaran 2014 jumlah alokasi anggaran DJA menjadi Rp130.618.343.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Alokasi DIPA DJA TA 2014

Detailed information on the Budget of the DGB in 2014

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp) Per 1 Januari 2014	Pagu (Rp) Per 31 Desember 2014
1	Pegawai Personnel	55.980.289.000	55.980.289.000
2	Barang Goods	82.038.290.000	71.260.887.000
3	Modal Capital	33.762.884.000	3.377.167.000
	Jumlah	171.781.463.000	130.618.343.000

Allocated Budget and Its Actual Expenditurein Fiscal Year 2014

A. Allocated Budget in 2014

As detailed in the Minister of Finance Circular Letter No. S-760/MK.02/2013 dated October 28, 2013, on Expenditure and Budget Allocation Policy for Ministries/Agencies in Fiscal Year 2014, the Directorate General of Budget received Rp171,781,463,000 at the beginning of 2014. A letter from the Minister of Finance No.S-347/MK.02/2014 dated June 14, 2014 on Revision to Budget Ceiling of Ministries/Agencies as stated in the Revised State Budget 2014, the ceiling of the DGB's budget has been revised to Rp 130,618,343. A spending cut amounting to Rp 41,163,120,000 was applied in July 2014, reducing the total budget of the DGB to Rp 130,618,343,000 as presented below:

Selama Tahun Anggaran 2014, DJA telah melakukan revisi DIPA sebanyak 10 kali, sebagaimana berikut:

The DGB revised its Budget Allocation List ten times in 2014 as shown below:

Perkembangan DIPA DJA TA 2014

Chronological Development of 2014Budget Allocation List of the DGB
(dalam ribuan rupiah)

No	DIPA	Pagu	Keterangan	Perubahan
1	DIPA Awal	171.781.463		
2	DIPA Revisi I	171.781.463	Perubahan Pejabat Perbendaharaan (PPSPM)	
3	DIPA Revisi II	171.781.463	Revisi antar kegiatan dari BSBL menjadi ABPP	
4	DIPA Revisi III	171.781.463	Perubahan volume dan satuan output Layanan Perkantoran dan perubahan Pejabat	
5	DIPA Revisi ke IV	171.781.463	Revisi antar kegiatan untuk memenuhi pendanaan tenaga pengkaji PNB	
6	DIPA Revisi ke V	171.781.463	Pergeseran antar output pada kegiatan ABPP (A3) dan perubahan akun perjadi Dit. PAPBN	
7	DIPA Revisi ke VI	130.618.343	APBN-P TA 2014 (Pemotongan Pagu)	41.163.120
8	DIPA Revisi ke VII	130.618.343	Revisi anggaran untuk memenuhi kegiatan transformasi kelembagaan	
9	DIPA Revisi ke VIII	130.618.343	Revisi antar kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan P-APBN, PNB, DSP, dan HPP	
10	DIPA Revisi ke IX	130.618.343	Revisi antar output untuk memenuhi kebutuhan pendanaan rapat pimpinan	
11	DIPA Revisi X	130.618.343	Revisi antar output untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penyusunan pagu indikatif dan pagu anggaran 2015	

Keterangan:

Guna meningkatkan kualitas belanja dan pengamanan APBN TA 2014, maka telah dilakukan penghematan DIPA DJA pada APBN-P TA 2014 sebesar Rp41.163.120.000,- yang berasal dari pemotongan anggaran belanja barang dan belanja modal.

Notes:

The DGB decided to cut its spending on goods and capital expenditure by Rp 41,163,120,000 to improve the quality of spending and to secure State Budget 2014.

B. Realisasi DIPA 2014

Realisasi DIPA DJA per 31 Desember 2014 mencapai sebesar Rp114.666.989.987,- atau 87,79% dari alokasi anggaran DIPA DJA tahun 2014 sebesar Rp130.618.343.000,- dengan rincian sebagai berikut:

B. Actual Expenditure2014

The total actual expenditureby December 31, 2014 reached Rp 114,666,989,987 or 87.79% of the allocated budget amounting to Rp 130,618,343,000 as detailed below:

1. Realisasi DIPA DJA Per Jenis Belanja s.d. 31 Desember 2014

1. Actual expenditure of the DGB by items by December 31, 2014

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			SP2D (Rp)	(%)
1	Pegawai	55.980.289.000	51.436.298.955	91,88%
2	Belanja	71.260.887.000	59.950.881.532	84,13%
3	Modal	3.377.167.000	3.279.809.500	97,12%
	Jumlah	130.618.343.000	114.666.989.987	87,79%

2. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal DIPA DJA s.d 31 Desember 2014, yang menjadi dasar untuk perhitungan IKU
2. The actual expenditure on goods and capital by December 31, 2014 which becomes the basis for KPI-based evaluation

No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			SP2D (Rp)	(%)
1	Barang	71.260.887.000	59.950.881.532	84,13%
2	Modal	3.377.167.000	3.279.809.500	97,12%
	Jumlah	74.638.054.000	63.230.691.032	84,72 %

Target IKU (realisasi belanja barang dan belanja modal) DJA pada TA 2014 sebesar 95%, sehingga dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan target IKU maka pencapaian realisasi IKU DIPA DJA 2014 yang sebesar 84,72% tersebut lebih rendah sebesar 10,28%. Sedangkan realisasi DIPA Per Jenis Belanja pada TA 2014 sebesar 87,79%. Rendahnya realisasi DIPA DJA tersebut disebabkan oleh adanya efisiensi dan sisa anggaran.

Sincethe target expenditure, as indicated by KPI, on goods and capital had been set to 95%, the actual expenditure in 2014, whichwas 84.72%, is lower by 10.28% than the target. Meanwhile, the actual expenditure per type of items in 2014 is only 87.79%. Such a low figure comes as a result of efficiency.



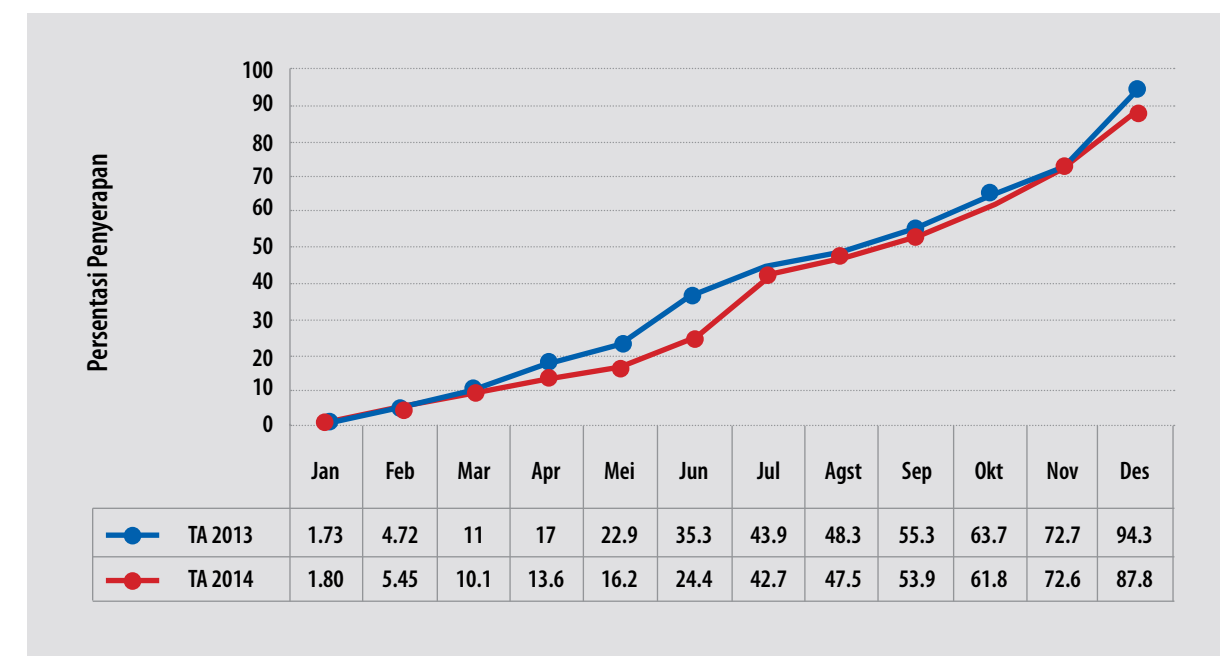
Adapun penjelasan lebih rinci atas sisa anggaran belanja DJA TA 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Presented below is detailed information on how the DGB reduced its expenses in 2014:

Sisa Anggaran Belanja DJA TA 2014
how the DGB reduced its expenses in 2014

No.	Keterangan	Uraian	Sisa Dana	% dari pagu belanja	Penjelasan
1	Efisiensi	Konsinyering/ Sosialisasi/Workshop/ Bimtek/Monev	Rp7.692.411.849,-	12,83%	a. Workshop aplikasi dan penyerahan DIPA tidak jadi dilaksanakan. b. Larangan melaksanakan kegiatan menggunakan paket kegiatan di hotel (konsinyering), rapat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas dalam kantor. c. Pengeluaran untuk uang saku lebih rendah karena peserta konsinyering lebih sedikit dari undangan.
		Pengeluaran Kegiatan Rutin Operasional dan Non Operasional DJA	Rp1.490.283.431,-	2,49%	a. Efisiensi pengeluaran belanja bahan untuk penelaahan RKAKL tahun 2014 karena sistem penelaahan RKAKL yang berbeda dari tahun 2013. b. Efisiensi pengeluaran kegiatan rutin operasional perkantoran DJA.
2	Sisa Anggaran	Belanja Pegawai	Rp13.597.419.934,-	8,58%	Sisa Anggaran berupa: a. Gaji sebesar Rp1.777.537.904,- b. Uang Makan sebesar Rp1.010.811.800,- c. Uang lembur sebesar Rp1.626.374.950,-

Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran DJA TA 2013 dan TA 2014
Comparison of actual expenditure in 2013 and 2014



PAGU ANGGARAN K/L BUDGET CEILING FOR MINISTRIES/AGENCIES

APBN disusun Pemerintah setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Sesuai Pasal (1) 23 UUD 1945 Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada ayat (2) diatur bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu.

Dalam rangka penyusunan APBN, seperti telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, terdapat tiga kali penetapan pagu dana untuk K/L yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Angka yang tercantum dalam ketiga ketentuan tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh K/L sebagai acuan dalam menyusun RKA-K/L-nya. Ketiga pagu tersebut adalah sebagai berikut:

I. Pagu Indikatif

Angka yang tercantum dalam prakiraan maju dijadikan sebagai angka dasar, sebagai salah satu variabel yang menentukan besarnya pagu indikatif. Dalam rangka menyusun pagu indikatif untuk tahun yang direncanakan, melalui proses sebagai berikut:

1. Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

Setiap awal tahun, Presiden menetapkan arah

The government drafts the state budget every year to keep itself functioning and to attain the goals of the nation. As specified in Article (1) 23 1945, the state budget is set annually according to the law and expenditures are made transparently and responsibly for the greatest prosperity of the people. Paragraph (2) stipulates that the president submits the bill of state budget and discuss it together with the House of Representatives while taking into consideration opinion of the Regional Representatives Council. If the House does not approve the proposed draft State Budget, last year's State Budget will apply.

As mandated in Government Regulation No. 90 of 2010 on Setting Work and Budget Planning of Ministry/Agency, there are three different ceilings: indicative ceiling, budget ceiling, and budget allocation. What is expressed in these ceilings are the highest figures that all budgets set by ministry/agency shall not exceed. What follows is further discussion about those ceilings:

I. Indicative Ceiling

One of variables determining indicative ceiling figure is baseline forecast. The process to draw up indicative ceiling for a given year is as follows:

1. The President sets the direction of state policies and priorities of national development
At the beginning of a given year, Apart from setting the direction of state policies and priorities of national development, the president also decides on the priority of budget allocation. The direction of policies and budget priorities become the basis for designing government work plan.
2. Ministries/Agencies evaluate their own baseline
To plan and set the budget of a given year, the baseline forecast from previous planning and budgeting documents is used as the basis.

kebijakan yang akan dilakukan pada tahun yang direncanakan, disini Presiden menetapkan prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan pada tahun yang akan direncanakan. Selain itu Presiden juga menetapkan prioritas pengalokasian dari anggaran yang dimiliki pemerintah. Arah kebijakan dan prioritas anggaran ini akan dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan RKP.

2. K/L mengevaluasi *baseline* (angka dasar)

Prakiraan maju yang telah dicantumkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya akan dijadikan angka dasar untuk perencanaan dan penganggaran tahun anggaran yang direncanakan. Namun demikian, angka yang tercantum dalam prakiraan maju tersebut harus disesuaikan/direvisi terlebih dahulu untuk mendapatkan angka yang betul dan akan digunakan. Dalam proses review tersebut, akan fokus pada penetapan berlanjut atau berhenti dari suatu *output*, besarnya volume *output*, penetapan sifat dari komponen *output* (utama atau pendukung), serta evaluasi komponen *input* dari *output* yang dibutuhkan pada tahun yang direncanakan.

3. K/L dapat menyusun rencana inisiatif baru

Apabila terdapat Program/Kegiatan/Output yang akan dilakukan dan belum dilakukan pada tahun sebelumnya, K/L dapat mengajukan rencana tersebut dengan mekanisme inisiatif baru. Inisiatif baru dapat diajukan dalam tiga kali kesempatan, yaitu kesempatan pertama sebelum penetapan pagu indikatif, kesempatan kedua sebelum penetapan pagu anggaran, dan kesempatan ketiga sebelum penetapan alokasi anggaran. Hal-hal terkait dengan mekanisme pengajuan usul inisiatif baru berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 1 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru.

4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan mengevaluasi *baseline* dan mengkaji usulan inisiatif baru

However, this figure has to be tweaked/reviewed to derive at a more suitable number. During such review, focus may stop at or start from a certain output and output volume, whether an output is the main or supporting component, as well as evaluation of the input component based on required output.

3. Ministries/Agencies may propose new initiatives
Whenever there is a planned program/activity/output that fail to materialize in the previous year, ministry/agency may submit the proposal to carry it out using the new initiative mechanism. There are three occasions in which new initiatives can be proposed. First, it is before indicative ceiling is set. Second, it is prior to the settling of budget ceiling, and third before budget allocation is fixed. The Regulation of the Minister of National Development Planning / Head of National Development Planning Agency Number 1 of 2011 provides guidance on how to submit proposed initiatives.

4. The Ministry of National Development Planning/Bappenas and the Ministry of Finance evaluate baselines and review proposed new initiatives



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi terhadap hasil reviu angka dasar yang telah dilakukan oleh K/L. Evaluasi ini untuk memastikan bahwa angka dasar yang telah direviu sudah benar. Selain itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan juga mengevaluasi atas usulan inisiatif baru yang diajukan K/L. Disamping itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan juga melakukan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sedang berjalan, sebagai pertimbangan dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan yang nantinya akan tertuang dalam pagu indikatif yang akan ditetapkan.

5. Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal.

Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari.

6. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyusun Pagu Indikatif.

Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan disusun dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif dimaksud dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunannasional yang dituangkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disampaikan kepada K/L dengan Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret. Pagu indikatif dirinci menurut unit organisasi, program, dan kegiatan. Angka yang

The Ministry of National Development Planning/Bappenas and the Ministry of Finance evaluate the baseline that has been reviewed by ministries/agencies, and check its suitability. Both ministries also evaluate new initiatives proposed by ministries/agencies. They also assess progress with on-going programs and activities and use result of the assessment as consideration when planning the next programs and activities which will be affected by indicative ceiling that both ministries are going to set.

5. The Ministry of Finance estimates fiscal capacity
The Ministry of Finance draws up estimated fiscal capacity to help set Indicative Ceiling and adjust medium-term budget ceiling, which should be done no later than mid-February.

6. The Minister of Finance and Minister of National Development Planning/Head of National Development Planning set Indicative Ceiling.
Indicative Ceiling is set to suit national development priorities and direction of state policies, and fiscal capacity becomes one of considerations during the setting. Indicative ceiling is specified according to organizational units, programs, activities, and indication of funding. Defined Indicative ceiling and draft of Government Work Plan are distributed among ministries/agencies in a Joint Circular signed by the Minister of Finance and the Minister of National Development Planning in March. The figure in indicative ceiling is



tercantum dalam pagu indikatif diperoleh dari angka prakiraan maju yang sudah dicantumkan tahun sebelumnya yang telah melalui proses penyesuaian ditambah dengan inisiatif baru pada kesempatan pertama yang diakomodasi/disetujui.

II. Pagu Anggaran

Tahapan Pagu Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja K/L (Renja-K/L)

Dalam menyusun Renja-K/L, K/L berpedoman pada surat mengenai Pagu Indikatif dan hasil kesepakatan trilateral meeting. Renja-K/L dimaksud disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang memuat:

- a. kebijakan;
- b. program; dan
- c. kegiatan.

2. Trilateral Meeting

Proses penyusunan Renja-K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini dilakukan dimulai setelah ditetapkannya

baseline forecast derived from previous year's baseline that has already been adjusted. Approved new initiatives are also added in the baseline.

II. Budget Ceiling

Steps in setting budget ceiling:

1. Minister/Head of agency prepare ministry/ agency work plan

In making the Work Plan, Indicative Ceiling and results of trilateral meeting are taken into consideration. The Work Plan should reflect performance-based approach, medium-term expenditure framework, and integrated budgeting that includes:

- a. policy;
- b. program; and
- c. activities

2. Trilateral Meeting

The work plan is drafted in a trilateral meeting among Ministry/Agency proposing the plan, Ministry of National Development Planning, and the Ministry of Finance. Such discussion usually begins soon after Indicative Ceiling is fixed and continues until the the deadline for work plan submission is approaching. The goals of such meeting are:



Pagu Indikatif sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan, terkait dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP;
 - b. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJMN, RKP, Renja K/L, dan RKA-K/L;
 - c. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai: kegiatan prioritas; jumlah PHLN; dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); Anggaran Responsif Gender (ARG); anggaran pendidikan; PNB/BLU; inisiatif baru; belanja operasional; kebutuhan tambahan rupiah murni; dan pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
3. K/L menyampaikan Renja-K/L kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit

- a. To improve coordination and to reduce differences among the Ministry/Agency, the Ministry of National Development Planning, and the Ministry of Finance;
 - b. To ensure that different policies in the existing planning and budgeting documents are not in conflict with each other;
 - c. To arrive at a shared commitment to making necessary improvements to the Draft of Government Work Plan. It includes a common conception of priority activities, the number of PHLN, partnership between the government and private sector, Gender-Responsive Budgeting (ARG), education budget; PNB/BLU, new initiatives, operational expenditure, additional needs for pure rupiah, and Deconcentration and Co-Administration.
3. Ministries/Agencies submit their work plan to Bappenas and the Ministry of Finance. Minister/Head of Agency hands in their work plan to the Ministry of National Development Planning and the Ministry of Finance. The work plan becomes a basis for revision to the draft of government work plan and serves as a source of references in setting the detailed ceiling figures.

organisasi, fungsi, program, dan kegiatan sebagai bagian dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN.

4. Pemerintah menetapkan RKP.
5. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN yang meliputi:
 - a. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 - c. Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan.
6. Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/L. Dalam rangka penyusunan RKA-K/L, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran Pagu Indikatif, Renja-K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga. Pagu Anggaran K/L dimaksud menggambarkan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci menurut unit organisasi dan program. Angka yang tercantum dalam pagu anggaran adalah angka di pagu indikatif, penyesuaian angka dasar (jika diperlukan lagi) ditambah dengan inisiatif baru pada kesempatan ke-2 yang diakomodir/disetujui. Pagu Anggaran K/L disampaikan kepada setiap Kementerian/Lembaga paling lambat pada akhir bulan Juni.

III. Alokasi Anggaran

Tahapan Pagu Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan:
 - a. Pagu Anggaran K/L;
 - b. Renja-K/L;
 - c. RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;
 - d. Standar biaya.
 Penyusunan RKA-K/L dimaksud termasuk menampung usulan Inisiatif Baru. RKA-K/L

4. The government makes its work plan.
5. The government outlines main points within the draft of state budget. These main points cover:
 - a. Macroeconomic Framework and points of Fiscal Policy;
 - b. Government Work Plan (GWP);
 - c. Details of organizational units, functions, programs and activities.
6. The Minister of Finance sets the Budget Ceiling for ministries/agencies. To draw up Work and Budget Planning of Ministry/Agency, the Minister of Finance sets Budget Ceiling. The figure expressed in the ceiling is derived from fiscal capacity, Indicative Ceiling, ministry/agency work plan, and evaluation of the performance of ministry/agency. The Budget Ceiling reflects the direction of state policies – set by the President and customized to different organizational units and programs. The figure is derived from the indicative ceiling figure with a few tweaks – if necessary – and adjustments to accommodate approved new initiatives proposed on the second chance. Ministries/Agencies are notified about the approved ceiling no later than the end of June.

III. Budget Allocation

The following are steps to draw up Budget Ceiling:

1. Minister/Head of Agency drafts a Work and Budget Plan. The plan is based on:
 - a. Budget Ceiling;
 - b. Ministry/agency Work Plan;
 - c. Government Work Plan that both the government and the House of Representatives have agreed on;
 - d. Standard charges.
 It should accommodate proposed new initiatives. This Work and Budget Plan – after being reviewed by the ministry/agency proposing the plan together with the Ministry



- merupakan bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. RKA-K/L menjadi bahan penyusunan RUU APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara K/L dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
2. K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR
Dalam rangka pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan DPR. Pembahasan tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan Inisiatif Baru.
 3. Penyesuaian atas usulan inisiatif baru
Dalam pembahasan RKA-K/L dengan DPR, dapat dilakukan penyesuaian atas usulan inisiatif baru sepanjang:
 - a. Sesuai RKP;
 - b. Pencapaian sasaran kinerja K/L;
 - c. Tidak melampaui Pagu Anggaran K/L.
 4. Penelaahan RKA-K/L
Penelaahan RKA-K/L tersebut diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. Penelaahan RKA-K/L dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi:
 - a. Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja;
 - b. Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan RKP.
 5. Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil penelaahan untuk digunakan sebagai:
 - a. Bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan RUU APBN;
 - b. Dokumen pendukung pembahasan RAPBN. Setelah dibahas dalam sidang kabinet, Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN disampaikan pemerintah kepada DPR paling lambat bulan Agustus. Hasil pembahasan RAPBN dan RUU APBN dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan RAPBN dan RUU APBN dan bersifat final.
- of Finance and the Ministry of National Development Planning – forms the basis for the draft state budget bill.
2. Ministry/Agency discusses its Work and Budget Plan with the House of Representatives
Prior to discussing the draft state, the House of Representatives has a meeting with ministry/agency to talk about work and budget plan of the latter. The focus of the meeting is the proposed new initiatives.
 3. Modification to the proposed new initiatives
A proposed new initiative may undergo a few adjustments during the discussion to ensure that:
 - a. It complies with the Government Work Plan;
 - b. It conforms to the goals of the ministry/agency work plan;
 - c. It does not exceed the budget ceiling.
 4. A review of Work and Budget Plan of Ministry/Agency
The review should come to a completion by the end of July. The integrated review covers:
 - a. Feasibility of the budget from the perspective of target achievement;
 - b. Conformity of targets of achievement with Government Work Plan.
 5. The Ministry of Finance compiles the Work and Budget Plans of all ministries and agencies that have been reviewed and use them as:
 - a. Data to prepare Financial Note, the draft state budget, and the draft state budget bill;
 - b. Documents to facilitate discussion on draft state budget.
Having discussed the Financial Note, the draft state budget, and the draft state budget bill in a cabinet meeting, the government submits them to the House in August at the latest. Results of the discussion on draft state budget and state budget bill are documented in the minutes of the agreement and the discussion is considered final.

6. Hasil penyesuaian RKA-K/L tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditelaah dan kemudian dijadikan dasar menyusun Keputusan Presiden mengenai Alokasi Anggaran K/L dan BUN. Alokasi Anggaran K/L dirinci menurut klasifikasi anggaran. Sedangkan Alokasi Anggaran BUN dirinci menurut:
 - a. Kebutuhan Pemerintah Pusat; dan
 - b. Transfer kepada daerah.
7. Pemerintah menetapkan Alokasi Anggaran K/L dan Kementerian Keuangan selaku BUN. Angka yang tercantum dalam Alokasi Anggaran adalah angka yang tertuang dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan RUU APBN, penyesuaian angka dasar (jika diperlukan lagi), ditambah dengan inisiatif baru pada kesempatan ke-3 yang diakomodir/disetujui
8. Selanjutnya Menteri/pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Keppres RABPP, dan kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember.
9. Tahap selanjutnya adalah Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat tanggal 31 Desember.

6. The modified Work and Budget Plan of Ministry/Agency is submitted to the Ministry of Finance for a review and is later used as a basis to formulate a presidential decree on Budget Allocation for ministries/agencies and state enterprises. The budget is allocated to already-specified budget classification. The budget allocated for state enterprises is adjusted to suit:
 - a. The need of central government; and
 - b. Regional transfer.
7. The government sets Budget Allocation for ministries/agencies and the Ministry of Finance as a state enterprise.
The figure stated in the Budget allocation is the same number that is recorded in the minutes of the state budget bill agreement with a few adjustments, if necessary. The figure also accommodates approved new initiatives proposed on the third chance.
8. Next, minister/head of Agency prepares a document authorizing the use of budget – as specified in the presidential decree on budget allocation – and submits the document to the Minister of Finance for approval. The Finance minister approves the document by December 31, at the latest.
9. Finally, the document is enacted by the Minister of Finance by December 31, at the latest.

IV. Berikut tabel Pagu dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015

IV. Different Ceilings from 2013 to 2015

TAHUN 2013 SD 2015
(dalam miliar Rp)
From 2013 to 2015

TAHUN	PAGU INDIKATIF	PAGU ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN
2013	537.782,1	547.852,5	594.597,6
2014	552.011,3	612.652,3	637.841,6
2015	605.728,9	600.634,1	647.309,9

- Dalam proses penyusunan Pagu Indikatif 2013, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah melakukan pemantapan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Pemantapan ABK dilakukan dengan kebijakan (i) menyempurnakan pola pengalokasian anggaran yang mengacu pada prinsip *money follow function*, (ii) memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan anggaran melalui penyederhanaan struktur anggaran dan jenis belanja, (iii) meningkatkan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan target kinerja yang akan dihasilkan (iv) Meningkatkan efisiensi belanja melalui penajaman atas kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja dan konsistensi sasaran kinerja dengan Renstra/Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- Pagu Anggaran TA 2015 bersifat baseline budget. Pagu tersebut termasuk anggaran pendidikan K/L sebesar Rp117.598,8 Miliar dan dana unallocated sebesar Rp4,3 Triliun (untuk mengakomodasi hasil Musrenbangnas dalam rangka sinergi pemerintah pusat dan daerah). Besaran pagu tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.02/2014 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Langkah-langkah Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015.
- Alokasi Anggaran Tahun 2015 sudah termasuk alokasi untuk Kementerian/Lembaga yang baru terbentuk sesuai dengan terbentuknya Kabinet Kerja.
- The Indicative Ceiling 2013 reflects Performance-based Budget (PBB) that the DGB endorses. The DGB facilitates the implementation of PBB by: (i.) improving budget allocation pattern that observes money-follow-function principle; (ii.) giving greater flexibility to Budget Users (BU)/Budget User Authority (BUA) by streamlining the budget structure and the types of expenditure; (iii.) closing the gap between budget allocation and target of performance; (iv.) improving the efficiency of budget spending by closing the gap between budget feasibility and target of performance and making target of performance consistent with Strategic Plan/Government Work Plan.
- Budget Ceiling of Fiscal Year 2015 is baseline budget. The ceiling includes education budget for ministry/agency amounting to Rp117,598.8billion and unallocated fund Rp4.3 trillion (to accommodate results of national development planning meeting about synergy between central and regional government). The exact figure expressed in the ceiling is stated in the Decree of Minsiter of Finance No. 278/KMK.02/2014 on Ceiling set for Budget of Ministries/Agencies and Steps to Finalize Work and Budget Plan of Ministries/Agencies in Fiscal Year 2015.
- The allocation of 2015 budget has already accommodated newly-formed ministry/agency of Work Cabinet.



LAPORAN BA 999.07 DAN 999.08

BA 999.07 AND 999.08 REPORTS

A . Laporan BA 999.07

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat (UU APBN). Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi dan subsidi non energi.

Subsidi Energi, terdiri dari:

- Subsidi BBM
- Subsidi Listrik .

Perhitungan Belanja Negara Subsidi Non Energi, terdiri dari:

- Subsidi Pangan
- Subsidi Pupuk
- Subsidi Benih
- Subsidi Bunga Kredit Program
- Subsidi/bantuan PSO
- Subsidi Pajak/DTP.

Subsidi BBM

Subsidi BBM diberikan dengan maksud untuk mengendalikan harga jual BBM di dalam negeri, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sedemikian rupa, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan harga jual BBM dalam negeri sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal, terutama harga minyak mentah di pasar dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada saat ini, BBM bersubsidi hanya diberikan pada beberapa jenis BBM tertentu, yaitu meliputi minyak tanah (kerosene) untuk rumah tangga, minyak solar (*gas oil*), dan premium di SPBU kecuali untuk industri, dan Bahan Bakar Nabati (BBN) serta LPG tabung 3 kg.

A. BA 999.07 Report

Subsidy is a type of budget expenditure allocated for companies/organizations that produce, sell, export, or import goods and services that influence the lives of many so that they should be kept affordable for general public (State Budget Law). Such expenditure is allocated for energy and non-energy subsidies.

Energy subsidies comprise of:

- Fuel Subsidy
- Electricity Subsidy

Meanwhile, non-energy subsidies include:

- Food Subsidy
- Fertilizer Subsidy
- Seeds Subsidy
- Loan-Interest SubsidyProgram
- Subsidy/Assistance for PSO
- Government-borneTax/DTP.

Fuel Subsidy

The subsidy is designed to control the price of fuel within the country's boundaries. One of basic needs for many, fuel needs to be kept affordable especially for people with low-income. The price of fuel is highly affected by price of crude oil on the worldmarket and the exchange rate against the US dollar. Currently, the subsidy is allocated for certain types of fuel such as kerosene for households, diesel fuel, leaded gasoline (except for industrial use), biofuel, and three-kilogram LPGs.

Beberapa parameter yang mempengaruhi perubahan subsidi BBM di Indonesia:

- ICP (Indonesian *Crude Oil Price*) adalah harga jual minyak mentah di Indonesia.
- Kurs adalah nilai tukar mata uang asing terhadap nilai mata uang dalam negeri.
- Alpha (α) adalah biaya yang terdiri dari biaya distribusi dan margin.
- Volume BBM bersubsidi yaitu jumlah bahan bakar yang dipasarkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu untuk disubsidi. Volume BBM bersubsidi termasuk volume Bahan Bakar Nabati (BBN) dan LPG tabung 3 kg.
- Harga jual BBM bersubsidi.
- Jenis BBM yang disubsidi.

Subsidi Listrik

Dalam rangka menyediakan kebutuhan energi listrik yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas, Pemerintah memberikan subsidi listrik yang diperuntukkan bagi pelanggan listrik tertentu yang menjadi sasaran subsidi, yaitu kelompok pelanggan sosial (S1 dan S2), rumah tangga (R1), bisnis (B1), dan industri (I1) dengan daya terpasang sampai dengan 900 VA. Subsidi diberikan dalam bentuk penetapan tarif dasar listrik (TDL) yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari harga pokok produksinya pada golongan tarif tersebut, sehingga akan lebih mencerminkan keadilan dan pemerataan. Subsidi listrik ini disalurkan melalui PT PLN. Perhitungan subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kwh) dari masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kwh) untuk masing-masing golongan tarif. Biaya pokok produksi (BPP) listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan, penyaluran (transmisi) sampai dengan pendistribusian kepada pelanggan.

Besarnya peningkatan atau penurunan beban subsidi listrik dipengaruhi oleh:

- Perkembangan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP),

Some of subsidy-influencing parameters:

- Indonesian Crude Oil Price – the rate at which crude oil is sold in Indonesia.
- Exchange rate – the system of exchanging foreign currency for that of domestic one.
- Alpha (α) – a variable which consists of distribution costs and margins.
- The volume of subsidized fuel – the volume of marketed fuel that needs subsidy. It includes the volume of biofuel and three-kilogram LPGs.
- Price tag for subsidized fuel
- Types of subsidized fuel

Electricity Subsidy

To make certain that electricity is affordable for the people, the government subsidizes electricity for certain groups of customers: social group (S1 and S2), households (R1), business (B1), and industry (I1) with an installed power of up to 900 VA. Subsidy is given through state-owned electricity company in the form of basic electricity tariff (TDL) or the selling price of electricity. To better reflect fairness and equity, the aforementioned customers pay a special electricity price which, on the average, is lower than the cost of production. How much subsidy is needed is calculated from the gap between production cost and selling price (Rp/kwh) multiplied by the sales volume (kwh). Production cost is the total cost to carry out operational activities ranging from generating, transmitting, and distributing power to customers.

The rise and fall of electricity subsidy figure is influenced by:

- The exchange rate of rupiah against US dollar,
- Price of Indonesia's crude oil,
- The electricity tariff policy (TTL),

Electricity subsidy calculation parameters include: operating margin, network shrinkage/ fuel mix, sales growth, energy sales, and rates for subsidized group.

- Kebijakan tarif tenaga listrik (TTL),

Parameter perhitungan subsidi listrik: margin usaha, susut jaringan/*fuel mix*, *growth sales*, *energy sales*, golongan tarif yang disubsidi.

Subsidi Pangan

Subsidi pangan adalah subsidi yang diberikan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin) melalui program Operasi Pasar Khusus (OPK) beras. Subsidi pangan bertujuan untuk menjamin distribusi dan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Subsidi ini disalurkan melalui Perum Bulog selaku operator yang ditunjuk oleh Pemerintah. Besaran alokasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh:

- Durasi penyaluran;
- Harga pokok pembelian beras Bulog (HPB);
- Jumlah keluarga miskin yang menjadi sasaran subsidi;
- Alokasi kuantum beras per kepala keluarga; dan
- Harga jual beras Raskin. Melalui subsidi pangan ini, setiap kepala keluarga miskin yang menjadi target subsidi akan menerima beras per bulan selama beberapa bulan, dengan harga yang ditetapkan lebih murah dibandingkan harga pasar.

Rumah Tangga Sasaran (RTS) ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di sisi lain, subsidi pangan juga menjamin penyerapan beras petani oleh Perum Bulog. Dalam upaya menjaga harga dasar gabah di tingkat petani tetap stabil maka Perum Bulog diwajibkan membeli beras petani dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (HPP). Perum Bulog akan menyerap sebagian hasil panen di dalam negeri dan digunakan untuk penyaluran beras Raskin. Dengan demikian Perum Bulog mempunyai 2 (dua) peran sekaligus, di satu sisi menjaga harga dasar gabah di tingkat petani dan di sisi lain menyalurkan beras dengan harga murah kepada masyarakat miskin.

Food subsidy

Food subsidy is a government subvention in the form of provision of affordable rice for the poor (Raskin) through special rice market operations (OPK). Food subsidy aims to ensure the distribution and availability of affordable rice for the poor. The government distributes the subsidy through Perum Bulog, a food distributor appointed by the government. Food subsidy figure is affected by:

- the length of time it takes to distribute the rice;
- the price to make rice procurement;
- the number of poor families, target of the subsidy;
- total rice allocated per family; and
- the selling price of Raskin. The goal of the subsidy is to allow every target family to purchase a certain amount of rice per month for several months, at a price set lower than the market price. Selection of target family is carried out by the Central Statistics Agency (BPS).

Food subsidy also increases capability of Bulog to purchase rice from farmers. In an effort to keep the price of rice grain stable, Bulog is required to make rice purchase from farmers at a price set by the Government. Bulog buys some domestic grain harvest and distributes it as Raskin. Thus, Bulog has a double role to play: to stabilize the price of rice from farmers and to distribute affordable rice to poor families.



Subsidi Pupuk

Beban subsidi ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk bagi petani dengan harga jual pupuk yang lebih rendah dari harga pasar. Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani, dan mendukung program ketahanan pangan.

Beban subsidi pupuk dipengaruhi oleh:

- biaya pengadaan pupuk yang bersubsidi yang merupakan selisih antara Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan Harga Pokok Produksi (HPP), dan
- volume pupuk yang memperoleh subsidi. Khusus untuk urea, HET dipengaruhi oleh pasokan gas bagi produsen pupuk. Oleh karena harga gas diperhitungkan dalam dolar (US\$/MMBTU (*million metric British thermal unit*)), maka besaran subsidi pupuk urea juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selain HET, HPP, harga gas, dan kurs, subsidi pupuk juga dipengaruhi oleh biaya transportasi ke daerah terpencil dan biaya pengawasan. Besaran HET dan HPP serta volume pupuk bersubsidi ditentukan oleh Menteri Pertanian. Mulai TA. 2009, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk organik dalam rangka mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik. Perhitungan subsidi pupuk berdasarkan selisih antara harga pokok produksi (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET) dikalikan dengan volume pupuk bersubsidi. Dengan demikian apabila kita menghendaki subsidi pupuk naik atau turun dapat dilakukan dengan cara penyesuaian terhadap faktor-faktor tersebut. Misalkan, untuk menurunkan subsidi pupuk dapat dilakukan dengan cara menaikkan HET. Sementara itu, untuk menjaga stabilitas harga gas agak sulit mengingat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sangat tajam. Akibatnya beban subsidi pupuk akan meningkat seiring dengan peningkatan kurs.

Fertilizer Subsidy

As a direct consequence of government's policy to allow farmers to purchase fertilizers at a price lower than the regular price, a subsidy is needed. The subsidy aims to ensure that farmers can afford fertilizers, increase their productivity, and help protect food security program.

The amount of fertilizer subsidy is affected by these variables:

- The cost to procure fertilizers, which is the gap between cost of goods sold (COGS) and highest retail price (HRP), and
- The volume of subsidized fertilizers. The highest retail price for urea-borne fertilizers is influenced by the price of gas supply for fertilizer manufacturers. Since gas is sold in US dollar per million metric British thermal unit, the price of urea-borne fertilizers is affected by the exchange rate of rupiah against US dollar. In addition, the cost to supervise distribution of fertilizers and to transport them to remote areas contributes to the subsidy figure. The HRP and COGS of fertilizers and volume of subsidized fertilizers are decided by the Minister of Agriculture. The government has allocated subsidy for organic fertilizers since 2009 in a bid to reduce farmers' dependency on anorganic fertilizers. Fertilizer subsidy figure comes from the gap between COGS and HRP multiplied by the volume of subsidized fertilizers. A change to one of variables in fertilizer subsidy will increase or reduce the subsidy. A raise in HRP, for example, will decrease the subsidy. To keep the price of gas stable, on the other hand, is more difficult as the price is affected by the fluctuating foreign exchange rate. Weaker rupiah against dollar will add more burden to fertilizer subsidy.

Subsidi Benih

Subsidi benih adalah subsidi untuk pengadaan benih unggul padi, kedelai, jagung, dan ikan. Tujuan utama pemberian subsidi benih adalah agar petani bisa mendapatkan benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dengan ketersediaan benih berkualitas maka produksi pertanian diharapkan dapat meningkat. Subsidi ini disalurkan melalui perusahaan negara penyedia benih, yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), dan Penangkar Swasta dalam koordinasi PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. Untuk TA. 2009, subsidi benih ikan dialihkan ke anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan. Parameter yang digunakan dalam subsidi benih:

- Harga Eceran Tertinggi (HET) benih bersubsidi;
- Harga Pokok Produksi (HPP) benih bersubsidi; dan
- volume benih bersubsidi.

Subsidi/Bantuan PSO (Public Service Obligation)

Sementara itu, dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik. Pemerintah dapat menggunakan BUMN dalam rangka menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisible, pemerintah diwajibkan untuk memberikan kompensasi finansial kepada BUMN-BUMN yang diberikan tugas untuk menjalankan pelayanan umum (*public service obligation/PSO*), seperti PT Kereta Api (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan kereta api kelas ekonomi, PT Pos Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa pos pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan laut kelas ekonomi.

Seed Subsidy

This is a subsidy allocated for provision of improved seed of rice, soybean, corn, and fish. The main goal is to facilitate farmers so that they have access to quality seeds at affordable prices. The use of quality seeds, as it is expected, will increase the agricultural productivity. The government distributes the subsidy through its own enterprises that provide seeds, PT Sang Hyang Seri and PT Pertani, private breeders under supervision of PT Sang Hyang Seri and PT Pertani, and the Central Technical Implementation Unit (UPT) of the Ministry of Maritime and fisheries Affairs. The subsidy has been included in the budget of the Ministry of Maritime and fisheries Affairs since 2009. Parameters affecting seed subsidy include:

- the highest retail price (HRP) of subsidized seeds;
- the cost of goods sold (COGS) of subsidized seeds; and
- the volume of subsidized seeds.

Subsidi/Assistance for PSO (Public Service Obligation)

To continue administering public services, the government may compel state-owned enterprises (SOE) to provide goods and services to the public. The law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises stipulates that the government may assign SOEs public service functions with regard to the purpose of the activities of SOEs. If a study shows that such public service obligation (PSO) is financially unfeasible, the government is required to compensate the said SOE financially. Among SOEs with public service obligation are Indonesia Railways Company (obliged to provide economy-class service), Indonesia Postal Company (required to maintain branches in remote areas), and Indonesia Shipping Company (assigned the task of providing economy-class sea transportation).

Bunga Kredit Program

Sementara itu, dalam rangka membantu masyarakat pada sektor perkreditan perbankan, pemerintah selama periode 2005-2009 juga menyalurkan subsidi yang disediakan untuk meringankan beban bunga pada beberapa program antara lain menutup selisih antara bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan lebih rendah oleh pemerintah untuk berbagai skim kredit program seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), termasuk beban risiko (*risk sharing*) bagi kredit yang tidak dapat ditagih kembali (default). Kenaikan realisasi anggaran yang sangat signifikan tersebut disebabkan adanya peningkatan yang sangat tajam dalam realisasi subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS) dalam rangka program pemerintah untuk membangun rumah susun/apartemen bersubsidi baik rusunawa ataupun rusunami. Selain itu, dalam perkembangannya pada tahun 2007 sampai dengan 2009 pemerintah memberikan penambahan realisasi dan jenis subsidi bunga kredit program antara lain (i) subsidi bunga kredit program untuk usaha bahan bakar nabati (biofuel) sebagai salah satu upaya untuk mendukung program diversifikasi energi; (ii) subsidi bunga bagi pengusaha NAD; (iii) imbal jasa atas kredit usaha rakyat (KUR); (iv) kredit program pada sektor peternakan dan resi gudang; serta (v) subsidi bunga dalam rangka penyediaan air bersih. Khusus untuk subsidi bunga dalam rangka penyediaan air bersih merupakan kebijakan dalam program stimulus fiskal tahun 2009.

Faktor yang memengaruhi perkembangan subsidi bunga kredit program adalah sebagai berikut:

- Jenis subsidi bunga kredit program.
- Besarnya bunga yang disubsidi oleh pemerintah.
- Tingkat bunga pasar yang berlaku.

Loan-Interest Subsidy Program

To ease financial burden of the the people regarding bank loans, the government provided loan subsidy through various schemes from 2005 to 2009. The subsidy closes the gap between regular interest rate and the lower rate that the government offers. The subsidy applies under certain schemes such as Food and Energy Security Loan (KKP-E), mortgage on simple house (KPRS) and on very simple house (KPRSS), and risk sharing for non-performing loans. There has been a substantial increase in expenditure on loan subsidy resulting from a sharp rise in mortgages on simple and very simple houses. This is a result of the government's goal to provide more subsidized apartments. In addition, the government diversified its loan subsidy during 2007 to 2009 by providing (i) interest rate subsidy for biofuel business to support energy diversification program; (ii) loan interest subsidy for entrepreneurs in NAD; (iii) compensation for micro business loan (KUR); (iv) loan program for livestock business and warehouse receipt; and (v) loan-interest subsidy to facilitate provision of clean water, which was a fiscal stimulus program in 2009.

Variables affecting the subsidy include:

- Types of loan-interest subsidy program.
- The rate of interest subsidized by the government.
- Regular interest rate that prevails.



Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

Guna mendukung stabilisasi perekonomian yang sehat, pemerintah memberikan insentif berupa pemberian subsidi pajak yang disebut pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat melalui subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menekan laju inflasi dan menurunkan harga kebutuhan dalam bentuk insentif kepada pengusaha melalui subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mendorong laju perdagangan ekspor impor melalui fasilitas bea masuk (BM). Peningkatan realisasi subsidi pajak tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memantapkan stabilitas perekonomian nasional dengan menambah jumlah pajak yang ditanggung pemerintah baik menambah jenisnya maupun besarannya.

B. Laporan BA 999.07

1. Definisi Belanja Lain-lain (BA 999.08)

Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2. BA 999.08 dalam Postur APBN

- Cadangan Anggaran Gaji dan Tunjangan, Honorarium, Vakasi, dan lain-lain;
- Cadangan Bencana Alam;
- Cadangan Resiko;
- Operasional Lembaga yang Belum Mempunyai BA;
- Ongkos Angkut Beras PNS di Distrik Pedalaman Papua;
- Cadangan Beras Pemerintah;
- Cadangan Benih Nasional;
- Cadangan Keperluan Mendesak;
- Cadangan Selisih Kurs;
- Bantuan Operasional Layanan Pos Universal;
- Cadangan BMP Kemenhan;
- Dana untuk Operasional OJK;
- Dana Operasional Kegiatan SKK Migas;
- Cadangan untuk Perubahan Nomenklatur K/L.

Government-Borne Tax (DTP)

To stabilize and facilitate a healthy economy, the government provides a tax-incentive plan in which a portion of tax is borne by the government. For example, to augment purchasing power, the government has introduced government-borne income tax (PPh) of Article 21. To curb inflation and to reduce prices of daily needs, the government provides entrepreneurs with government-borne value added tax (VAT). Furthermore, to boost import-export trading activities, there is government-borne import duties (BM). The increase in budget spending on government-borne taxes reflects the government's determination to stabilize national.

B. BA 999.07 Reports

1. Definition of Other Expenditures (BA 999.08)

Other expenditures are expenses on unexpected, irregular activities that are not expected to be recurring such as natural and social disaster, and other unexpected indispensable expenses under the responsibility of central or regional government.

2. BA 999.08 within the State Budget

- Reserved budget for Salaries and allowances, honoraria, fees, and others;
- Reserved budget in case of Natural Disasters;
- Reserved budget for Possible Risks;
- Reserved budget to support operational costs for organizations without BA;
- Budget to transport rice for serving civil servants in inland Papua;
- Budget to secure Government Rice Reserve;
- Budget to secure National Seed Reserve;
- Reserved budget for emergency;
- Reserved budget for fluctuating Foreign Exchange;
- Operational Support for Universal Postal Service;
- BMP Kemenhan reserve;
- Reserved budget for FSA operational cost;
- Reserved budget for SKK Migas operational cost;
- Reserved budget for amendment to ministry/agency nomenclature.

3. Perkembangan Laporan Realisasi Anggaran BA 999.08 (Netto – dalam tabel)

3. Progress with Budget Expenditure on BA 999.08 (Net – within table)

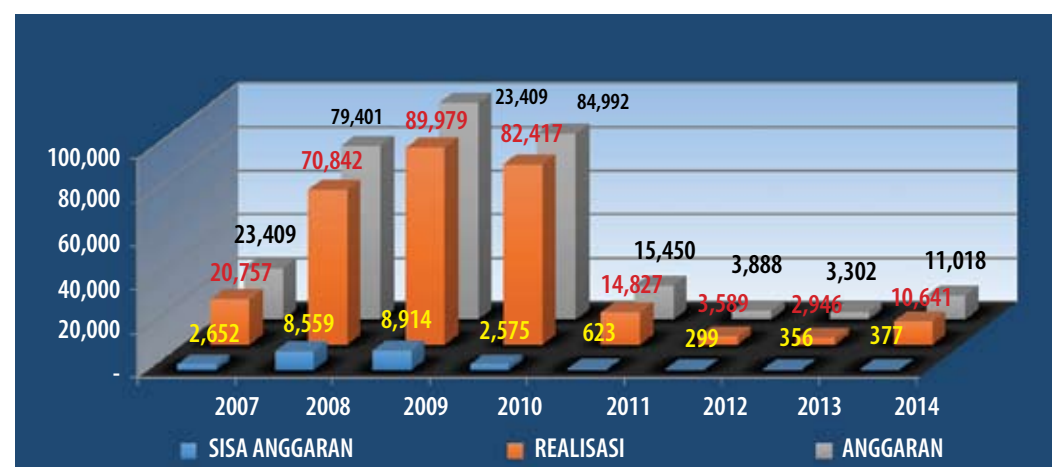
Perkembangan Laporan Realisasi Anggaran BA 999.08
Progress with Budget Expenditure on BA 999.08
(dalam rupiah)

TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
2007	23.409.348.585.146	20.756.907.712.830	88.67	2.652.440.872.316
2008	79.400.784.623.00	70.842.005.534.705	89.22	8.558.779.088.295
2009	98.893.092.185.900	89.978.799.065.233	90.99	8.914.293.20.667
2010	84.991.892.382.000	82.416.711.259.087	96.97	2.575.118.122.913
2011	15.450.256.936.000	14.826.776.618.752	95.96	623.480.317.248
2012	3.887.618.830.000	3.589.042.15.978	92.32	298.576.678.022
013	3.301.697.961.000	2.945.690.312.812	89.22	356.007.648.188
2014	11.018.465.534.000	10.641.371.791.107	96.58	377.093.742.893

4. Perkembangan Laporan Realisasi Anggaran BA 999.08 (dalam grafik)

4. Progress with Budget Expenditure on BA 999.08 (in graphic)

Perkembangan Laporan Realisasi Anggaran BA 999.08
Progress with Budget Expenditure on BA 999.08
(dalam jutaan rupiah)



5. Kebijakan yang berhubungan dengan Pengelolaan BA 999.08

Dalam penggunaan anggaran yang berasal dari BA 999.08, terdapat kebijakan yang berbeda yang diberlakukan ketika sifat/*nature of account* dari suatu aktifitas memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Aktifitas sesuai tusi/sesuai penugasan
Anggaran yang telah tersedia dari BA 999.08 selanjutnya direalokasi/digeser ke BA K/L, dan K/L yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan kegiatannya.
- Aktifitas bersifat mendesak/darurat/tidak biasa
Anggaran yang telah tersedia dari BA 999.08 tetap dipertanggungjawabkan pada Kementerian Keuangan dan tidak dilakukan pergeseran.
- Aktifitas bersifat spesifik, tidak sesuai BA K/L atau BA 999.08
Anggaran yang telah tersedia dari BA 999.08 selanjutnya direalokasi/digeser ke sub bagian anggaran lainnya dari BA BUN. Pergeseran tersebut berupa antar sub bagian anggaran dalam BA BUN.

6. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya

Pos-pos pengeluaran yang terdapat dalam BA 999.08

- Pos pengeluaran terprogram
Dapat diperkirakan indikasi kebutuhannya dan berkesinambungan kegiatannya.
- Cadangan
Tidak dapat diperkirakan kebutuhannya dan bersifat penyediaan/suplemen anggaran.

Klasifikasi KPA pada BA 999.08

- KPA pelaksana kegiatan
Secara formal dan material, K/L dan KPA bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilaksanakan.
- KPA penyalur dana
KPA hanya bertanggung jawab secara formal saja atas dana yang disalurkan.



5. Policies related to management of BA 999.08

There has been a variety of policies concerning expenditures on BA 999.08 because of different activities with different nature of account:

- Activity in accordance with the assignment
The budget available within BA 999.08 is reallocated/reassigned to BA of ministry/agency responsible for the activity.
- Emergency activity
The already available budget in BA 999.08 remains accountable to the Ministry of Finance.
- Specific activity which is not specified in BA of ministry/agency nor in BA 999.08
The already available budget in BA 999.08 is reallocated/reassigned to othersub-sections within BA BUN.

6. Additional information and other disclosures Expenditures in the BA 999.08

- Planned expenditures
The recurring expenditures are predictable.
- Reserves
These supplemental expenditures are unpredictable.

KPA classification in the BA 999.08

- KPA that carries out an activity
Ministry/agency and KPA are responsible for the success of activity.
- KPA that hands over the fund
Responsibility of the KPA is limited to successful transfer of the fund.

MITIGASI RISIKO DAN PERKEMBANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

RISK MITIGATION AND PROGRESS WITH LEGAL AID ACTIVITIES

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) berkomitmen untuk menjadi insitusi pemerintah yang bersih dalam melayani para pemangku kepentingan. Komitmen tersebut terlihat dari hasil *Pre-Assessment* Pola Budaya Anti Korupsi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2014 yang menunjukkan bahwa DJA termasuk dalam Klasifikasi "Budaya Sangat Anti Korupsi". Pada Tahun 2014, DJA telah menetapkan dan melaksanakan Rencana Aksi Jangka Pendek Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan DJA yaitu:

1. Menyelenggarakan diskusi tentang Peraturan Penganggaran dengan BPK;
2. Menyelenggarakan kegiatan *workshop* tentang Aspek Pidana Kerugian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pembicara dari akademisi Universitas Indonesia;
3. Menyelenggarakan internalisasi perilaku anti korupsi dengan mengundang narasumber Tim dari PT. KAI yang dipimpin oleh Direktur Utama PT. KAI yaitu Bapak Ignasius Jonan;
4. Menyempurnakan *content* sosialisasi *whistleblower system* pada *website* DJA.

Sebagai unit kerja yang secara terus menerus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, DJA telah mengelola manajemen risiko dengan mengembangkan berbagai perangkat manajemen risiko dan perbaikan penerapannya secara bertahap dan konsisten pada setiap periode *assessment*-nya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pada Tahun 2014 DJA telah

It has been the commitment of the DGB to be a clean government institution serving the interests of stakeholders. Results of pre-assessment – carried out by Inspectorate General of the Ministry of Finance in 2014 – of anti-corruption culture proves that the DGB is "Completely Anti corruption". In fact, the DGB set and implemented a Short Term Action Plan to Communicate and Nurture Anti-Corruption Culture in 2014 as part of its goal to prevent and eradicate corruption. The action plan includes:

1. A discussion on Budgeting Regulations with Supreme Audit Agency;
2. A workshop on Criminal Offenses, State Loss, and Money Laundering with speakers from University of Indonesia;
3. A workshop to internalize values of anti-corruption with invited speakers a team of PT. KAI led by President Director of PT. KAI, Ignasius Jonan;
4. An improvement to an article on whistleblower system published on the website of the DGB.

As part of its effort to continuously improve its practice of good governance, the DGB has developed a number of risk management tools. It gradually and consistently refines the application of such tools following a period of assessment.

The DGB has also initiated the development of a Microsoft Excel-based risk management application system, which aims to augment efficiency and effectiveness. Within the Ministry of Finance, the

menginisiasi pembangunan sistem aplikasi manajemen risiko berbasis *Microsoft Excel*. Di lingkungan Kementerian Keuangan, pengelolaan Manajemen Risiko DJA telah mencapai *Risk Maturity* pada level *Risk Defined* dengan skor 71,92 pada periode *Eighth Assessment* di Tahun 2014. Sebagai terobosan, untuk mengukur secara riil tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dan memberikan pemahaman yang sama di seluruh UPR di lingkungan DJA, pada Semester II 2014 telah dilakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) Non Sampel secara mandiri dengan melakukan revidi dokumen dan tes pemahaman tertulis bagi seluruh pengelola manajemen risiko di UPR yang tidak dijadikan sampel penilaian. Pada masa mendatang dengan kerjasama semua jajaran dan seluruh struktur Komite Manajemen Risiko DJA, DJA diharapkan dapat meraih predikat *Risk Managed* dan bahkan *Risk Enabled*.

Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai DJA berupaya terus menerus untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Guna memastikan pengendalian dijalankan sesuai dengan sistem, prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku, maka pada Tahun 2014 Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum DJA telah melakukan pemantauan terhadap 8 (delapan) kegiatan yaitu Penerbitan Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga-DHP RKA-K/L (Awal), Penerbitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-SP DIPA (Awal), Penyusunan Konsep Pembakuan Prestasi dan Beban Kerja, Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*), Penyusunan RKMK/Usulan Revisi KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBK yang Berasal dari PNBK Kementerian/Lembaga, Penetapan Jatuh Tempo Pembayaran Laba BUMN Bagian Pemerintah, Penyelesaian Ijin Prinsip terhadap Kebijakan/Norma/Pedoman/Peraturan Penganggaran di Bidang Remunerasi, Pembuatan Perkiraan APBN dalam Bentuk *I-Account* dalam Rangka Penyusunan Nota Keuangan dan

DGB's risk management has reached "Risk Maturity" at the level of "Risk Defined" with a score of 71.92 in the Eighth Assessment. To accurately measure the maturity of risk management implementation and to make sure that all UPRs within the DGB have a common perception about risk management, the DGB conducted a non-sample, independent assessment of Risk Management Maturity Levels (TKPMR), by reviewing documents and administering a written test for all risk management personnel at UPR who had not participated as samples in 2014. As coordination among all ranks in the whole structure of risk management committee improves, it is expected that the DGB will be eligible for an upgraded status of "Risk Managed", even "Risk Enabled".

All personnel of the DGB strive to keep their working environment well-controlled. To ensure that the control is well in accordance with the system, procedures and the existing law, the Compliance and Legal Assistance unit of the DGB has monitored eight processes: the publication of a list of the results of a review on Work Plan and Budget of Ministry/Agency, the issuance of a letter approving Budget Allocation List, standardization of concept of achievement and workload, approval on multiyear contracts, formulation of the draft of and revision to decree of the Minister of Finance on Consent to Use Some of Non-Tax Revenue collected by Ministry/Agency, deadline for state-owned enterprises to transfer the government's share of profit, action to secure authorization to bring into effect policies/norms/guidelines/regulations in budgeting remuneration, and formulation of estimated state budget and its presentation in the form of I-Account, which will help formulation of financial note, draft of state budget, and state budget bill. Recent assessment shows that the average compliance is 90.4%.

RAPBN, serta RUU tentang APBN. Pemantauan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan sebesar 90,4%.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimungkinkan terjadinya permasalahan hukum yang terkait dengan pegawai DJA. Pada Tahun 2014, Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum DJA telah melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas, sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan hukum dalam rangka pemberian keterangan pada institusi Penegak Hukum sebanyak 10 perkara, yang terdiri dari pemberian bantuan hukum dalam rangka pemberian keterangan pada KPK sebanyak 3 perkara, pemberian keterangan pada Kejaksaan berjumlah 3 perkara, pemberian keterangan pada BPK 1 perkara dan pemberian keterangan pada Kepolisian sebanyak 3 perkara;
2. Pelaksanaan sidang sebanyak 6 perkara, yang terdiri dari pelaksanaan sidang pada Pengadilan Negeri Tipikor berjumlah 3 dan sidang pada Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 3 perkara;
3. Pemberian pendapat hukum sebanyak 6 tema, diantaranya tentang pemberian premi kepada pelapor tindak pidana korupsi, tindak lanjut putusan MK terkait alokasi dana BPLS, Revisi PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L, standar biaya tim penanganan permohonan arbitrase, kedudukan hukum surat edaran pelaksanaan simponi;
4. Penyusunan Kajian Hukum yang terdiri dari kajian hukum tentang Penafsiran Undang-Undang yang disusun pada Semester I Tahun 2014 dan kajian hukum tentang Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan yang disusun pada Semester II Tahun 2014.

It is not impossible that in the course of its action, the DGB runs into legal issues. The Compliance and Legal Assistance unit of the DGB has provided legal assistance for personnel of the DGB, as follows:

1. Providing legal assistance for the DGB's personnel giving testimony (10 cases): personnel testifying before investigators of Corruption Eradication Commission (3 cases), Attorney (3 cases), Supreme Audit Agency (1 case), the National Police (3 cases);
2. Acting as the DGB's counsel in six different trials: at Corruption Court (3 trials) and Constitutional Court (3 trials);
3. Giving legal opinion on six different issues: idea of granting premium to a person who warns the authority about corruption that is happening, follow-up to decision of the Constitutional Court on allocation of BPLS fund, Revision to the decree of the Minister of Finance on the new directive on how to formulate and review work and budget plan of ministry/agency, standard fee to go to arbitration, legal status of the circular letter on implementation of simponi;
4. Preparing Legal Studies which consist of the interpretation of Law drafted in the first half of 2014 and Legal Aspects of Government Policy According to the Law of Public Administration, drafted in the second half of 2014.



LAYANAN PERPUSTAKAAN LIBRARY SERVICE

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan informasi mempunyai peran penting dalam sarana edukasi masyarakat. Peran tersebut dilakukan guna mengembangkan pola pikir masyarakat yang konstruktif dan kreatif. Perpustakaan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai salah satu pusat studi ilmu pengetahuan di Kementerian Keuangan mempunyai peran penting dalam mengembangkan pengetahuan dan pola pikir pegawai menjadi lebih baik.

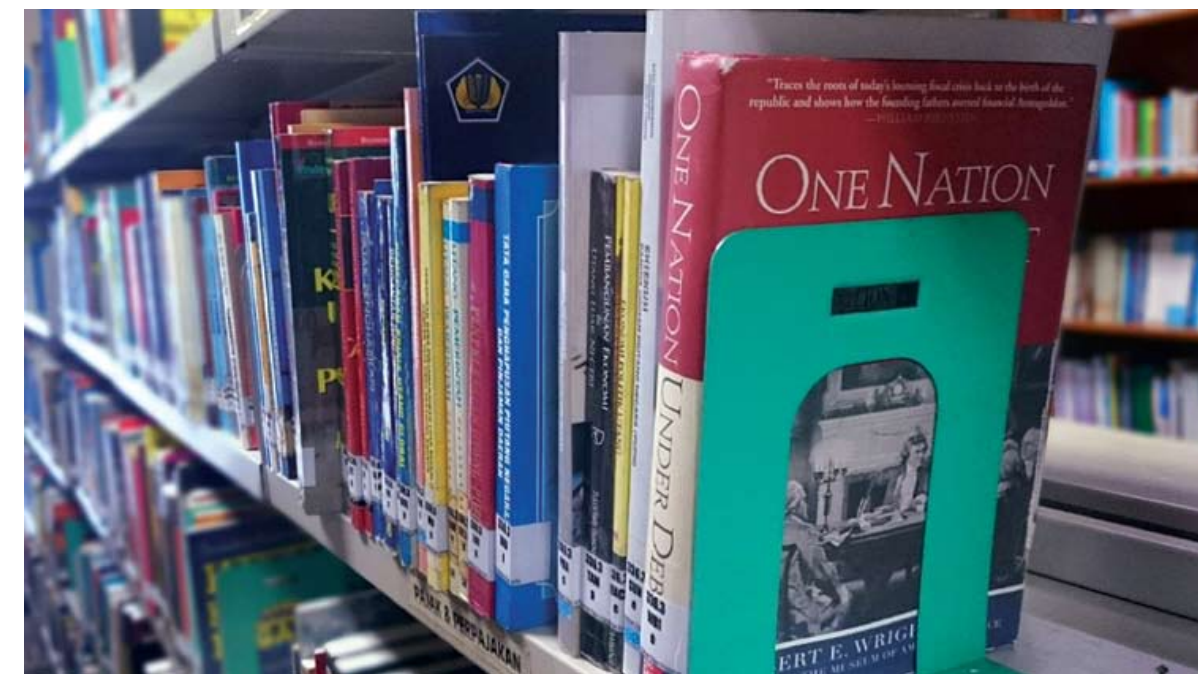
Sejarah Singkat

Perpustakaan Direktorat Jenderal Anggaran semula merupakan perpustakaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Daerah (DJPKPD). Pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Libraries, as part of information management system, play a pivotal role in public education. Libraries facilitate development towards constructive and creative mindset. The Directorate General of Budget, one of centers of studies at the Ministry of Finance, encourages personnel development towards better mindset.

A Brief History

The library of the DGB was previously known as library of the Directorate General of Fiscal Balance and Regional Income (DJPKPD). After the issuance of decree of the Minister of Finance Nomor 426/KMK.01/2004 on the Amendment to the Decree of the Minister of Finance No. 302/KMK.01/2004 on Organization and Administration of the Ministry of Finance, the Directorate General of Fiscal Balance and Regional Income transformed into the Directorate General of Budget and Financial



mengalami reorganisasi menjadi Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK). Perpustakaan yang semula bertempat di Lantai 19 pun berpindah ke Lantai M. Ketika Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan berpisah menjadi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), maka pengelolaan Perpustakaan berada dibawah Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran. Pada saat ini, Perpustakaan berada dibawah Bagian Umum yaitu Subbagian Tata Usaha dan Perpustakaan.

Koleksi Perpustakaan

Perpustakaan Direktorat Jenderal Anggaran saat ini memiliki berbagai macam koleksi, seperti kumpulan peraturan perundang-undangan, kamus, ensiklopedia, buku referensi, akademis, ilmiah, medis, profesional, fiksi, dan berbagai macam buku lainnya yang mencapai kurang lebih 9140 judul. Selain itu, perpustakaan juga mengoleksi berbagai macam artikel, majalah,

Balance (DJAPK) in 2004. Its library was moved from the 19th floor to M floor. When the Directorate General of Budget and Fiscal Balance split into the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Directorate General of Budget, the Library is under the management of the Secretariat of the DGB. Today the library is run by the Subdivision of Administration and Library.

Library Collection

Currently, the collection of the library includes a variety of topics, such as legislation, dictionaries, encyclopedias, reference books, academic publications, scientific researches, medical books, books for professional, fiction, and various other books, which reaches approximately 9140 titles. In addition, the library also collects a wide range of articles, magazines, and papers. With a total book collection reaching approximately 10,000 copies, the Library of the DGB becomes a provider of information on science, technology, and culture.



dan karya tulis. Dengan total buku koleksi yang mencapai sekitar kurang lebih 10.000 eksemplar, Perpustakaan Direktorat Jenderal Anggaran mampu menjadi salah satu sumber jasa informasi yang menyajikan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya budaya.



Anggota Perpustakaan

Anggota Perpustakaan saat ini tidak hanya berasal dari lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Anggaran saja, namun dari berbagai macam golongan. Dengan jumlah pengunjung rata-rata sebanyak 200 orang per bulannya, perpustakaan sering dikunjungi oleh pegawai, baik dari lingkungan Kementerian Keuangan maupun masyarakat dari luar, seperti mahasiswa dan pelajar. Informasi yang disediakan oleh Perpustakaan Direktorat Jenderal Anggaran diharapkan mampu meningkatkan budaya membaca masyarakat.

Kegiatan-kegiatan Perpustakaan

1. Sirkulasi, yaitu layanan peminjaman dan pengembalian buku.
2. Referensi, yaitu layanan koleksi referensi/ rujukan seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
3. Audio visual, yaitu layanan akses koleksi multimedia seperti audio, film, dan sebagainya.

Library Members

With the average number of visitors reaching 200 people per month, the library is frequented not only by personnel of the DGB but also researchers and students. It is expected the Library benefits its users and encourages reading habit among the community.

Library Activities

1. Circulation – the system to borrow and return books
2. References – dictionaries, encyclopedias, and others
3. Audio Visual – a collection of multimedia such as audio, movies, and others.



KINERJA DITJEN ANGGARAN

PERFORMANCE OF DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET



KEBIJAKAN SISTEM PENGANGGARAN

POLICIES ON BUDGETING SYSTEM

Wilayah Bebas Korupsi

Mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi merupakan dambaan kita semua, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan efek jera (*deterrence effect*) tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang. Sinergi kedua upaya tersebut, akan menghasilkan *deterrence effect* dan dampak yang besar/jangka panjang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) sangat berkepentingan dan berusaha keras dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi tersebut salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri

Corruption-free Zone

As a clean, corruption-free government is what the people hope for, efforts have been made to combat corruption. Prosecuting offenders will produce a deterrent effect which, unfortunately, leaves a little impact and it is short-term in nature. Therefore, what is needed is a combination of a legal action and preventive action which will leave a greater, long-term impact.

Corruption cases have become the concern of the Ministry of Administrative Reform that to curb corruption the ministry has issued regulation Number 60 Year 2012 on Guidelines to Develop Corruption-free Zone and Clean Administration that Serve the People. The regulation, distributed

PANRB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda. Sesuai Lampiran Permen PANRB tersebut ada 2 Indikator dalam Penilaian Wilayah Bebas Korupsi masing masing indikator tersebut terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

a. Indikator Hasil

Indikator Hasil adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas pencegahan korupsi melalui pelaksanaan 20 kegiatan.

b. Indikator Proses

Indikator Proses adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan 20 kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi.

Pada Tahun 2014, Direktorat Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran telah ditetapkan sebagai salah satu unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Tim Penilaian, Sesuai Permen PANRB di atas penilaiannya dibagi menjadi 2 Indikator sebagai berikut:

a. Indikator Hasil

Dari hasil penelitian dokumen, penelaahan peraturan, konfirmasi, serta wawancara dengan pegawai/pejabat terkait pemenuhan Indikator Hasil sebagaimana dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 menunjukkan bahwa pemenuhan nilai Indikator Hasil WBK/WBBM pada Direktorat Anggaran III DJA. Indikator hasil terdiri dari Subkomponen sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Integritas

Saat ini belum dilakukan penilaian, penerapan berdasarkan instrumen dan menunggu persetujuan dari KPK.

2. Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Biro Organta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terkait kinerja unit pelayanan publik pada DA-III DJA diperoleh nilai sebesar 940 dengan skala 0-1000. Standar nilai untuk WBK terkait indikator ini adalah ≥ 550 , dan untuk WBBM adalah ≥ 750 .

among ministries/agencies and Local government, includes two indicators of a corruption-free zone:

a. Indicator of Result

The indicator shows the effectiveness of corruption prevention measures in 20 activities.

b. Indicator of Process

The indicator shows the level of implementation of 20 activities in preventing corruption.

In 2014 the Directorate of Budget III of the DGB was named a corruption-free zone by assessment team. There are two criteria of assessment:

a. Indicator of Result

After researching documents, reviewing regulations, and making confirmation and interviews, the assessment team concluded that the Directorate of Budget III has met requirements of subcomponents of this indicator:

1. Integrity Index

Currently no assessment is conducted concerning this subcomponent and application awaits approval from the Corruption Eradication Commission.

2. Performance of Public Service Unit

An assessment carried out by the Organta Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Finance has given 940 points – on the scale of 0-1000 – to the performance of public service units within the Directorate of Budget III. The standard grade for WBK is ≥ 550 and WBBM ≥ 750 .



3. Presentase kerugian negara yang belum Diselesaikan
Berdasarkan hasil penelitian dokumen Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2013 (*audited*) dan 2014 (*unaudited*) serta Surat Pernyataan Direktur Anggaran III nomor KET-3/AG.5/2014 yang menyatakan bahwa tidak ada pejabat/pegawai pada DA-III DJA yang terkena tuntutan ganti rugi selama periode Januari 2013 s.d. April 2014. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian Negara yang belum diselesaikan, sehingga persentase kerugian negara yang belum diselesaikan adalah 0%, atau sesuai dengan standar WBK/WBBM terkait indikator ini.
4. Presentase Temuan In-efektif
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-09/IJ.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 terkait audit atas pengelolaan kegiatan dan anggaran (Belanja Barang) TA 2013 dan TA 2014 (s.d. Maret 2014/Triwulan I) pada DA-III DJA (dengan total pagu belanja barang sebesar Rp5.665.320.000), menunjukkan bahwa tidak terdapat temuan hasil audit yang bersifat in-efektif; sehingga nilai persentase temuan in-efektif adalah 0%. Standar nilai untuk WBK terkait indikator ini adalah 3%, dan untuk WBBM adalah 2%.
5. Presentase Temuan In-efisien
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-09/IJ.6/2014 tanggal 27 Juni 2014 terkait audit atas pengelolaan kegiatan dan anggaran (Belanja Barang) TA 2013 dan TA 2014 (s.d. Maret 2014/Triwulan I) pada DA-III DJA (dengan total pagu belanja barang sebesar Rp5.665.320.000), menunjukkan bahwa nilai temuan yang bersifat in-efisiensi adalah sebesar Rp24.387.500 atau 0,43% dari anggaran TA 2013 dan TA 2014 (s.d. Triwulan I). Standar nilai untuk WBK terkait indikator ini adalah 5%, dan untuk WBBM adalah 3%.
6. Presentase Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Berdasarkan hasil konfirmasi dari Inspektorat Bidang Investigasi Itjen Kemenkeu melalui

3. Percentages of Unresolved State Losses
Result of a research into Financial Reports of the Directorate General of Budget 2013 (audited) and 2014 (unaudited) concurs with the statement letter of the Director of Budget III number KET-3/AG.5/2014 which states that none of the officials/employees of the Directorate of Budget III is involved in claims for compensation from January 2013 to April 2014. It means that there is zero per cent of unresolved state loss. In other word, the figure fits to the WBK/WBBM standard.
4. Percentage of ineffective conduct
An audit report on activities and budget management (expenditure on goods) in 2013 and 2014 (up to March 2014/the first quarter) numbered LHA-09/IJ.6/2014 dated June 27, 2014 shows that the Directorate of Budget III has conducted zero ineffectiveness (ceiling for expenditure on goods is Rp 5,665,320,000). The standard WBK grade for this indicator is 3%, and WBBM 2%.
5. Percentage of In-efficient Conduct
The Audit Report on the audit of management and budget activities (goods expenditures) FY 2013 and FY 2014 (up to March 2014 / Quarter I) in the DA-III DGB (with total ceiling of goods expenditure amounting to Rp 5,665,320,000) numbered LHA-09 / IJ.6 / 2014 dated June 27, 2014 indicates that the in-efficient conducts reached Rp. 24,387,500 or 0.43% of the budget of FY 2013 and FY 2014 (until Quarter I). The standard WBK grade for this indicator is 5%, and WBBM 3%.
6. Percentage of Employees who received Disciplinary Sanctions
Based on the results of the confirmation of the Investigation Section of the Inspectorate

surat nomor SR-27/IJ.9/2014 tanggal 7 Maret 2014 dan pernyataan Direktur Anggaran III DJA nomor KET-5/AG.5/2014, serta hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum DJA, menunjukkan bahwa untuk periode Januari 2013 s.d. April 2014 tidak ditemukan adanya pegawai/pejabat pada DA-III DJA yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan, sehingga nilai persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan adalah 0%. Standar nilai untuk WBK terkait indikator ini adalah 1%, dan untuk WBBM adalah 0%.

7. Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengaduan dan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum DJA, menunjukkan bahwa untuk periode Januari 2013 s.d. April 2014 tidak ditemukan adanya pengaduan masyarakat pada DA-III DJA yang belum diselesaikan, sehingga nilai persentase pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan adalah 0%. Standar nilai untuk WBK terkait indikator ini adalah 5%, dan untuk WBBM adalah 0%.



General of Ministry of Finance through a letter number SR-27 / IJ.9 / 2014 dated March 7, 2014 and the statement of the Director of the Budget III DGB number KET-5 / AG.5 / 2014, along with the interview with the GGB Head of Compliance and Legal Assistance, no employees/officials in DA-III DGB were found to have received disciplinary sanctions by the abused financial management between January 2013 and April 2014, which marked zero percentage. Meanwhile, the standard value of WBK for this indicator is 1%, and that of WBBM is 0%.

7. Percentage of unresolved Public Complaints
The Report of the filed Complaints and the interview with the DGB Head of Compliance and Legal Assistance DJA indicates that no public complaints were unresolved within January 2013 until April 2014 leading to zero percentage on this matter. Meanwhile, the standard value of WBK for this indicator is 5%, and that of WBBM is 0%.

8. Persentase Pegawai yang dijatuhi Hukuman karena KKN

Berdasarkan hasil konfirmasi dari Inspektorat Bidang Investigasi Itjen Kemenkeu melalui surat nomor SR-27/IJ.9/2014 tanggal 7 Maret 2014, serta hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum DJA, menunjukkan bahwa untuk periode Januari 2013 s.d. April 2014 tidak terdapat pegawai/pejabat pada DA-III DJA yang dijatuhi hukuman karena Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berdasarkan putusan yang tetap (*incracht*), sehingga nilai persentase pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi adalah 0% atau sesuai dengan standar WBK/WBBM terkait indikator ini.

b. Indikator Proses

Indikator Proses adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan 20 kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi. Dari hasil penelitian dokumen, penelaahan peraturan, konfirmasi, serta wawancara dengan pegawai/pejabat terkait pemenuhan Indikator Proses sebagaimana dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012, menunjukkan bahwa pemenuhan nilai Indikator Proses WBK/WBBM pada DA-III DJA adalah sebesar 94.



8. Percentage of Employees receiving Collusion, Corruption and Nepotism (KKN)-triggered sanctions

The results of the confirmation of the Investigation Section, the Inspectorate General of the Ministry of Finance through a letter number SR-27 / IJ.9 / 2014 dated March 7, 2014, as well as the interview with the DGB Head of Compliance and Legal Assistance, show that during January 2013 sd April 2014 no employees / officials in the DA-III DGB were convicted of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) by the fixed ruling (*incracht*). Therefore, the percentage of employees over the matter was 0% or complying with the WBK / WBBM standard for this indicator.

b. Indicator of Process

The indicator of process refers to an indicator for measuring 20 implemented activities to prevent corruption. As indicated by the document research, review of regulations, confirmation, as well as interviews with employees/officials on compliance with the process indicator stated in Permenpan RB No.60 of 2012, the process indicator of WBK/WBBM on DA-III DGB was valued at 94.

PENGUNAAN KONSEP LOGIC MODEL DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

IMPLEMENTATION OF A LOGIC MODEL/ADIK IN BUDGET PLANNING PROCESS

Sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, mulai tahun 2007 Pemerintah menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk melihat keterkaitan antara *input* dengan *output*-nya. Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memenuhi amanat PP 90 tahun 2010, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang mengatur sistem evaluasi program seluruh K/L.



Selanjutnya, pada tahun 2012 dilakukan evaluasi program dengan pendekatan *self-evaluation* atas program yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap informasi referensi *Outcome-Output* pada masing-masing program K/L.

Hasil analisis terhadap informasi referensi *Output* dan *Outcome* secara keseluruhan mengindikasikan bahwa ternyata capaian kinerja bagus belum sepenuhnya mencerminkan bagusnya kualitas belanja K/L. Berdasarkan temuan pada analisis *Output* tersebut kemudian dikembangkan kajian dan analisis untuk melihat isi program secara keseluruhan dan ditemukan hasil sebagai berikut (1). Tidak jelas yang mana merupakan *input*, *output*, dan *outcome*, (2). *Outcome* kurang jelas dan terlalu normatif, (3). Sulit melihat relevansi antara *input-output-outcome*, dan (5). Relevansi *outcome* terhadap *need or problem* tidak terlihat karena informasi tersebut di dalam RKA-K/L tidak ada.

Starting in 2007, to respond to the increased state expenditures, the Government has implemented Performance-Based Budgeting (PBB) to explore the correlation between its input and the output. To implement the performance-based budgeting and to meet the mandate of PP90/ 2010, the Minister of Finance has issued the Minister of Finance Regulation No.249/PMK.02/2011 on Performance Measurement and Evaluation towards the implemented RKA-K which regulates the evaluation system of Ministry/Agency programs.

Further, 2012 was the year for evaluating the program by self-evaluation approach towards the programs carried out by each ministry/agency. At the same time, performance measurement was done on Outcome - Output reference information on each Ministry/Agency program.

As indicated by the analysis of the outcome reference information, the overall good performance achievements have not fully reflected the quality expenditures of ministry/agency. The analysis encourages further study to explore the overall contents of the programs. The analysis results in (1). Unclear distinction between input, output, and outcome, (2).

Hasil analisis dan evaluasi mencerminkan indikasi lemahnya arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L. Untuk itu, perlu dilakukan penataan arsitektur dan informasi kinerja dengan menggunakan pendekatan *logic model* (LM) sehingga informasi kinerja dan capaian program dari masing-masing K/L dapat terukur, relevan dan lebih jelas.

Dalam konteks implementasi konsep *logic model* dalam penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja pada RKA-K/L TA 2016, hal-hal yang telah dilakukan pada tahun 2014 sebagai berikut.

Pertama, disiapkan landasan hukum sebagai langkah awal penerapan penyusunan anggaran berbasis *logic model* yang dituangkan dalam PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.

Kedua, membekali para *stakeholder* dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses perencanaan penganggaran, telah dilakukan pelatihan/*workshop* terkait dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja.

Ketiga, menyampaikan surat ke seluruh K/L agar menyampaikan rumusan *logic model* masing-masing K/L. Berdasarkan reviu sementara dari rumusan *logic model* yang disampaikan ke DJA disimpulkan bahwa sebagian sudah sesuai dengan konsep penataan ADIK.

Keempat, melakukan proses *developing* tabel-tabel referensi terkait penataan arsitektur dan informasi kinerja yang diperlukan untuk disesuaikan dengan aplikasi RKA-K/L DIPA (*software*). Melalui tabel-tabel tersebut, K/L diharapkan dapat melakukan simulasi terhadap program dan informasi kinerjanya masing-masing sebelum di-*input* kedalam aplikasi RKA-K/L DIPA. Diharapkan pada akhir Februari 2015, seluruh K/L telah menyampaikan rumusan kinerja yang baru (*Output dan Outcome*) agar dapat digunakan dalam penyusunan RKA-K/L TA 2016.

Outcome which was unclear and too normative, (3). Dismal correlation between input-output-outcome, and (4) inexistent relevance of outcome towards the need or problem as the information was not found in the Work and Budget Planning of Ministry/Agency.

The outcome of the analysis and evaluation describes weak architecture and performance information in the Work and Budget Planning of Ministry/Agency. Thereby, it is imperative to rearrange the architecture and performance information by using the logic model (LM). It is expected that the program's performance and achievements of each ministry/agency will be made measurable, relevant and clearer. Measures to implement the logic model, a tool to arrange the Architecture and Performance Information on Work and Budget Planning of Ministry/Agency as of 2016, are as follows.

First of all, preparing a legal basis as the initial step for implementing the logic model-based budgeting as detailed in the PMK Number 136 / PMK.02 / 2014 on Guidelines for Compilation and Analysis of Work and Budget Planning of Ministry/Agency.

Second, involving the stakeholders and other parties related to the budget planning in the trainings/ workshops on the arrangement of Architecture and Performance Information.

Third, assigning all ministries/agencies to submit their formulation of the logic model. The temporary review indicates that some of the submitted formulation fit into the arrangement concept of ADIK.

Fourth, developing the reference tables correlated with the arrangement of architecture and performance information to comply with the application of RKA K/L DIPA (*software*). The tables are expected to help ministry/agency carry out simulation towards the respective program and performance information prior to be put into the application of RKA K/L DIPA. By the end of February 2015, all ministries/agencies should submit their Work and Budget Planning 2016 already suited to the new formulation of performance (output and outcome) format.

PENELAAHAN RKA-K/L ONLINE

ONLINE REVIEW OF WORK AND BUDGET PLANNING OF MINISTRIES/AGENCIES

Sistem informasi dikoordinasi secara terpusat untuk menjamin bahwa data yang diproses dapat dioperasikan secara terencana dan terkoordinasi. Semuanya untuk menjamin bahwa informasi melewati dan menuju subsistem yang diperlukan serta menjamin bahwa sistem informasi bekerja secara efisien. Sasaran Strategis berupa Teknologi Informasi dan Komputer yang Terintegrasi merupakan suatu kebutuhan organisasi yang memiliki proses bisnis skala nasional. Untuk mendukung Sasaran Strategis ini dalam DIPA DJA Tahun 2014 telah dialokasi dana sebesar Rp961.495.000,-. Prioritas Sasaran Strategis ini dijabarkan dalam IKU Implementasi Penelaahan RKA-K/L *Online* dengan realisasi 100%.

Penelaahan RKA-K/L merupakan forum penelaahan RKA-K/L antara kementerian/lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) yang disusun sesuai dengan amanat dalam PP Nomor 90 Tahun 2010. Penelaahan dokumen RKA-K/L tersebut dimaksudkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut (1). Rencana kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L konsisten dengan yang tertuang dalam RKP, (2). Untuk mencapai rencana kinerja tersebut dialokasikan dana yang efisien dalam tataran perencanaan; dan (3). Dalam pengalokasiannya telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Dalam pelaksanaannya, penelaahan RKA-K/L dilakukan dengan Penelaahan Tatap Muka oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan pada suatu tempat di Direktorat Jenderal Anggaran

To ensure that the processed data can be operated in a well-planned and coordinated mechanism, centralized information system is built. This move aims to make sure that the information passes and heads to the designated subsystem and the information system works efficiently. As the strategic targets, Integrated Information Technology and Computer are deemed necessary for any organization with national-scale business processes. To support the Strategic Objectives as stated in the DGB DIPA 2014, the fund amounting to Rp 961,495,000 has been allocated. The priority, already stated in KPI under the online review of Work and Budget Planning of Ministry/Agency, has been 100% achieved.

The online review is a forum for Ministries/Agencies, the Ministry of Finance and Ministry of Planning to review Work and Budget Planning. The documents of RKA-K / L examined in the review forum are the ones which stipulate the planning and budgeting of programs and activities of Ministry/Agency and were prepared in line with the Government Regulation No. 90/ 2010. The review aims to ensure that (1). Performance plan as outlined in the RKA-K / L concurs with that of RKP, (2). To achieve the performance plans, allocated fund are allotted efficiently during the planning phase; and (3). The allocation should comply with the implementation regulation of integrated budgeting, performance-based budgeting and medium-term expenditure framework.

In practice, a review of RKA-K / L was done with face-to-face examination by the related parties in a particular place of the Directorate General of Budget. As the bureaucratic reform demands, 2013 was the



(face to face). Sesuai tuntutan reformasi birokrasi, sejak tahun 2013 diperkenalkan Penelaahan *Online* (ujicoba pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi). Penelaahan RKA-K/L *Online* tersebut menggunakan fasilitas komputer dan internet yang melibatkan peserta penelaahan melalui interaksi pada sebuah aplikasi berbasis *web* sehingga terbentuk sebuah forum *online*. Perubahan metode penelaahan ini menjadikan pihak-pihak terkait melaksanakan penelaahan berada di tempat tugasnya masing-masing.

Pada tahun 2014, jumlah K/L yang menggunakan Penelaahan *Online* dalam penelaahan RKA-K/L terus diperbanyak. Penggunaan Penelaahan *Online* telah diterapkan kepada 43 K/L tambahan atau sekitar 50% dari jumlah keseluruhan K/L yang ada. Terobosan melalui pemanfaatan teknologi ini telah memotong jalur birokrasi dan efisiensi pengeluaran negara.

DJA pada tahun depan bermaksud melakukan evaluasi atas perjalanan implementasi penelaahan RKA-K/L *online* di 43 K/L, serta melakukan persiapan pengembangan implementasi pada K/L yang tersisa.

year for introducing Online Review (tried out at the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Constitutional Court (MK).

The RKA-K / L Online review uses computers and internet facilities involving participants through an interaction on a web-based application to create an online forum. The changes in the review method have driven the relevant parties to work in their respective offices.

2014 saw increasing number of RKA-K / L online review, which was applied to additional 43 ministries/agencies or approximately 50% of the total ministries/agencies. This breakthrough has optimized the bureaucratic shortcut and the efficiency of state expenditures.

As planned, DGB will assess the the implementation of RKA-K / L online review in 43 ministries/agencies and get ready to develop the implementation of the other ministries/agencies.

PERAN PUSAT LAYANAN DALAM PROSES REVISI ANGGARAN

HOW THE SERVICE CENTER FACILITATES BUDGET REVISION PROCESS

Pusat Layanan DJA adalah unit yang melaksanakan salah satu tugas dan fungsi DJA dalam hal penyediaan Layanan Unggulan DJA kepada para pemangku kepentingan. Pusat Layanan DJA melayani para pemangku kepentingan secara cepat namun tetap mengedepankan kualitas layanan, profesionalisme, dan integritas. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Layanan DJA didukung oleh teknologi informasi serta ruang layanan yang modern, nyaman, dan transparan.

Para pemangku kepentingan dapat memperoleh layanan dari Pusat Layanan DJA dengan datang langsung (*walk-in user*), melalui telepon ke nomor helpdesk, ataupun *email*. Portofolio layanan yang disediakan oleh Pusat Layanan DJA saat ini antara lain, penyelesaian revisi anggaran yang menjadi kewenangan DJA, verifikasi kelengkapan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), konsultasi seputar sistem dan aplikasi penganggaran, dan *Helpdesk Sistem Informasi PNBPN Online* (SIMPONI).

Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) dikembangkan dalam rangka penyempurnaan pembangunan sistem pengadministrasian pendapatan negara yang modern. SIMPONI sebagai bagian dari Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) yang dikelola oleh DJA telah di *soft launching* sejak awal tahun 2014. Transisi dari MPN G1 ke MPN G2 melibatkan banyak pihak sehingga dianggap perlu adanya pihak yang dapat dipercaya sebagai *problem solver*. Untuk menyediakan informasi, bantuan, dan petunjuk teknis terkait penggunaan sistem billing dan pembayaran/penyetoran PNBPN secara elektronik

Serving as one of DGB units, the Service Center provides high quality services to the stakeholders. In serving the stakeholders, It works fast while keeping quality service, professionalism, and integrity. The service center is supported by the information technology and the modern, comfortable, and transparent service room.

To get the services, the stakeholders can either do direct visits (walk-in users), by telephone to the helpdesk number, or by email. At present, Portfolio of services provided, among others things, are the completion of the revision of the budget under DGB authority, verification to the documents of Work Plan and Budget of Ministry / Agency (RKA-K / L), the completion of the Budget Implementation List (DIPA), consulting about the budgeting system and applications, and Helpdesk of Online PNBPN Information System (SIMPONI).

SIMPONI was developed to improve the modern administration system of state revenue. Soft launched in early 2014, SIMPONI is a part of DGB-managed State Revenue Generation Module 2 (MPN G2). As there were many parties involved in the transition from G1 to MPN MPN G2, a new unit had to be established to facilitate and to be responsible for the transition. That unit should provide information, assistance and technical guidance related to the use of billing system and electronic PNBPN payment



dengan menggunakan SIMPONI, Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan DJA yang beroperasi setiap hari kerja.

Setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan standar pelayanan yang sama dan pasti dari Pusat Layanan DJA. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Kepdirjen Anggaran Nomor KEP-28/AG/2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Anggaran dan KEP-32/AG/2014 tentang Maklumat Layanan pada Direktorat Jenderal Anggaran. Terbitnya kedua keputusan tersebut semakin memberikan kejelasan dan kepastian pelayanan yang diselenggarakan Pusat Layanan DJA, terkait persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, jaminan pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan tersebut juga disebarluaskan kepada publik secara manual (melalui papan pengumuman, *standing banner*, & leaflet) dan secara elektronik (melalui *website* dan media sosial).

Sebagai evaluasi atas pelayanan yang diberikan, Pusat Layanan DJA menyebarkan kuesioner kepada para pemangku kepentingan. Kuesioner terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pertanyaan

/ deposit with SIMPONI. Therefore, the DGB runs its Service Center which operates the whole week days.

DGB Service Center obligatorily provides fixed and equal service standards for the stakeholders. This drive was reinforced by the issuance of the decree of the Director General of Budget no. KEP-28 / AG / 2014 on Stipulation of Standard Services at DGB and KEP-32 / AG / 2014 on the Service Charter at the DGB. Reinforced by these two decrees, DGB Service Center gears to materialize clear and fixed services which include service requirements, system, mechanisms, and procedures for service, period of completion, cost / tariff, service assurance, the handling of complaints, suggestion, and feedback. Further, to disseminate the Service Standards and the Service Charter, manual publication media i.e. information board, standing banner, & leaflets and electronic publication i.e. websites and social media were used.

To evaluate the services provided, DGB Service Center distributed questionnaires to the stakeholders. The questionnaire consists of two (2) parts: the identification questions and statements. The identification section comprises four (4) questions i.e. name (optional), Ministry / Agency, age, and

identifikasi dan pernyataan. Bagian identifikasi terdiri dari 4 (empat) pertanyaan yaitu Nama (*optional*), Kementerian/Lembaga, Usia, dan Pendidikan. Bagian pernyataan terdiri dari 16 pernyataan yang harus diisi dengan pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Bentuk lain evaluasi juga dilakukan dengan meletakkan kotak puas dan tidak puas di ruang layanan. Kedua kotak tersebut dapat diisi oleh pengguna layanan yang datang langsung (*walk-in user*) ke Pusat Layanan DJA.

Selama tahun 2014, Pusat Layanan DJA melayani 2.579 usulan revisi anggaran dan pengajuan RKA-K/L, menerima 1.298 email, dan 1.019 telepon masuk. *Email* dan telepon yang masuk menanyakan permasalahan seputar sistem dan aplikasi penganggaran, SIMPONI, serta informasi lain terkait APBN.

education. The statement section consists of 16 statements that must be filled with statements as follows: strongly disagree, disagree, undecided, agree, and strongly agree. As alternative, special boxes to express both satisfaction and dissatisfaction is also available in the service room. Both boxes can be filled out by the walk-in users who visited the DGB Service Center.

During 2014, DGB Service Center served 2579 proposed budget revisions and submission of RKA-K / L, received 1,298 emails and responded to 1,019 calls. In addition, there were incoming e-mails and calls inquiring issues related to budgeting system and application, SIMPONI and other State budget matters.



KEBIJAKAN APBN DAN APBN-P

POLICIES ON THE IDONESIAN BUDGET AND THE REVISED INDONESIA BUDGET

Keputusan Mahkamah Konstitusi atas UU MD3

Melalui putusan Nomor 35/PUU-XI/2013, tanggal 22 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi memangkas sebagian kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Lembaga tinggi tersebut telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan putusan dimaksud, Banggar DPR RI tidak lagi membahas mata anggaran K/L secara teknis bersama Pemerintah sampai satuan tiga (termasuk rincian kegiatan dan jenis belanja). Melainkan, DPR RI hanya membahas rincian sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program. Fungsi anggaran sebagai kewenangan DPR RI terkait APBN adalah membahas dan menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Selain itu, DPR juga berwenang untuk mengawasi pelaksanaan APBN yang sudah disetujui bersama.

Mahkamah Konstitusi juga menghapus kewenangan Banggar DPR RI dalam melakukan pemblokiran anggaran (pemberian tanda bintang) pada anggaran K/L yang dianggap belum memenuhi syarat/kelengkapan dokumen. Banggar sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI hanya dapat menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap suatu mata anggaran tanpa ada persyaratan tertentu.

Kondisi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apabila persyaratan belum terpenuhi, langkah yang biasa diambil oleh DPR RI adalah pemblokiran anggaran. Pemblokiran ini mengakibatkan suatu mata anggaran tidak

The Ruling Made by Constitutional Court on UU MD3

The Constitutional Court (MK), through the ruling No. 35 / PUU-XI / 2013, dated May 22, 2014, has partially reduced the authority of the Budgetary Board of the House of Representatives. MK has granted some of judicial reviews on Law No. 27 of 2009 on the MPR, DPR, DPD and DPRD (MD3) and Law No. 17/ 2003 on the State Finance.

Adhering to the ruling, the Budgetary Board shall no longer discuss ministry/agency budget items technically with the government until the unit three (including details of activities and types of expenditures). Instead, the House of Representatives deserves to discuss the details until the organizational units, functions, and programs. To carry out the budget functions, the House of Representatives discusses and approves the state budget draft which the President submits. In addition, the House is also authorized to supervise the implementation of the budget passed.

The Constitutional Court also removes the Budgetary Board's authority to block the budget (to mark with an asterisk) on the budget of ministry/agency likely to be ineligible / incomplete documents. The budgetary Board can only agree or disagree with a particular budget item without any conditions.

Blocking the budget was a normal practice by the House of Representatives once the requirements failed to meet. That was the condition before the ruling of MK took into effect. As a result of the blocking, a particular budget item was not authorized for use during the execution of the state budget set. In addition, as budget blocking was not the supervisory functions of the House of Representatives, the measure was prone to authority abuse.

mendapat otorisasi untuk digunakan pada saat pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan bersama. Disamping itu, pemblokiran anggaran bukan termasuk pada salah satu fungsi pengawasan DPR RI dan dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Secara garis besar, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, peran Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam penyusunan APBN menjadi lebih besar. Hal tersebut membuat Pemerintah lebih leluasa dalam memilih kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Hal ini berarti, kontrol anggaran berada di Pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara teknis akan berpengaruh terhadap format dan struktur Nota Keuangan. Hal ini dikarenakan, rincian sampai dengan kegiatan dan jenis belanja tidak lagi disampaikan ke DPR RI. Oleh karena itu, format dan struktur NK dan RUU APBN beserta dokumen pendukungnya perlu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. NK dengan format dan struktur baru diusulkan hanya menguraikan rincian belanja APBN sampai dengan fungsi dan program. Mengacu pada amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, DJA telah menyesuaikan format Nota Keuangan, RAPBN serta RUU APBN Tahun 2015 sebagai APBN pertama yang terdampak putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, DPR RI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan penundaan persetujuan RKAKL (pemberian tanda bintang/blokir). Oleh karena itu, seluruh pembahasan/persetujuan oleh Komisi DPR RI harus diberikan dalam batas waktu penyelesaian (sebelum UU APBN disahkan). Artinya, tidak ada lagi pembahasan anggaran antara Pemerintah dengan DPR RI setelah RUU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Berkenaan dengan hal tersebut, K/L harus

In general, the ruling of the Constitutional Court Number 35 / PUU-XI / 2013 implies things as follows: First, giving greater role of Government as an executive agency in the preparation of the state budget. This provides the government with more flexibility in deciding policies and programs to implement. This suggests that the government controls the budget as done by the Ministry of Finance, serving as the State General Treasury.

Secondly, the decision of the Constitutional Court technically affects the format and structure of the Financial Note. The fact that the details into the activities and type of expenditure are no longer delivered to the House of Representatives was the underlined reason. Therefore, it needs to adjust the format and structure of the budget bill and its NK and supporting documents with the given decision of the Constitutional Court. NK with the format and the new structure is proposed to just outline the details of the state budget expenditure to the functions and programs. Referring to the ruling of the Constitutional Court, DGB has adjusted the format of the Financial Note, Proposed Budget and the Draft Budget 2015 as the first state budget affected by the ruling.

Third, the House of representatives is no longer authorized to postpone the approval of RKA-KL (marking with an asterisk/blocking).

Consequently, all discussion/approval by the Commission of the House should be given within the timeframe of completion (before the enactment of the State Budget Law). It simply means that no budget discussions will be conducted between the Government and the House once the Budget Bill is enacted to be the State Budget Law. To comply with this, ministry/agency should prepare supporting data/written documents, which are among other things: Government Work Plan, the direction of policy, evaluation results over the program and performance/achievements of the previous fiscal year, the data of the realized budget (per function, program, and organizational units), and main activities (without mentioning the budget).

mempersiapkan data dukung/dokumen tertulis antara lain: Rencana Kerja Pemerintah, arah kebijakan, hasil evaluasi program dan kinerja/capaian output tahun anggaran sebelumnya, data realisasi anggaran (per fungsi, program, dan unit organisasi), kegiatan-kegiatan utama (tanpa menyebut anggaran).

Dengan adanya kelengkapan data dukung tersebut, jalannya pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI (diharapkan) menjadi semakin berkualitas mengingat pembahasan difokuskan pada hal-hal yang strategis di tingkat program yaitu target, sasaran, dan indikator kinerja. Tidak ada lagi pembahasan yang berfokus pada suatu kegiatan/proyek tertentu beserta anggarannya.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin memperkuat upaya Pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja. Salah satunya adalah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja. K/L harus merumuskan *output* dan indikator-indikator kinerja program pada tingkatan yang strategis, bukan lagi pada tataran input (alokasi perjalanan dinas, jumlah gedung, atau pengadaan mobil).

The supporting data encourage the discussions between the Government and the House of Representatives to improve while focusing on the strategic issues such as targets, objectives and performance indicators. No discussion should be limited to particular activities/projects and budget required.

In addition, the Constitutional Court's decision further strengthens the Government's efforts to improve the quality of expenditures, one of which is the implementation of performance-based budgeting. Ministry/agency should formulate output and performance indicators at the strategic level, no longer at the input level (allocation of official travel, the number of buildings, or the procurement of cars).



PROSES PENYUSUNAN APBN 2015

THE PROCESS OF COMPILING THE INDONESIA BUDGET 2015

Sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, APBN berpedoman pada RKP dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Oleh sebab itu, tahap perencanaan dan pengelolaan keuangan negara dimulai dengan penyusunan RKP sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN. Pada periode yang sama, secara simultan, Kementerian Keuangan serta beberapa kementerian dan lembaga terkait (BI, BPS, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) mulai melakukan rapat pembahasan tentang asumsi ekonomi makro ke depan. Penyusunan NK dan RAPBN 2015 dimulai dengan Penyusunan Pagu Indikatif dan *Resource Envelope*. Sebelum itu, dilakukan penyusunan dan penetapan asumsi dasar ekonomi makro 2015 yang digunakan sebagai basis perhitungan *Resource Envelope* dan Pagu Indikatif 2015.

Kegiatan ini dimulai pada bulan Februari hingga Maret 2014. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran menyusun sumbangan bahan RKP untuk digabung dan difinalisasi oleh Bappenas. Setelah melalui beberapa kali pembaharuan, RKP dan Pagu Indikatif K/L tahun 2015 ditetapkan dengan Surat Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan, 0091/M.PPN/03/2014 dan S-179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2014, dalam Sidang Paripurna DPR RI Pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2015. Dokumen tersebut bersama-sama dengan RKP 2015 dibahas dengan DPR RI dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015.

In accordance with the provisions of Law No. 17 Year 2003 on State Finance and Law 17 Year 2014 on the MPR, DPR, DPD and DPRD, the state budget is based on the Government Work Plan to attain the Government objectives. Therefore, preparing the Government Work Plan as a reference in formulating the draft state budget initiates the planning and management of state finance. Simultaneously in the same period, the Ministry of Finance along with several ministries and related agencies (BI, BPS, Bappenas, and the Coordinating Ministry for Economic Affairs) began a meeting to discuss the future macroeconomic assumptions. NK and the draft budget 2015 began to be compiled with structuring the Indicative Ceiling and Resource Envelope. Prior to that, the 2015 basic macroeconomic assumptions were prepared and passed as the basis for calculating the Resource Envelope and Indicative Ceiling 2015.

This activity commenced in February and March 2014. At the same time, the Ministry of Finance, through the Directorate General of Budget, arranged RKP materials to be combined and finalized by Bappenas. Following several updates, RKP and Indicative Ceiling of ministry/agency 2015 was passed by the joint letter between the Minister of National Development Planning/Head of Bappenas with the Ministry of Finance, 0091/M.PPN /03/2014 and S-179/MK.02/2014 dated March 19, 2014.

On May 20, 2014, on the occasion of the Plenary Session of the House of Representatives, the Government submitted documents on Macroeconomic Framework and the Principles of Fiscal Policy 2015. Along with the RKP 2015, the documents were discussed by the House of Representatives in the Preliminary talks of Draft Budget 2015.

Berdasarkan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2015, Pemerintah kemudian menyesuaikan pagu indikatif dengan perkiraan kemampuan fiskal sesuai asumsi makro dan kebijakan fiskal yang disepakati bersama untuk menjadi pagu anggaran, yang selanjutnya didistribusikan ke seluruh K/L melalui Keputusan Menteri Keuangan. Pagu anggaran untuk RAPBN 2015 kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-278/MK.02/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang penetapan pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun Anggaran 2015.

K/L kemudian menyusun RKA-KL Pagu Anggaran, dan kemudian menyampaiakannya ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. RKA-KL tersebut selanjutnya dihimn dan menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 beserta RUU-nya dan selanjutnya disampaikan Presiden kepada DPR di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2014. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014, fraksi-fraksi menyampaikan Pemandangan Umum atas RUU APBN 2015, serta pada tanggal 21 Agustus 2014, Pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi tersebut.

Pembahasan RUU APBN dengan DPR

Sesuai dengan peraturan dan perundangan, pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibahas bersama Badan Anggaran DPR. Berdasarkan hal tersebut, Badan Anggaran DPR mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2015 mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 28 September 2014. Dalam pembahasan tersebut, dibentuk tiga panitia kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) Draft RUU yang melakukan pembahasan secara bertahap, yaitu:

1. Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan bertugas untuk membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan dalam RUU APBN 2014.

Following the preliminary talks on Draft Budget 2015, the Government then adjusted the indicative ceiling with the estimated fiscal capacity to fit the agreed macro and fiscal policy assumptions to be the budget ceiling, which was then distributed to the ministries/agencies through the Minister of Finance. The budget ceiling for draft budget 2015 was later enacted by the Decree of the Minister of Finance No.: KMK-278 / MK.02 / 2014 dated July 10, 2014 regarding the enactment of the budget ceiling of Ministry / Agency for budget year 2015.

Ministry/Agency then arranged RKA-KL Ceiling Budget, and then submitted it to the Ministry of Finance c.q. Directorate General of Budget. RKA-KL was then compiled and served as the basis of the Financial Note and Draft Budget 2015 along with the bill and was later presented by the President to the House of Representatives during the Plenary Session on August 16, 2014. Following the presentation, the factions conveyed general reviews the Budget Bill 2015 on August 19, 2014. To response to the general reviews, the Government gave responses to the reviews of the factions on August 21, 2014.

Discussion on Indonesian Budget Bill (RUU APBN) with the House of Representatives

Compliance with the prevailing rules and regulations, the Government proposed the Budget Bill to the House of Representatives to be discussed with the Budgetary Board. Therefore, the Budgetary Board held a working meeting with the Government and the Governor of Bank Indonesia for talks Level I / discussion on Budget Bill 2015 from 27 August to 28 September 2014. The talk agreed to establish three working committees and the Formulation Team of the draft bill to discuss the matters gradually that are:

1. The working committee on Assumptions, Revenues, Deficits and Financing worked to discuss the basic assumptions, revenue, deficit

Panja ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 3 sampai 22 September 2014.

2. Panja Belanja Pemerintah Pusat Panja Belanja Pemerintah Pusat bertugas membahas Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga (Non-K/L). Panja ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 22 sampai dengan 24 September 2014.
3. Panja Transfer ke Daerah Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa bertugas untuk membahas Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DI Yogyakarta, Dana Transfer Lainnya, serta Dana Desa. Panja ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 23 sampai dengan 24 September 2014.
4. Tim Perumus Draft RUU Tim Perumus Draft RUU bertugas membahas draft RUU APBN 2015. Tim ini telah melakukan pembahasan mulai tanggal 25 sampai dengan 26 September 2014. Keseluruhan hasil panja-panja dan tim perumus telah disinkronisasikan dalam Rapat Internal Badan Anggaran pada tanggal 27 September 2014, dan dilaporkan dan disahkan dalam Rapat Kerja tanggal 28 September 2014.

Dalam pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2015, Pemerintah dengan Panitia Kerja Asumsi telah melakukan pembahasan dari tanggal 3 sampai 22 September 2014. Berdasar hasil pembahasan tersebut, besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2015 disepakati sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi disepakati sebesar 5,8 persen, (2) Inflasi disepakati sebesar 4,4 persen, (3) Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS disepakati sebesar Rp11.900 per US Dolar, (4) Suku bunga SPN 3 bulan disepakati sebesar 6,0 persen, (5) Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) disepakati sebesar US\$105 per barel, (6) *Lifting* minyak disepakati sebesar 900 ribu barel per hari, dan (7) *Lifting* gas disepakati sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari. Asumsi ekonomi makro hasil pembahasan dengan DPR RI selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

and financing in the Budget Bill 2014. The discussion was held from 3 to 22 September 2014.

2. The Working Committee of Central Government Expenditure was tasked to discuss the Central Government Expenditure which comprises Ministry /Agency and Expenditure of Non Ministry /Agency. The working committee conducted the discussions between 22 and 24 September 2014.
3. The working committee on Transfer to the Regions and Village Fund focused on discussing the Fiscal Equalization Fund (DBH, General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund), Special Autonomy Fund, Specialty Fund of Yogyakarta, Other Transferred Fund and Village Fund as well. The working committee initiated the discussion from 23 to 24 September 2014.
4. The Drafting Team of Draft Bill was in charge of discussing the draft Budget Bill 2015. The team held discussions from 25 to 26 September 2014. To synchronize the overall results of the working Committees and the Drafting Team convened the Internal Meeting of the Budget Committee on September 27 2014. Further, the results were reported and approved in a working meeting on 28 September, 2014.

To discuss the Basic Assumptions of Macroeconomic used in the Draft Budget 2015, the Government and the working committee on Assumptions had a review on September 3-22, 2014. The discussion resulted in: 1) Economic Growth was agreed at 5.8 percent, (2) Inflation was predicted at 4.4 percent, (3) the exchange rate of the rupiah against the US dollar was set at Rp 11.900 per USD, (4) interest rate of SPN 3 months was at 6.0 percent, (5) the price of Indonesia crude oil (ICP) was agreed at US\$ 105 per barrel, (6) Oil lifting was made fixed at 900.000 barrels per day, and (7) gas lifting was agreed at 1,248.000 barrels equal to oil lifting per day. The table below presents the macroeconomic assumptions derived during the discussion with the House of Representatives:

No	Uraian	2015	
		RAPBN	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.6	5.8
2	Inflasi (%) y-o-y	5.0	4.4
3	Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	6.2	6.0
4	Nilai Tukar (Rp/US\$1)	11.900.0	11.900.0
5	Harga Minyak (US\$/Barel)	105.0	105.0
6	Lifting Minyak (Ribu Barel/hari)	845	900
7	Lifting Gas (Ribu barel setara minyak/hari)	1.248	1.248

Dalam pembahasan Pendapatan Negara dan Hibah RAPBN 2015, Pemerintah dengan Panitia Kerja menyepakati bahwa Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN 2015 sebesar Rp1.793,6 triliun, terdiri dari: (1) Penerimaan PPh Migas sebesar Rp88,7 triliun; (2) Penerimaan Perpajakan Nonmigas sebesar Rp1.113,0 triliun; (3) Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp178,3 triliun; (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Migas sebesar Rp224,3 triliun; (5) PNBP SDA Non-Migas sebesar Rp30,0 triliun; (6) Pendapatan Bagian Laba BUMN sebesar Rp44,0 triliun; (7) PNBP Lainnya sebesar Rp89,8 triliun; (8) Pendapatan BLU sebesar Rp22,2 triliun, dan (9) Hibah sebesar Rp3,3 triliun.

RAPBN 2015 disusun pada masa transisi antara Pemerintah dan DPR saat ini untuk dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR baru hasil Pemilihan Umum 2014. Oleh karena itu, RAPBN 2015 disusun sebagai *baseline budget*, dalam arti hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditujukan untuk memberi ruang gerak bagi pemerintahan terpilih untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan *platform*, visi, dan misi yang telah direncanakan. Besaran anggaran belanja negara dalam APBN 2015 ditetapkan sebesar Rp2.039,5 triliun. Anggaran belanja negara tersebut sebesar Rp1.392,4 triliun dialokasikan pada

As a part of the discussion on Revenue and Grants in the Draft Budget 2015, the Government with the Working Committee agreed that the Revenue and Grants in the state budget in 2015 were set to Rp 1,793.6 trillion, consisting of: (1) Oil and Gas Tax Receipts Rp 88.7 trillion; (2) non-oil Tax Revenue amounting Rp 1,113.0 trillion; (3) Revenue by Customs and Excise Rp 178.3 trillion; (4) Non-Tax Revenue (PNBP) from Natural Resources (SDA) oil and gas Rp 224.3 trillion; (5) PNBP Non-oil and gas natural resources Rp 30.0 trillion; (6) Revenue Profit from State-owned Enterprises Rp 44.0 trillion; (7) Other non-tax revenues targeted at Rp 89.8 trillion; (8) BLU-derived Revenue Rp 22.2 trillion, and (9) Received grants Rp 3.3 trillion.

The Draft budget 2015, compiled in the transition period between the current Government and the House will be mandated to the Government and the House of Representatives by the General Election 2014. Therefore, the 2015 draft budget was a baseline budget, suggesting that it only entails the basic needs of governance and public service. It was intended to provide space for the elected government to implement programs / activities fitting into the platform, the vision, and the planned missions. The amount of the state budget in the state budget in 2015 was set at Rp 2,039.5 trillion. The central government received Rp 1,392.4 trillion for expenditure while Rp 647.0 trillion was transferred

belanja Pemerintah pusat dan sebesar Rp647,0 triliun dialokasikan pada transfer ke daerah dan dana desa. Pada anggaran belanja Pemerintah pusat, sebesar Rp647,3 triliun dialokasikan untuk belanja Kementerian negara/Lembaga dan sebesar Rp745,1 triliun dialokasikan untuk belanja non- Kementerian negara/Lembaga.

Setelah dilakukan perubahan di tingkat Badan Anggaran, Komisi, Panitia dan Tim Perumus di dalam Pembicaraan Tingkat I, APBN 2015 selanjutnya dibawa di dalam Pembicaraan Tingkat II, yaitu Sidang Paripurna DPR tanggal 29 September 2014 dengan agenda pengesahan RUU APBN untuk ditetapkan menjadi UU. Berdasarkan persetujuan DPR dalam Sidang Paripurna, maka defisit dalam APBN 2015 ditetapkan sebesar 2,21 persen terhadap PDB, atau sebesar Rp245,9 triliun, yang direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan bersumber dari dalam negeri sebesar Rp269,7 triliun dan pembiayaan bersumber dari luar negeri sebesar negatif Rp23,8 triliun.

to the regions and villages. Within the central government budget, Rp 647.3 trillion was allocated for the Ministry/Agency while Rp 745.1 trillion was allocated to non-Ministry/agency.

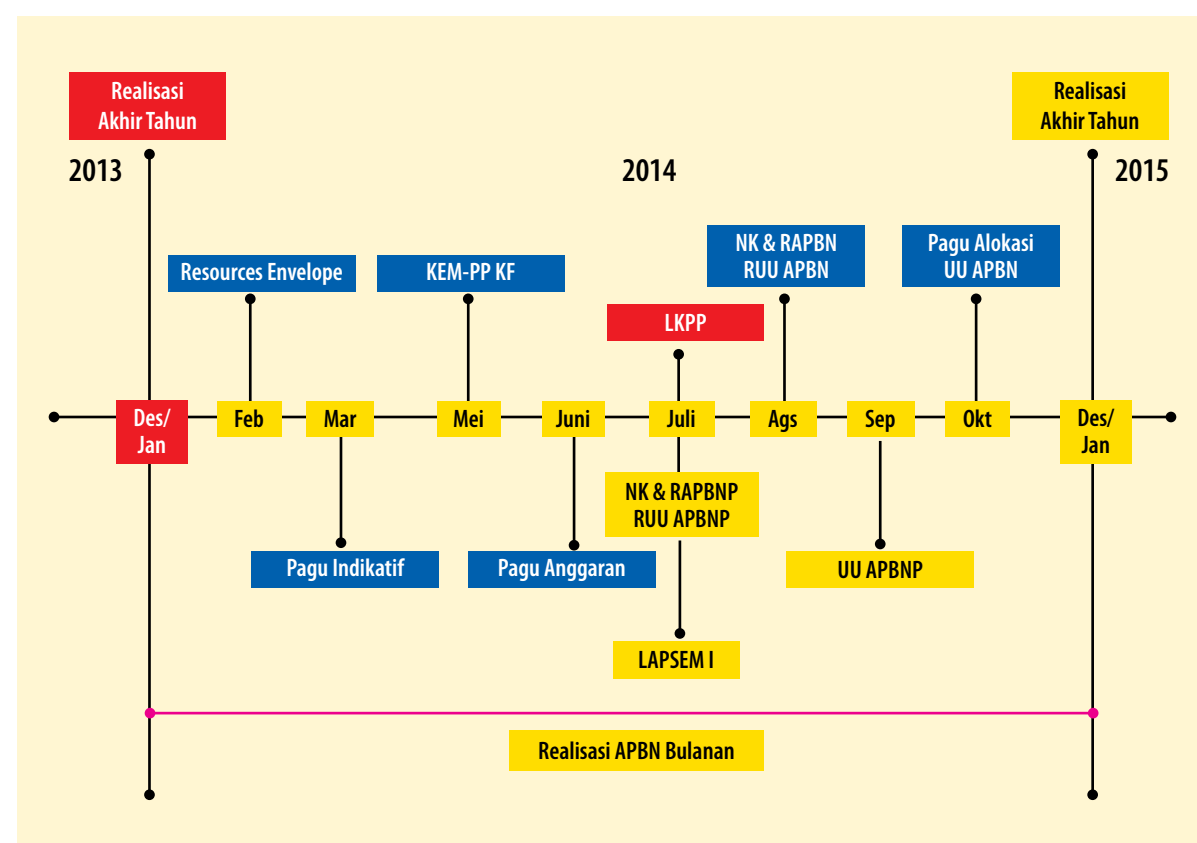
Following the change during talks Level I with the Budgetary Board, the Commission, the working Committee and the formulation team, State Budget 2015 was further brought to talks Level II, which was the House plenary session on September 29, 2014. The plenary session focused on setting the Draft Budget into law. As agreed in the plenary session, the budget deficit in 2015 was set at 2.21 percent of GDP, or by Rp 245.9 trillion, which will be financed by domestic financial sources Rp 269.7 trillion and the foreign sources by negative Rp 23.8 trillion.

No	URAIAN	RAPBN	APBN
1	A. PENDAPATAN NEGARA	1.762,3	1.793,6
	I. Pendapatan Dalam Negeri	1.758,9	1.790,3
	1. Pendapatan Perpajakan	1.370,8	1.380,0
	2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.88,0	410,3
	II. Pendapatan Hibah	3,4	3,3
2	B. BELANJA NEGARA	2.019,9	2.039,5
	I. Belanja Pemerintah Pusat	1.379,9	1.392,4
	II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	640,0	647,0
3	C. KESEIMBANGAN PRIMER	(103,5)	(93,9)
4	D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN	(257,6)	(245,9)
	% Defisit terbatas terhadap PDB	(2,32)	(2,21)
3	E. PEMBIAYAAN (I + II)	257,6	245,9
	I. Pembiayaan Dalam Negeri	281,4	269,7
	II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(23,8)	(23,8)

Setelah UU APBN 2015 ditetapkan, Pemerintah menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L, yang harus selesai paling lambat pada akhir November 2014. Rincian Anggaran Belanja K/L tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari UU APBN 2015.

Tahap akhir dari siklus penyusunan APBN 2015 adalah penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pada minggu pertama bulan Desember 2014. Penyerahan DIPA tahun 2015 diberikan lebih awal agar pelaksanaan APBN 2015 dapat segera dilaksanakan pada awal tahun 2015. Gambaran singkat alur tersebut dapat dilihat pada siklus dibawah ini :

SIKLUS POSTUR APBN



Once the 2015 Budget Law was passed, the Government prepared the detailed Budget of ministry/agency to be accomplished no later than the end of November 2014. The detail of ministry/agency Budget was enacted by the Presidential Decree, and will be inseparable attachment of 2015 Budget Law.

Completion of documents incorporating implemented budget (DIPA /Budget Implementation List) marked the final stage of budget preparation cycle 2015 which was due by the first week of December 2014. DIPA 2015 was handed over earlier for possible implementation of the Budget 2015 at the beginning of 2015. The cycle below describes the afore-mentioned process:

Postur APBN Tahun 2015

Postur APBN Tahun 2015
(Miliar Rupiah)

URAIAN	APBN 2015
A. PENDAPATAN NEGARA	1.793.588,9
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.790.332,6
1. Pendapatan Perpajakan	1.379.991,6
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	410.341,0
II. PENDAPATAN HIBAH	3.256,3
B. BELANJA NEGARA	2.039.483,6
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.392.442,3
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L)	647.309,9
2. Belanja Non K/L	745.132,4
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	647.041,3
1. Transfer ke Daerah	637.975,1
2. Dana Desa	9.066,2
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(93.926,4)
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A-B)	(245.894,7)
% Defisit terhadap PDB	(2,21)
E. PEMBIAYAAN	245.894,7
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	269.709,7
1. Perbankan Dalam Negeri	4.467,5
2. Non Perbankan Dalam Negeri	265.242,2
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(23.815,0)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (neto)	47.037,1
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(4.319,4)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(66.532,8)
Asumsi Dasar Ekonomi Makro:	
• Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8
• Inflasi (%) y-o-y	4,4
• Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	6,0
• Nilai Tukar (Rp/USD1)	11.900
• Harga Minyak (USD/barel)	105
• Lifting Minyak (ribu barel/hari)	900
• Lifting Gas (MBOEPD)	1.248

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Tahun 2015

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2015 direncanakan sebesar Rp1.392.442,3 miliar (12,5 persen dari PDB). Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2015 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh

Central Government Expenditure (BPP) 2015

As stated in the State Budget 2015, Central Government receives Rp 1,392,442.3 billion (12.5 percent of GDP). The fund will primarily finance various development programs of ministries/agencies, cross-sectoral programs, or the one allocated through the Ministry of Finance as State General Treasury (non K / L expenditures), adhering

kementerian negara/lembaga (belanja K/L) sesuai tugas dan fungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral atau yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (belanja non-K/L), sesuai dengan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar 46,5 persen (Rp647.309,9 miliar) dialokasikan melalui belanja K/L, baik untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan. Sementara itu, sebesar Rp745.132,4 miliar (53,5 persen) dialokasikan melalui belanja non-K/L (BA BUN), yang sebagian besar digunakan untuk pendanaan program pengelolaan subsidi dan program pengelolaan utang negara.

BPP Menurut Organisasi

Anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi secara umum dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu: Pertama, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran kementerian negara/lembaga (BA K/L) dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer*). Kedua, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*).

Jumlah BA K/L adalah 86 bagian anggaran dengan rincian: 33 kementerian, tiga kementerian koordinator, enam lembaga negara, 38 lembaga pemerintah, dan enam komisi. Sementara itu, BA BUN terkait belanja Pemerintah Pusat terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01); (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02); (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); serta (5) BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99).

Dari anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp1.392.442,3 miliar, sebesar Rp647.309,9 miliar (46,5 persen) dialokasikan melalui BA K/L, sementara Rp745.132,4 miliar (53,5 persen) dialokasikan melalui BA BUN.

to the development programs set forth in the Government Work Plan 2015. Of this amount, 46.5 percent (Rp 647,309.9 billion) is allocated through K/L expenditures, both for governance operation and implemented development programs. Meanwhile, Rp 745,132.4 billion (53.5 percent) is allocated through non-K / L expenditure (BA BUN), which is mostly used for financing the management of the subsidy program and the state debt management program.

Organization-based BPP

As categorized by the general principles of organization, the Central Government budget falls into 2 sections. First, the budget is allocated for ministries/agencies (BA K/L) in which the minister and head of agency serve as Budget User (*Chief Operational Officer*). Secondly, the budget is allocated for the State General Treasurer (BA BUN) which places the Minister of Finance to serve as State General Treasurer (*Chief Financial Officer*).

In total, there are 86 BA K/L which includes: 33 ministries, three coordinating ministries, six state agencies, 38 government agencies, and six commissions. Meanwhile, BA BUN related to the Central Government expenditures consists of (1) BA BUN for Government Debt Management (BA 999.01); (2) BA BUN for Grant Management (BA 999.02); (3) BA BUN for Subsidy Management (BA 999.07); (4) BA BUN for Other Expenditure Management (BA 999.08); and (5) BA BUN for Special Transactions (BA 999.99).

As stated in the state budget 2015, the central government budget receives Rp 1,392,442.3 billion, and Rp 647,309.9 billion (46.5 percent) of which is allocated through BA K/L, while Rp745,132.4 billion (53.5 percent) is allocated through BA BUN.

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Tahun 2015 merupakan masa transisi dari RPJMN 2010-2014 dan merupakan bagian awal RPJMN tahap III tahun 2015-2019. Mengingat hal tersebut, penyusunan anggaran belanja K/L telah menampung kebutuhan pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana anggaran belanja K/L tahun 2015, Pemerintah telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja K/L tahun 2015 bersifat *baseline budget*, dalam arti:
 - a. hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. tingkat *output (service delivery)* yang sama dengan TA 2014; dan
 - c. tetap mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) sehingga diharapkan tetap memberikan ruang gerak bagi pemerintahan yang baru hasil Pemilu 2014 untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform yang direncanakan.
2. Menampung anggaran untuk program/kegiatan/*output* prioritas nasional yang bersifat *baseline*; dan
3. Meningkatkan penajaman kualitas belanja K/L dari sisi efektivitas dan efisiensi alokasi, termasuk penyempurnaan rumusan kinerja (*outcome, output*, dan indikator kinerja), dan target kinerja.

Namun demikian, rencana anggaran belanja K/L tahun 2015 telah menampung anggaran yang sifatnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan (*mandatory*) antara lain anggaran terkait pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, anggaran pendidikan, serta rencana kegiatan yang memiliki target *multiyears* seperti *domestic connectivity*, pertumbuhan berbasis lokal, riset dan inovasi, serta percepatan pencapaian MEF. Selain itu, pengalokasian anggaran untuk bantuan sosial telah mengacu hasil *review* BPKP yaitu agar bantuan sosial diarahkan terutama

Budget Section of Ministries/Agencies

2015 serves as the transitional period of RPJMN 2010-2014 which is the early stage III of RPJMN 2015-2019. Therefore, ministry/agency budgeting accommodates the funding needs of national priority activities while considering the state financial capacity. As a result, to prepare the RKA-K/L 2015, the Government imposes the following policies:

1. Ministry/Agency expenditure 2015 is the baseline budget, in the sense of:

Merely relying on the basic needs of governance and service to public;

 - a. the level of output (service delivery) was equal to FY 2014; and
 - b. Still referring to the long-term development plan (RPJP), the expenditure is expected to allow the new government elected by the General Election 2014 to implement programs/activities by the planned platform.
2. Accommodating the budget for the programs/activities/outputs which are the national priorities baseline; and;
3. Improving the detailed quality of Ministry/Agency expenditures seen from the effectiveness and efficiency of allocation, including improving the formulation of performance (outcomes, outputs, and performance indicators), and performance targets.

However, the budget plan of Ministry/Agency 2015 accommodates mandatory budget as mandated by the law, among others, are the one related to the implementation of the the National Social Security (SJSN) in health, education budget, as well as plan activities with multi-year targets such as domestic connectivity, local-based growth, research and innovation, and accelerated achievement of MEF. In addition, the budget allocation for social assistance consistently referred to the results of the BPKP reviews which suggest that social assistance is directed primarily on disaster mitigation, the allocation for the Ministry of Social Affairs, and the

pada penanggulangan bencana, alokasi untuk Kementerian Sosial, dan kementerian yang mendukung fungsi pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, dalam penyusunan rencana anggaran belanja K/L tahun 2015, Pemerintah juga memperhatikan sinergitas pembangunan antar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melalui: (1) memilih kegiatan yang akan didanai oleh K/L dengan berpedoman pada pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; (2) mengalihkan anggaran K/L yang mendanai urusan pemerintahan daerah ke Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) menentukan distribusi alokasi anggaran K/L untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam kerangka pencapaian prioritas nasional; (4) mengupayakan sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan kegiatan-kegiatan daerah yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus; dan (5) pemindahan kegiatan berbasis desa beserta anggarannya ke transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sesuai dengan arah kebijakan serta dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dan prioritas pembangunan nasional, alokasi anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2015 mencapai Rp647.309,9 miliar yang terdiri dari sumber dana rupiah murni sebesar Rp565.344,4 miliar, pagu penggunaan PNPB sebesar Rp17.344,3 miliar, pagu penggunaan BLU sebesar Rp19.892,5 miliar, pinjaman luar negeri sebesar Rp32.881,5 miliar, hibah luar negeri sebesar Rp2.387,4 miliar, pinjaman dalam negeri sebesar Rp2.000,0 miliar dan surat berharga syariah negara *project based sukuk* (SBSN PBS) sebesar Rp7.459,8 miliar. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp45.018,0 miliar (7,5 persen) dibandingkan pagu belanja K/L dalam APBN tahun 2014 sebesar Rp602.292,0 miliar. Penjelasan secara garis besar mengenai program-program yang ada dalam masing-masing kelompok program di atas yang mencakup tujuan, indikator kinerja, dan *outcome*-nya adalah sebagaimana berikut.

ministry which supports the function of education and health.

Besides, to prepare the budget plan of Ministry/Agency 2015, the Government also considered building synergy between the central government and regional government through: (1) selecting the activities to be funded by the Ministry/Agency, based on the division of business and the authorities stipulated in laws and regulations; (2) transferring the budget of Ministry/Agency which finances local government affairs to the Special Allocation Fund (DAK); (3) setting the distribution of Ministry/Agency budget allocations for the regional activities by considering the needs of the regions to achieve national priorities; (4) synchronizing activities in Work plan of Ministry/Agency with the regional activities funded by Balance Fund and Special Autonomy Fund; and (5) Transferring village-based activities along with its budget to transfer funds to the regions and villages based on Law No. 6 of 2014 on village.

To comply with the policy direction and to support the achievement of strategic objectives and priorities of the national development, Ministry/Agency budget allocation in the state budget 2015 amounting to Rp 647,309.9 billion, consisting of a pure source of funds amounting to Rp 565,344.4 billion dollars, the ceiling of PNPB use Rp 17,344.3 billion, the maximum amount of BLU use Rp 19,892.5 billion, foreign loans Rp 32,881.5 billion, foreign grants Rp 2,387.4 billion, domestic loans reaching Rp 2,000.0 billion, and the state Islamic securities of project based sukuk (debt instrument) (SBSN PBS) Rp 7,459.8 billion. The amount increased by Rp 45,018.0 billion (7.5 percent) compared to the expenditure ceiling of Ministry/Agency in the revised budget in 2014 peaking to Rp. 602,292.0 billion. The brief program detail of each group includes objectives, performance indicators, and its outcome as follows.

Kelompok Program Bidang Perekonomian

Dalam bidang perekonomian pada tahun 2015, Pemerintah mempunyai tujuan (antara) yaitu mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan mampu lepas dari jerat/jebakan pembangunan negara berpendapatan menengah bawah, dengan didukung oleh: (1) makro ekonomi yang stabil; (2) sektor riil sebagai motor penggerak dengan fokus pada industrialisasi di sektor produksi; (3) investasi, perdagangan yang berkelanjutan didukung oleh pembiayaannya; serta (4) pertumbuhan inklusif dari semua sektor yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok program bidang perekonomian direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp217.814,6 miliar pada APBN tahun 2015. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp18.788,4 miliar atau 9,4 persen bila dibandingkan dengan APBN tahun 2014 sebesar Rp199.026,2 miliar.

Kelompok Program Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sebagai landasan awal bagi kelangsungan pembangunan tahap selanjutnya, arah pembangunan pada tahun 2015 dalam bidang kesejahteraan rakyat antara lain: (1) peningkatan pendidikan tinggi; (2) peningkatan status kesehatan anak dan usia produktif serta kualitas kesehatan masyarakat; (3) peningkatan keluarga berencana; dan (4) peningkatan partisipasi pemuda dan didukung lapangan kerja dan pasar kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam APBN tahun 2015 kelompok bidang kesejahteraan rakyat direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp221.874,2 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp20.633,6 miliar atau 10,3 persen bila dibandingkan dengan APBN tahun 2014 sebesar Rp201.240,6 miliar.

Kelompok Program Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Dalam bidang politik, hukum dan keamanan, pada tahun 2015 Pemerintah mempunyai tujuan yaitu: (1) terpenuhinya alutsista TNI dan alamsus Polri yang didukung industri pertahanan; (2)

Group of Economic sector program

In the economic sector 2015, the Government aims to achieve sustainable growth and avoid the development traps of lower middle income countries, as supported by: 1) macroeconomic stability; (2) the real sector as the driving force with industrialization in the production sector as the primary focus; (3) investment, sustainable trade by financing; and (4) the inclusive growth of all sectors by public engagement. To arrive at the goals, the economic sector will receive allocated budget amounting to Rp. 217,814.6 billion in the State Budget 2015. The amount is Rp 18,788.4 billion higher or 9.4 per cent increase compared to the revised budget in 2014 amounting to Rp 199,026.2 billion.

Group of People's Welfare Sector Program

As an initial basis for the future sustainable development, the goals of people's welfare development in 2015, among other things, are: (1) an increase in higher education; (2) improved health status of children, people at productive age and quality of public health; (3) better family planning; and (4) higher participation of youth with the support of employment and the labor market. To achieve these objectives, as stated in State Budget 2015, Rp 221,874.2 billion will be allocated to the people's welfare group. It means that there is an increase of Rp 20,633.6 billion or 10.3 per cent as compared with the revised budget in 2014 amounting to Rp 201,240.6 billion.

Group of Political, Legal and Security Sector program

The government, in political, legal and security affairs in 2015, aims to achieve these goals: (1) the fulfillment of the Indonesian Military primary weapons defense system and the National Police special material tools supported by defense industry; (2) increased welfare to improve the professionalism of the soldiers; (3) stronger political/ democratic institutions as indicated by the higher rank of Indonesian democracy index on aspects of

meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit; (3) menguatnya kelembagaan politik/demokrasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka indeks demokrasi Indonesia pada aspek institusi demokrasi; (4) terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka indeks demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik; dan (5) meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia. Program bidang politik, hukum, dan keamanan dalam APBN tahun 2015 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp207.621,1 miliar. Jumlah ini lebih tinggi Rp5.596,0 miliar atau 2,8 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2014 sebesar Rp202.025,1 miliar.

Tabel berikut memperlihatkan anggaran belanja K/L berdasarkan bagian anggaran K/L dan kelompok program.

**Anggaran Belanja Program Bidang K/L 2014-2015
(miliar rupiah)**

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	APBNP 2014	APBNP 2015
		Program Bidang Perekonomian	199.062,2	217.814,6
1	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	291,3	305,9
2	004	Badan Pemeriksa Keuangan	2.595,0	2.915,5
3	015	Kementerian Keuangan	18.204,8	18.727,2
4	018	Kementerian Pertanian	13.613,0	15.879,3
5	019	Kementerian Perindustrian	2.629,3	2.743,3
6	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	14.341,5	10.023,5
7	022	Kementerian Perhubungan	36.003,2	44.933,9
8	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.961,9	5.251,9
9	029	Kementerian Kehutanan	4.507,3	5.643,2
10	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.748,7	6.726,0
11	033	Kementerian Pekerjaan Umum	74.522,2	81.338,2
12	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.507,7	1.715,9
13	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	123,5	133,8
14	042	Kementerian Riset dan Teknologi	555,0	747,5
15	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.420,4	1.453,9
16	054	Badan Pusat Statistik	3.251,0	3.930,8
17	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1.143,5	1.008,1
18	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	574,2	635,9
19	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	2.445,9	1.386,8
20	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.432,9	1.763,5

democratic institution; (4) assured civil liberties and political rights of the people as indicated by the increased number of Indonesian democracy index on the aspects of civil liberties and political rights; and (5) improved Indonesia's role in maintaining national security and building world peace. To support the program, a budget of Rp 207,621.1 billion will be disbursed to the political, legal, and security programs from the state budget 2015. This amount is Rp 5,596.0 billion or 2.8 percent higher compared to the revised budget in 2014 amounting to Rp 202,025.1 billion.

The table below shows ministry/agency budget for section and program groups.

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	APBNP 2014	APBNP 2015
21	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	993,0	1.147,6
22	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	667,3	819,9
23	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	768,2	858,4
24	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	690,2	673,1
25	083	Badan Informasi Geospasial	729,7	721,0
26	084	Badan Standardisasi Nasional	84,6	164,8
27	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	90,5	137,1
28	090	Kementerian Perdagangan	2.335,2	2.495,3
29	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	145,7	158,4
30	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	332,0	195,5
31	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.066,9	1.097,2
32	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	921,8	889,0
33	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	967,6	866,6
34	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	341,3	246,5
		Program Bidang Kesejahteraan Rakyat	201.240,6	221.874,2
35	036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	194,3	295,8
36	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	76.557,9	88.309,1
37	024	Kementerian Kesehatan	47.476,5	47.758,8
38	025	Kementerian Agama	51.568,5	56.440,0
39	027	Kementerian Sosial	6.684,3	8.079,4
40	043	Kementerian Lingkungan Hidup	945,8	825,0
41	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	191,6	217,7
42	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	422,4	473,5
43	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.008,8	1.221,6
44	066	Badan Narkotika Nasional	703,1	903,2
45	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2.522,9	3.294,7
46	087	Arsip Nasional Republik Nasional	117,0	172,1
47	088	Badan Kepegawaian Nasional	502,3	614,1
48	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.264,3	1.528,4
49	091	Kementerian Perumahan Rakyat	4.001,3	4.621,5
50	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.761,9	1.781,2
51	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.304,4	1.681,6
52	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	375,0	393,3
53	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)	735,6	843,2
54	107	Badan SAR Nasional	1.902,7	2.420,0
		Program Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	202.025,1	207.621,1
55	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	448,3	449,6
56	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	713,1	612,3
57	002	Dewan Perwakilan Rakyat	2.888,2	3.556,7
58	005	Mahkamah Agung	7.159,9	7.037,9
59	006	Kejaksaan Republik Indonesia	3.570,2	4.208,9
60	007	Kementerian Sekretariat Negara	2.005,5	2.054,8
61	010	Kementerian Dalam Negeri	13.797,0	7.240,9
62	011	Kementerian Luar Negeri	4.885,8	5.533,9
63	012	Kementerian Pertahanan	83.300,3	96.935,7
64	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	7.607,5	9.688,7
65	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	146,2	195,9

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	APBNP 2014	APBNP 2015
66	050	Badan Intelijen Negara	1.830,1	2.416,6
67	051	Lembaga Sandi Negara	1.521,4	1.456,6
68	052	Dewan Ketahanan Nasional	27,5	44,3
69	056	Badan Pertahanan Nasional	4.418,4	4.576,3
70	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.558,0	4.859,8
71	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	43.603,9	51.594,5
72	064	Lembaga Ketahanan Nasional	290,3	278,9
73	074	Komisi Nasional Hak Asasi Nasional	66,7	72,2
74	076	Komisi Pemilihan Umum	13.880,9	1.134,2
75	077	Mahkamah Konstitusi RI	208,2	214,5
76	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	59,1	76,5
77	086	Lembaga Administrasi Negara	221,7	269,8
78	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	559,5	898,9
79	095	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	670,7	763,9
80	100	Komisi Yudisial Republik Indonesia	77,7	119,6
81	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	84,0	100,6
82	110	Ombudsman Republik Indonesia	62,2	66,3
83	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	168,9	210,6
84	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	263,6	311,8
85	114	Sekretariat Kabinet	171,0	183,1
86	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3.759,5	457,0
Jumlah			602.292,0	647.309,9

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Dalam APBN tahun 2015, alokasi untuk BA BUN direncanakan sebesar Rp745.132,4 miliar (53,5 persen dari belanja Pemerintah Pusat). Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban Pemerintah, seperti pembayaran manfaat pensiun, iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai negeri sipil, dan kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluran berbagai jenis subsidi; dan (3) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi ekonomi makro dengan realisasinya, dan dana cadangan bencana alam. Pengalokasian belanja melalui BA BUN dikelompokkan ke dalam beberapa program, yaitu: program pengelolaan utang negara, program pengelolaan subsidi, program pengelolaan hibah negara, program pengelolaan belanja lainnya, dan program pengelolaan transaksi khusus.

Budget Section of State General Treasurer (BA BUN)

In the state Budget 2015, BA BUN will receive the allocated fund as much as Rp 745,132.4 billion (53.5 percent of central government expenditure). The amount is allocated, among other things, to: (1); the fulfillment of the the Government obligations such as the payment of pension benefits, health insurance contributions and social security employment of civil servants, and debt interest payment obligations; (2) and (3) provision of reserve funds for urgent needs, such as the anticipation of risk arising from the mismatched macro-economic assumption and realizations, and natural disaster reserve fund. The allocation of expenditure through BA BUN falls into several programs, i.e. debt management, management of subsidies, grants management, other expenditure management, and management of specific transactions.

KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK POLICY ON NON TAX REVENUE

Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI)

Dalam rangka mewujudkan penatausahaan penerimaan negara yang lebih mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien, Kementerian Keuangan membuat sistem penerimaan negara yang terintegrasi dengan menggunakan *single database* melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Saat ini sedang dijalankan MPN Generasi 2 (MPN G2).

Selaras dengan program Kementerian Keuangan tersebut, Ditjen Anggaran berkomitmen untuk mewujudkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat. Salah satu perwujudan misi tersebut adalah dengan membangun sistem *billing* penerimaan negara yang terintegrasi dengan MPN G2 melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).

Online Information System on Non Tax Revenue (SIMPONI)

To set the revenue administration to be more convenient, safe, fast, accurate, and efficient, the Ministry of Finance has introduced a system using a single integrated database via the State Revenue Module (MPN). At present, MPN Generation 2 (MPNG2) is in operation.

Aligned with the Ministry of Finance programs, DGB is committed to materializing non-tax revenues (PNBP) while maintaining optimum service to the public. One of which is building state revenue billing system integrated with MPN G2 through Online Information System for Non Tax Revenues (SIMPONI).



Penggunaan SIMPONI yang relatif sederhana (*simple*), mudah digunakan (*userfriendly*), aman (*safe*) dan mudah diakses (*accessible*), membawa dampak positif bagi penerimaan negara. Implementasi SIMPONI dapat membantu pencapaian target PNB. Berdasarkan data realisasi PNB, diketahui bahwa pembayaran PNB via SIMPONI di tahun 2014 mencapai Rp199,32 Triliun (51% dari total target PNB sebesar Rp386,95 Triliun). Sedangkan 49% lainnya adalah pembayaran PNB melalui *channel* non SIMPONI, seperti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS).

Fakta ini menandakan bahwa penggunaan SIMPONI diterima oleh Kementerian/Lembaga, perusahaan, maupun masyarakat yang bertindak sebagai Wajib Bayar/Wajib Setor PNB. Tersedianya fasilitas pembayaran 24 jam dan fasilitas penyetoran yang disediakan oleh *collecting agents*, antara lain ATM, *internet banking*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *teller* dan Kantor Pos membuktikan bahwa SIMPONI meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hingga saat ini telah ada 48 K/L yang telah mengimplementasikan SIMPONI.

Sebagai sistem pembayaran PNB, SIMPONI juga mengakomodasi integrasi dengan berbagai sistem pembayaran/ penyetoran PNB yang telah dibangun K/L melalui fasilitas *web service*. Dengan integrasi ini, data yang ada di K/L dapat dialirkan ke SIMPONI (dan sebaliknya) sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan (*entry data*). Saat ini sedang dijalankan proses integrasi antara SIMPONI dengan sistem pembayaran yang ada di beberapa K/L, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian ESDM.

Proses integrasi ini akan terus dilakukan pada tahun mendatang bersama dengan K/L lainnya. Pada pengembangan selanjutnya, implementasi SIMPONI diharapkan dapat berperan dalam memaksimalkan penerimaan mineral dan batubara (*minerba*). Melalui integrasi antara sistem SIMPONI, Kementerian Keuangan dengan sistem *Minerba One Map Indonesia* (MOMI), Kementerian ESDM,

SIMPONI, which is user friendly, safe and accessible, generates positive impacts on the state revenues. Therefore, its implementation has helped achieve the target of non-tax revenue. The data on PNB realization indicate that SIMPONI helped to collect non-tax payments amounting to Rp 199.32 trillion (51% of Rp 386.95 trillion, the total target of non-tax revenue) in 2014. While 49% of which were non-tax payments through non SIMPONI channels, such as the Non-Tax Payment Slip (SSBP) and Real Time Gross Settlement (RTGS).

This fact indicates that the use of Simponi was well received by the ministry/agency, company, or public as the PNB Payers. The 24-hour payment/deposit facility provided by the collecting agents, among others, are ATM, internet banking, Electronic Data Capture (EDC), tellers and the Post Office prove that SIMPONI has improved services to the public. So far, 48 ministries/agencies have implemented the system.

As a PNB payment system, SIMPONI also accommodates integration with various payment/deposit systems for PNB through web service facilities. This allows the existing data in the ministry/agency to be streamed to SIMPONI (and vice versa) to avoid duplication of work (data entry). At present, an integration process between SIMPONI and existing payment systems in some ministries/agencies such as the Ministry of Agriculture, Ministry of Justice and Human Rights, Ministry of Health, and the Ministry of Energy and Mineral Resources is underway.

In the future, this integration process will be sustained with other ministries/agencies. Further, the implementation of SIMPONI is expected to maximize the reception of mineral and coal (*minerba*). Integrated with SIMPONI, the Ministry of Finance with the system *Minerba One Map Indonesia* (MOMI), Ministry of ESDM expected that it enables the arrangement of potential and

diharapkan tersusun data potensi dan realisasi penerimaan sektor pertambangan umum.

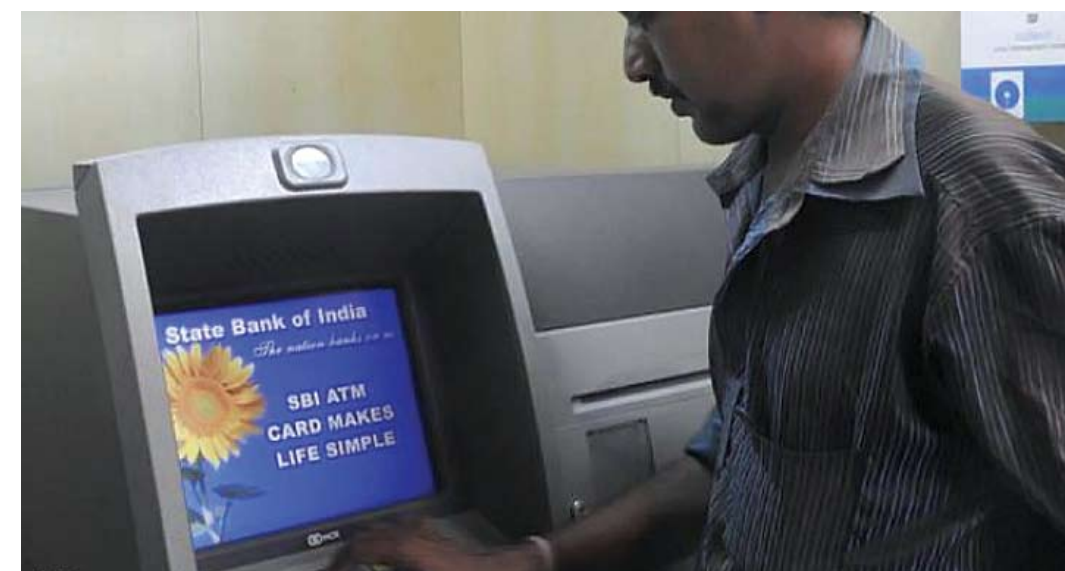
Dengan *database* tersebut, dapat diketahui selisih antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan sektor minerba sehingga dapat diformulasikan langkah-langkah lebih lanjut untuk meminimalkan kerugian penerimaan minerba. Dengan demikian, SIMPONI membantu meningkatkan kualitas penatausahaan data PNB dan peningkatan penerimaan negara, dan secara tidak langsung berperan aktif dalam menjaga sumberdaya alam Indonesia.

Melalui akses *database history* yang disediakan oleh SIMPONI diharapkan K/L dapat memetakan jenis/tarif PNB yang *idle* dan jenis/tarif PNB yang berpotensi untuk ditingkatkan penerimaannya. Tarif yang terlalu kecil dibandingkan dengan biaya operasional satker dalam memberikan pelayanan bisa diusulkan untuk segera dilakukan perubahan. Hasil analisa juga dapat digunakan oleh K/L dalam menyusun regulasi PNB yang lebih *up to date*, sehingga mampu menyumbang penerimaan negara yang lebih besar. Artinya, secara tidak langsung akan terbangun bersama-sama *database* target dan realisasi PNB yang komprehensif sehingga kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan PNB semakin meningkat.

realization of revenue from the general mining sector.

The use of the database helps to explore the discrepancies between the potential revenue and actual revenues from the coal and mineral mining (*minerba*) sector. This will assist to formulate further measures to minimize losses in *minerba* revenue. In brief, SIMPONI improves the quality of the data administration of non-tax revenues and increases the state revenue which indirectly preserves Indonesia's natural resources.

Through database history access provided by the SIMPONI, Ministry/Agency is expected to map the types / rates of non-tax revenue which are idle and the ones which potentially increase revenues. The rates that are too small compared to the operating costs of working unit should be proposed for immediate change. Results of analysis can also be used by Ministry/Agency to draft more up-to-date non-tax revenue, so as to contribute greater revenue. Thus, it will build shared comprehensive database of non-tax revenue target and realization. This will eventually improve the quality of planning and policy formulation increasing of non-tax revenue.



PRESTASI ATAS CAPAIAN PNBP TERHADAP TARGET PENERIMAAN NEGARA

COLLECTED NON-TAX REVENUE AND ITS CONTRIBUTION TO THE TARGET STATE REVENUE

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. PNBP terdiri atas penerimaan sumber daya alam (migas dan non migas), pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP Lainnya (antara lain pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan DMO, pendapatan jasa dan perijinan, pengelolaan *treasury single account* dan pendapatan jasa kepolisian) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Target PNBP Tahun 2014

Jumlah target PNBP tahun 2014 merupakan jumlah PNBP nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013.

Non-Tax Revenue (PNBP) is all Central Government revenue which is not derived from tax revenues and grants. PNBP consists of natural resources (oil-gas and nonoil-gas), the profit share of State-Owned Enterprises (SOEs), Other non-tax revenues (among others, mining products sales revenue, DMO revenue, services and licensing revenue, management of the treasury single account and police service fees) and Public Service Agency (BLU) revenue.

Target of Non-Tax Revenue 2014

The target of PNBP 2014 is the total national non-tax revenue stipulated in Law No. 23/ 2013 on State Budget for Fiscal Year 2014 and Law No. 12/ 2014 concerning Amendment to Law No. 23/ 2013.

Berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan PNBP yang ditempuh di tahun 2014, PNBP diperkirakan mencapai Rp386.946,4 miliar dalam APBN-P 2014, atau mengalami penurunan sebesar Rp1.554,7 miliar atau 0,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2014. Target PNBP dalam APBN dan APBN-P 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

PNBP, as based on the changes in basic macroeconomic assumptions and its principle policies in 2014, is estimated to reach Rp 386.946,4 billion in Revised State Budget 2014, marking the decrease by Rp 1.554,7 billion or 0.4 percent of the target set out in Budget 2014. The table below illustrates the target of non-tax revenue in the state budget 2014 and Revised State Budget 2014.

Target PNBP dalam APBN dan APBN-P 2014
Target of non-tax revenue in the state budget 2014 and Revised State Budget 2014
(dalam milyar Rupiah)

URAIAN	APBN	APBN 2015
Penerimaan Negara Bukan Pajak	385.391	386.946
A. Penerimaan SDA	225.954	241.115
1. Migas	196.508	211.668
a. Minyak Bumi	142.943	154.750
b. Gas Alam	53.565	56.918
2. Non Migas	29.446	29.446
B. Bagian Laba BUMN	40.000	40.000
C. PNBP Lainnya	94.088	84.968
D. Pendapatan BLU	25.349	20.863

Realisasi PNBP Tahun 2014

Berdasarkan catatan Buku Merah per 30 Desember 2014 dan catatan Direktorat PNBP per 31 Desember 2014, realisasi PNBP tahun 2014 mencapai Rp387,4 triliun atau sebesar 100,1% dari target dalam APBN-P 2014. Capaian PNBP tahun 2014, antara lain dipengaruhi oleh:

1. Realisasi PNBP SDA Sektor Migas Tahun 2014 sebesar 102,5% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014 yang disebabkan lebih tingginya realisasi nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2014 yaitu sebesar Rp11.868,67 per USD dibandingkan dengan asumsi nilai tukar yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014 sebesar Rp11.600,00 per USD. Selain itu, juga disebabkan adanya upaya pemerintah dalam hal penagihan piutang SDA Migas tahun sebelumnya yang penyelesaiannya diterima pada tahun 2014.

Actual Figure of Collected Non-Tax Revenue (PNBP) 2014

As stated by the Buku Merah (Semester Budget Report) per December 30, 2014 and Non-Tax Revenue Directorate notes per December 31, 2014, the actual figure of collected non-tax revenue in 2014 reached Rp387.4 trillion or 100.1% of the target in Revised Budget 2014. The increase in collected non-tax revenue in 2014, among other things, was influenced by:

1. The actual collection in 2014 amounted to 102.5% of the estimated revenue set forth in the Revised Budget 2014 due to higher exchange rate of rupiah against the USD in 2014 amounting to Rp 11,868.67 per USD compared with the previously assumed Rp 11,600.00 stated in the Revised Budget 2014. In addition, the government's drive to intensify the collection of accounts receivable in SDA oil and gas sector of previous year settled in 2014. However, the well-performed target of



- Tingginya realisasi SDA Migas, tidak dibarengi dengan tercapainya target SDA Non Migas. Hal ini antara lain terutama disebabkan turunnya harga komoditas batu bara dan mineral.
2. Tercapainya pendapatan bagian laba BUMN yang dilakukan antara lain melalui upaya optimalisasi *pay out ratio* dividen BUMN dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing BUMN,
 3. Optimalisasi PNBPN lainnya dan pendapatan BLU, melalui upaya peningkatan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan pelayanan dan penyempurnaan peraturan di bidang PNBPN lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU), serta revisi dasar hukum jenis dan tarif PNBPN.

- oil and gas natural resources was not followed by the one of Non Oil and gas natural resources. The unachieved target was partly due to falling commodity prices, especially coal and minerals.
2. To achieve the shared profits revenue of SOEs, optimizing pay out ratio of SOE dividend was done while considering the financial condition of each SOEs.
 3. The effort to optimize other PNBPN and BLU revenues was realized through improving the intensification and extension activities, promoting service and fixing regulations in PNBPN and BLU as well as revising the legal basis of the types of tariff of non-tax revenue.

(dalam milyar Rupiah)

URAIAN	APBN	Realisasi sampai 31 Des	APBNP
PNBPN	386.945	387.383	100,11
A. Penerimaan SDA	241.114	242.753 *)	100,68
1. Migas	211.668	216.874	102,46
a. Minyak Bumi	154.750	141.058	91,15
b. Gas Alam	56.918	75.816	133,20
2. Non Migas	29.446	25.879	87,89
B. Bagian Laba BUMN	40.000	40.314 *)	100,79
C. PNBPN Lainnya	84.968	82.213 **)	96,76
D. Pendapatan BLU	20.863	22.103 **)	105,94

*) Realisasi per 31 Desember 2014 (Catatan Dit. PNBPN)

**) Realisasi per 30 Desember 2014 (Buku Merah)



PELIMPAHAN SEBAGAI WEWENANG PNBPN KEPADA DITJEN PERBENDAHARAAN

SHARED RESPONSIBILITIES CONCERNING NON-TAX REVENUES WITH THE DIRECTORATE GENERAL OF TREASURY

Salah satu tujuan penting dari reformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan adalah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan harus dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Untuk itu reformasi kelembagaan merupakan hal yang terus bergerak menyesuaikan dengan dinamika organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya adaptasi institusi dalam kerangka reformasi kelembagaan, maka tugas dan fungsi setiap lini organisasi terus dievaluasi.

Dinamika di dalam reorganisasi dan penyesuaian tugas dan fungsi Kementerian Keuangan meliputi perubahan horisontal antar unit eselon I dan vertikal di dalam masing-masing unit eselon I, dengan demikian tugas dan fungsi suatu unit eselon I dapat dilaksanakan oleh unit lain (termasuk unit vertikalnya), sesuai penugasan dari Menteri Keuangan. Sebagai implementasi pendelegasian sebagian tugas antar unit eselon I, DJA dan DJPB menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran Nomor PER-26/PB/2013 dan PER-02/AG/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPB di Bidang Penganggaran dan PNBPN.

Salah satu tugas yang didelegasikan DJA kepada Kantor Wilayah DJPB adalah monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBPN yang ruang lingkupnya meliputi penyetoran PNBPN ke kas Negara dan penggunaan belanja yang bersumber dari PNBPN. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBPN bertujuan untuk memastikan PNBPN yang diterima disetorkan ke Kas Negara tepat waktu dan tepat jumlah, serta menjamin kepatuhan satuan kerja Kementerian/Lembaga

One of the objectives of institutional reform in the Ministry of Finance is optimizing public services by practicing good governance to produce effective, efficient and economical services. To achieve the objective, the institutional reform should keep adjusting with the dynamics of the organization to achieve its given purpose. To support the institutional adaptation efforts within the framework of institutional reforms, the duties and functions of each line of the organization continue to be evaluated.

The dynamics in the reorganization and adjustment of the duties and functions of the Ministry of Finance include horizontal and vertical changes especially among units in echelon I. This rotation will allow any duties and functions of a particular unit in echelon I can be performed by the other units (including the vertical units) as assigned by the Minister of Finance. To implement the delegation of tasks between the units echelon, DGB and DJPB issued Regulation of Director General of Treasury and the Director General of Budget No. PER-26 / NT / 2013 and PER-02 / AG / 2013 on General Guidelines for the Task Execution in the Regional Office of DJPB in Budgeting and Non-tax revenue.

One of the responsibilities partially delegated by DGB to the DJPB Regional Office is the monitoring and evaluation of the management of PNBPN which includes depositing non-tax revenues to the state treasury and the use of expenditures that comes from non-tax revenues. The monitoring and evaluation PNBPN management aims to ensure that non-tax revenues received is remitted to the State Treasury at the right time and in the right amount, and to ensure that the working unit of the PNBPN-using Ministry / Agency and work unit of BLU PNBPN complies with the

pengguna PNBPN maupun satuan kerja BLU dalam menggunakan dana PNBPN yang dikelolanya sesuai ketentuan. Dalam hal ini monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBPN diamanatkan kepada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2014, Kanwil DJPB telah melaksanakan monitoring dan evaluasi PNBPN rutin yang laporannya dikompilasi oleh Kantor Pusat DJPB dan diteruskan kepada DJA (Direktorat PNBPN). Namun demikian format monitoring dan evaluasi selama ini dirasa masih kurang efisien dan efektif. Begitupun laporannya, dengan format yang sekarang laporan money masih dirasa kurang praktis dan sistematis.

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan format monitoring dan evaluasi PNBPN yang lebih efisien dan efektif dengan memperhatikan kebutuhan pusat dan kemampuan teknis di lapangan, maka telah disusun *draft* surat edaran bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pelaksanaan Tugas Monitoring dan Evaluasi serta Bimbingan Teknis PNBPN oleh Kanwil DJPB. *Draft* tersebut telah dikoreksi dan disampaikan kembali ke DJPB. Namun, sampai dengan saat ini belum ada *progress* penyelesaian. Dengan petunjuk teknis dimaksud, diharapkan monitoring dan evaluasi PNBPN dapat memberi manfaat bagi semua pihak, baik DJA (Direktorat PNBPN), Kantor Pusat DJPB, maupun Kanwil DJPB.

prevailing regulation in using the fund. In this case the monitoring and evaluation of the management of non-tax revenues was mandated to the Budget Implementation Supervision Section I, Regional Office of the Directorate General of Treasury.

During the implementation in 2014, the Regional Office of DJPB has conducted regular monitoring and evaluation of PNBPN in which the report was prepared by the Head Office of DJPB and forwarded to GDB (PNBPN Directorate). However, it turned out that the monitoring and evaluation format remains less efficient and effective. Concerning the report, the current report format on money is considered impractical and unsystematic.

Therefore, as part of the drive to develop more efficient and effective format for monitoring and evaluating PNBPN while considering the needs of the center and technical capabilities in the field, a draft of joint circular letter was prepared by the Director General of the Budget and Director General of Treasury on Technical Guidelines for Implementation Mechanism of Monitoring and Evaluation Task and Technical Guidance of PNBPN by DJPB Regional Office. The draft has been corrected and resubmitted to DJPB. However, no completion progress has been made. The technical guidelines are expected to ensure that the monitoring and evaluation of non-tax revenues benefits all parties, both DGB (Directorate of PNBPN), DJPB Head Office and DJPB Regional Office as well.



PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PNBPN NON-TAX REVENUE (PNBPN) BILL

Kementerian Keuangan telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). RUU tersebut telah selesai dilakukan harmonisasi di tingkat Pemerintah dan telah disampaikan Menteri Keuangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat disampaikan kepada Presiden dan dibahas bersama dengan DPR RI. Dalam RUU pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN dimaksud, diamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

- Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Jenis, Rincian Jenis, dan Tarif atas Rincian Jenis PNBPN.
- Peraturan Pemerintah tentang Mitra Instansi Pengelola PNBPN
- Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBPN
- Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PNBPN
- Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Keringanan PNBPN

The Ministry of Finance has prepared a Bill to replace Law No. 20 of 1997 regarding Non-Tax Revenue (PNBPN). Towards the bill, alignment has been completed at the level of Government and submitted by Minister of Finance to the President through the Ministry of Justice and Human Rights for further discussion with the House of Representatives. The bill entails a number of regulations for implementation as follows:

- Government Regulation on the enactment of type, type details, and Tariffs on PNBPN.
- Government Regulation on Partner and Managing Agencies of PNBPN
- Government Regulation on Supervision Procedures of PNBPN
- Government Regulation on Procedures for Proposing and Settling Objection over PNBPN
- Government Regulation on Procedures for Granting Waivers of PNBPN



- f. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan PNB (meliputi materi: perencanaan atas pengelolaan PNB, pelaksanaan atas pengelolaan PNB, pertanggungjawaban atas pengelolaan PNB, syarat dan tata cara pengembalian PNB);

Dalam RUU pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB diamanatkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Maka agar RUU pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB setelah ditetapkan menjadi Undang-undang dapat segera dilaksanakan, maka secara paralel harus disusun peraturan pelaksanaan dari RUU tersebut.

Dalam rangka mempercepat proses penyusunan peraturan pelaksanaan dari RUU pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB, pada tahun 2014 melalui Kepditjen Anggaran Nomor KEP-24/AG/2014 telah dibentuk Tim Penyusunan Peraturan Pelaksanaan RUU pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB.

Pada tahun 2014 direncanakan disusun 2 (dua) draft rancangan peraturan pelaksana berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari 4 (empat) peraturan pelaksana yang telah diamanatkan dalam RUU pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB, sebagai berikut:

1. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Jenis, Rincian Jenis dan Tarif Atas Rincian Jenis PNB,
2. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyusunan 2 (dua) *draft* RPP tersebut dilakukan oleh Tim Penyusun dengan melakukan pembahasan dan penyusunan *Draft* RPP dengan melibatkan para pejabat dan pegawai dari Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Biro Hukum Setjen), dengan

- f. Government Regulation on Management of PNB (including planning for the management of PNB, the implementation of PNB management, accountability for PNB management, the terms and procedures for PNB return);

In the amendment bill to Law No. 20 of 1997 on PNB, it was mandated that the implementation Regulation of this Law shall be passed no later than 3 (three) years following the promulgation of this law. Therefore, the amendment bill to Law No. 20 of 1997 on non-tax revenue can be implemented immediately once it is set into law. This implies that the exercise regulation of the bill should be made available.

To enable accelerated process of drafting the exercise regulation for the amendment bill to Law No. 20 of 1997 on non-tax revenue, through Decree of DGB No. KEP-24 / AG / 2014, the drafting team for the exercise Regulation of the amendment bill to Law No. 20 of 1997 on non-tax revenues was established.

In 2014, the government planned to prepare 2 (two) drafts of exercise regulations in the form of Government Regulation Draft (RPP) of the four (4) exercise regulations mandated in a draft amendment to Law No. 20 of 1997 on non-tax revenue, as follows:

1. Draft of Government Regulation Draft on the Procedure for setting type, detailed types and tariffs on type details of PNB,
2. Draft of Government Regulation Draft on the Management of Non Tax Revenue.

To prepare the 2 (two) drafts of Government Regulation Draft, the Drafting Team conducted a series of discussions with the officials and employees of the Ministry of Finance (DG Budget, DG Treasury, and the Legal Bureau of Secretariat General), taking into account the core subjects set

mempertimbangkan hal – hal pokok yang telah diatur dalam RUU pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB, sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan penyesuaian dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Paket Undang-Undang keuangan Negara.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan PNB saat ini, antara lain terkait temuan BPK RI yang terus berulang yaitu pungutan tanpa dasar hukum, PNB terlambat/ tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNB, dan PNB dikelola di luar mekanisme APBN.
3. Perbaikan pengelolaan PNB dan mengantisipasi perkembangan PNB ke depan, meningkatkan pelayanan PNB di K/L, optimalisasi PNB, sebagai alat kebijakan fiskal, penguatan landasan hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta penerapan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penyusunan 2 (dua) *draft* RPP yang dilakukan, Tim Penyusun telah berhasil menyusun 2 (dua) *draft* RPP dimaksud. Draft RPP akan terus disesuaikan selaras dengan hasil pembahasan RUU pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNB dengan DPR RI yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2015. Sebagai informasi bahwa RUU tersebut telah menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2015.

in a draft amendment to Law No. 20 of 1997 on non-tax revenue, as follows:

1. Alignment and Adjustment with the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the package of State Finance Law.
2. The issues addressed in the management of the current non-tax revenues, among other things, are related to the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia's recurring findings i.e. unauthorized fees, late paid/unpaid PNB to the State Treasury, the direct use of PNB and PNB managed beyond the budget mechanism.
3. Improving management of non-tax revenue and anticipating the development of non-tax revenue in the future, improving service of PNB in Ministry/Agency, optimizing non-tax revenue as a tool of fiscal policy, reinforcing the legal basis, improving transparency and accountability as well as the application of information technology.

Endorsed by the results of the discussion and the preparation of 2 (two) drafts of the Draft Governmental Regulation (RPP), the Drafting Team has managed to compile two (2) given drafts of Draft Government Regulation. The draft will further be adjusted to fit the results of the discussion of a draft amendment to Law No. 20 of 1997 on non-tax revenue with the House of Representatives. The discussion is planned to be held in 2015. To note, the bill has been listed as priority for National Legislation Program (Prolegnas) 2015.





Penandatanganan
Direktorat Jend

ing Sutikno Hamet,
arta, Selasa 3 Januari 2015

KALEIDOSKOP 2014

KALEIDOSCOPE 2014



MUDAHNYA PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP SECARA ELEKTRONIK

FRIENDLY ELECTRONIC PAYMENT /DEPOSIT OF NON-TAX REVENUE (PNBP)



Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik pada tanggal 10 Februari 2014, dan telah dilakukannya *Launching* Transaksi Perdana Penerimaan Negara menggunakan Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi ke-2 (MPN G-2) pada tanggal 27 Februari 2014, maka pembayaran/penyetoran penerimaan negara, saat ini telah dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*.

Pejabat Kementerian Keuangan dan Bank BRI saat *Launching* Transaksi Perdana melalui Sistem MPN G-2 di Banjarmasin, 27 Februari 2014. *Launching* dilakukan serentak di Jakarta, Banjarmasin dan Pasuruan, terhubung melalui *video conference* dan disiarkan langsung melalui *live streaming* oleh BPPK TV yang terkoneksi dengan situs resmi DJA.

Guna mendukung penerapan cara bayar elektronik tersebut, Direktur Jenderal Anggaran telah menetapkan Perdirjen Anggaran nomor PER-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik pada tanggal 27 Februari 2014. Selaku pengelola *billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Non Anggaran (Pengembalian Belanja, Pengembalian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, Perhitungan Pihak Ketiga dan Pengembalian Sisa Hibah), Direktorat Jenderal Anggaran telah

Electronic payment/deposit of non-tax revenue can be done using a billing code following the the enactment of the Finance Minister Decree Number 32 Year 2014 concerning State Revenue Electronic System on February 10, 2014. The launching of initial Transactions using the Module System for State Revenue Generation 2 (MPN G-2) was done on 27 February 2014.

The Officials of the Ministry of Finance and and BankB RI during the Launching of initial Transaction through the MPNG-2 System in Banjarmasin, February 27, 2014. Video conferenced, the event was done simultaneously in Jakarta, Banjarmasin and Pasuruan and was live streamed by BPPK TV connected with the official site of DGB.

To support the implementation of the electronic payment method, the Director General of the Budget issued the Regulation of DGB no. PER-1/AG/2014 on Procedures for Payment/Remittance of Non- Tax Revenue and Non-Budget revenue by Electronic system on February 27, 2014. As the billing manager of non-tax revenue and non-budget revenue (expenditure Returns, Refunds of petty cash/additional petty cash, third party calculation and unused Grants return), Direktorat Jenderal Directorate General of Budget has provided Billing System as part of online PNBPN information system (SIMPONI) to be accessed via the official website of DGB or direct link to www.simoni.kemenkeu.go.id.



menyediakan Sistem *Billing* sebagai bagian dari Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI), yang dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Anggaran atau tautan langsung melalui alamat www.simoni.kemenkeu.go.id

Dengan penerapan sistem baru ini, kini Wajib Pajak, Wajib Bayar maupun Wajib Setor dapat melakukan pembayaran/penyetoran penerimaan negara melalui berbagai saluran pembayaran yang disediakan oleh Bank BRI, baik melalui *teller* (*Over The Counter*), ATM (*Automatic Teller Machine*), EDC (*Electronic Data Capture*), maupun *internet banking*. Jika segala persiapan berjalan lancar, dalam waktu dekat beberapa bank lain akan bergabung untuk turut memberikan pelayanan transaksi penerimaan negara. Bahkan di akhir tahun seluruh bank yang beroperasi di Indonesia akan bergabung dalam barisan *collecting agents*, mendukung pengoperasian sistem pembayaran elektronik baru ini.

Transaksi perdana melalui Sistem MPN G-2 menggunakan saluran pembayaran Internet Banking, ATM (*Automatic Teller Machine*), EDC (*Electronic Data Capture*) dan Teller (*Over The Counter*) oleh Wajib Pajak, Wajib Bayar dan Wajib Setor di Banjarmasin, 27 Februari 2014.

Sejak dilakukannya *launching* hingga berita ini diturunkan, telah milyaran rupiah penerimaan negara diterima di Kas Negara melalui sistem MPN G2. Keseluruhan transaksi yang terjadi dapat dipantau asal, jenis maupun jumlahnya secara *real time*. Dengan demikian harapan akan terwujudnya sistem pengadministrasian penerimaan negara yang handal, transparan dan akuntabel telah semakin dekat. Untuk itu, mari kita dukung dan sukseskan penerapan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik !



The newly implemented system enables Taxpayers, the compulsory Payers and depositors to make payment/deposit for state revenue through various payment outlets provided by Bank BRI, either via teller (*Over The Counter*), ATM (*Automated Teller Machine*), EDC (*electronic DataCapture*), or internet banking. Furthermore, by the end of the year all banks operating in Indonesia will join the group of collecting agents to support the operation of this new electronic payment system.

The maiden transaction with MPN G-2 system was done through Internet Banking payment line, ATM (*Automated Teller Machine*), EDC (*Electronic Data Capture*) and Teller (*Over the Counter*) by the taxpayers, the compulsory Payers and depositors in Banjarmasin on February 27, 2014.

Since its launching to date, MPN G2 has managed to collect billions of dollars into the state treasury. Overall transactions can be monitored by its origin, type and quantity in real time. Thus it facilitates reliable, transparent and accountable administration system of state revenue. Therefore, let us support the Electronic System application of the State Revenue!



PERBAIKAN KUALITAS PENGANGGARAN MELALUI IMPLEMENTASI STANDAR BIAYA

QUALITY IMPROVEMENTS THROUGH IMPLEMENTATION OF STANDARD COST BUDGETING



This year PMK SBM TA 2015 dapat diselesaikan di awal tahun. Namun demikian, upaya improvement senantiasa dilakukan. “Tahun depan, SBM dan SBK TA 2016 diharapkan bisa selesai lebih cepat, kalau bisa sebelum pagu indikatif”, kata Direktur Jenderal Anggaran, Askolani dalam sambutan acara Sosialisasi Standar Biaya TA 2015 di Dhanapala (7-8 April 2014). Acara ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai standar biaya. Adapun peserta sosialisasi tersebut terdiri atas pegawai DJA serta perwakilan Kementerian/ Lembaga.

Materi yang disosialisasikan pada acara ini mencakup Standar Biaya Masukan TA 2015 (termasuk revisi SBM TA 2014) beserta Standar Biaya Keluaran TA 2015. Penyampaian materi diskusi dimoderatori oleh Dendy Koska (Kasubdit Evaluasi Kinerja Penganggaran) serta dipaparkan oleh Agung Widiadi (Direktur Sistem Penganggaran), Langgeng Suwito (Kasubdit Standar Biaya) dan Gede Ginarya

This year saw accomplishment of PMK SBM FY 2015 at the beginning of the year. However, improvement drive should always be maintained. “Next year, SBM and SBK FY 2016 is expected to be completed more quickly, before the the indicative ceiling”, said Director General of Budget, Askolani in his remark during the Dissemination of Standard Cost FY 2015 in Dhanapala (7-8 April 2014). The event, which was attended by DGB employees and representatives of the Ministries/Agencies aimed to assure sufficient understanding of the cost standard.

The event disseminated matters related to input cost standard FY 2015 (including revised SBM FY 2014) and Output Standard Cost FY 2015. Dendy Koska (Kasubdit of Evaluation of Budgeting Performance) moderated the session which presented three presenters i.e. Agung Widiadi (Director of Budgeting System), Langgeng Suwito (Kasubdit of Cost Standard) and Gede Ginarya (Kasubdit of Budgeting Information Technology). The cost

(Kasubdit Teknologi Informasi Penganggaran). Standar biaya merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin alokatif efisiensi dan operasional efisiensi belanja negara. Melalui acara ini, diharapkan seluruh *stakeholders* mampu memahami standar biaya untuk kepentingan penyusunan RKA-K/L.

Dalam diskusi panel disampaikan bahwa terdapat dua kebijakan yang menjadi *highlight* dalam Standar Biaya TA 2015. Kebijakan pertama adalah pembatasan honorarium tim. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi dari tim reformasi birokrasi. Pembatasan honorarium akan disesuaikan dengan tingkatan eselon tiap individu. Kendati demikian, hal ini tidak berlaku bagi tim lintas kementerian yang memiliki prioritas strategis. Kebijakan kedua yang menjadi *concern* adalah wacana untuk menaikkan insentif rapat dalam kantor. Selama ini, rapat luar kantor dianggap sebagai pemborosan lantaran pemanfaatan fasilitas yang kurang optimal. Alokasi sewa hotel dapat dialihkan untuk tambahan insentif pegawai. Ke depannya diharapkan, penghematan belanja operasional semacam ini dapat dialokasikan untuk belanja lain yang menunjang pembangunan nasional.

Perencanaan anggaran belanja yang efektif tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Seperti yang diketahui bersama, salah satu ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah kesesuaian RKA-K/L dengan standar biaya. Setiap Kementerian/ Lembaga tentunya memiliki item atau komponen belanja yang berbeda. Atas dasar itu, Dirjen Anggaran berharap agar tiap Kementerian/ Lembaga bisa lebih cepat dalam pengumpulan usulan SBM dan SBK di tahun mendatang.

standard is one of the important instruments to ensure allocative efficiency and operational efficiency of state expenditures. This event was hoped to help all stakeholders to understand the cost standard fee for RKA-K / L preparation.

The panel discussion elaborated two highlighted policies in the Standard Cost FY 2015. The first policy is the limitation of fee for team which was the output of the evaluation of bureaucratic reform team. The limitation will be adjusted with each individual echelon. Nevertheless, this limitation does not apply to cross-ministerial teams which have strategic priorities. The second policy is the discourse to raise incentives for office meeting. As normally practiced, the meeting outside the office is cost consuming because of less optimal utilization of facilities. The hotel expense can be allotted for additional employee incentives.

In the future, the savings of operational expenditure can be allocated to other expenditures that support the national development. An Effective budget planning requires the cooperation of various parties. The suitability of RKA-K / L with the cost standard is a partial focus of the RKA-K / L Review. Each Ministry / Agency must have different items or expenditure components. Therefore, the Directorate General of Budget encourages each ministry / agency to submit SBM and SBK proposals in the coming year.

TIM BARU UNTUK KINERJA LEBIH BAIK

NEWLY-BUILT TEAM FOR BETTER PERFORMANCE



Bertempat di Aula Ruang Rapat Direktur Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet hari ini telah digelar serah terima jabatan pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Kamis (27/4). Sekaligus dilaksanakan pula penandatanganan kontrak kinerja bagi pejabat eselon II yang baru dilantik. Acara dimaksud merupakan rangkaian seremoni dari pelantikan pejabat eselon II oleh Menteri Keuangan pada hari Selasa (25/3).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Anggaran meminta kepada seluruh pejabat DJA untuk terus melakukan evaluasi atas kelemahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing selama ini. Pelaksanaan tugas DJA ke depan diharapkan bisa berjalan lebih efisien, efektif, dan akuntabel. "Tugas kita semua untuk saling mengingatkan hal ini dengan cara mereviu, apakah tugas kita selama ini masih ada kelemahan", kata Askolani.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/UP.11/2014 tanggal 19 Maret 2014 telah ditetapkan mutasi dalam jabatan eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal

Located in the meeting hall of Sutikno Slamet Building, hand-over ceremony among echelon II officials in DGB was conducted today, Thursday (27/4). At the same time, the newly installed officials signed the performance contract as a part ceremony for installment of echelon II officials by the Minister of Finance on Tuesday (25/3).

Conveyed in his speech, the Director General of Budget called all official of DGB to continue evaluating the weaknesses when performing duties. He expected that the implementation of DGB tasks run more efficiently, effectively and accountably. "Our job is to remind each others by reviewing for possible loopholes when performing duties," said Askolani.



Anggaran. Dalam keputusan tersebut dilantik 6 (enam) pejabat eselon II. Mariatul Aini diangkat sebagai Sekretaris Ditjen Anggaran (sebelumnya Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA).

Selanjutnya, Kunta Wibawa Dasa Nugraha diangkat menjadi Direktur Penyusunan APBN (promosi dari Kepala Bidang Forum Multilateral Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF). Lalu, Purwanto diangkat sebagai Direktur Anggaran II (promosi dari Kepala Subdirektorat Anggaran II-A DJA). Kemudian, Dwi Pudjiastuti Handayani diangkat sebagai Direktur Anggaran III (sebelumnya Direktur Anggaran II DJA). Adapun Anandy Wati diangkat sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (sebelumnya Sekretaris DJA). Terakhir, Agung Widiadi diangkat sebagai Direktur Sistem Penganggaran (promosi dari Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II DJA). Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran belum diisi dan Mariatul Aini ditugaskan pimpinan DJA menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur HPP.

The Ministry of Finance Decree No.64/KMK.01/UP.11/2014 dated 19 March 2014 is the basis for post transfers among echelon II in DGB. As stated in the decree, 6 (six) echelon II officials were installed. Mariatul Aini (formerly the Director of Harmonization of DGB Budgeting Regulation) was named the Secretary of the Directorate General of Budget

Further, Kunta Wibawa Dasa Nugraha (formerly the head of Multilateral Forum of Policy Center for Climate Change and Financing and Multilateral BKF) was promoted as the director of State Budget Compilation. Subsequently, Purwanto was appointed as the Director of the Budget II (used to serve as the Head of the Budget subdirectorate II). Next, Dwi Pudjiastuti Handayani was named the Director of Budget III (previously the Director of the Budget II DGB). Meanwhile, Anandy Wati was promoted to be the Director of Non-Tax Revenue (formerly the Secretary of DGB). At last, Agung Widiadi was posted as the Director of Budgeting System (formerly the subdirectorate head II of the State Budget Compilation of DGB). No one took the post of Director of Harmonization of budgeting plans. Temporarily, Mariatul Aini was assigned to be the caretaker of HPP director.

TRAINING OF TRAINER APLIKASI SPAN HYPERION

TRAINING OF TRAINER FOR SPAN HYPERION APPLICATION



Dalam rangka percepatan implementasi SPAN di lingkungan Ditjen Anggaran, Selasa 20 Mei 2014 telah dilaksanakan *Training of Trainer Hyperion Planning and Budgeting*. Acara yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung Sutikno Slamet tersebut dibuka oleh Direktur Sistem Penganggaran, Agung Widiadi. Sejumlah pejabat dan pegawai dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Sistem Penganggaran dan pegawai dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menjadi peserta dalam training ini.

Dalam sambutan pembukaan acara ini, Direktur Sistem Penganggaran mengharapkan agar *training of trainers* ini sebagai salah satu kegiatan untuk menghasilkan *trainer-trainer* aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Hyperion yang handal. Selanjutnya, para *trainer* ini menyampaikan pengetahuan dan keterampilannya kepada *user* aplikasi SPAN Hyperion ini.

To accelerate the implementation of SPAN within the Directorate General of Budget, Training of Trainer on Hyperion Planning and Budgeting was held on Tuesday, May 20, 2014. Held in the Meeting Room on the 11th floor in the Sutikno Slamet building, the event was officially opened by Agung Widiadi, the Director of Budgeting System. A number of officials and employees of the Directorate of Non-Tax Revenues, Secretariat of the Directorate General of Budget, Directorate of Budgeting System and the employees of the Inspectorate General of the Ministry of Finance took part in this training.

When giving the opening remark, the Director of Budgeting Systems expected that the training of trainers produce capable trainers of Hyperion, the State Treasury and Budget System (SPAN) Application. Further, the trainers will share their skills and expertise to the users of SPAN Hyperion application.

Hyperion Team dari LG Consultant selaku pemateri menyampaikan beberapa materi antara lain:

- Budget Process Overview* (yang memaparkan Proses Penganggaran mulai dari fungsi perencanaan, persiapan, alokasi, revisi, sampai dengan monitoring dan evaluasi)
- Budget Process Overview-Business Requirements* (yang memaparkan beberapa aplikasi penganggaran yang terdiri dari aplikasi penyiapan APBN/APBN-P, proses revisi anggaran dan aplikasi monitoring dan evaluasi anggaran)
- Pemaparan alur pemrosesan APBN dan PNBPN pada aplikasi SPAN Hyperion serta tugas-tugas dari pengguna aplikasi dan format aplikasi

Sesi terakhir training diakhiri dengan uji coba penggunaan aplikasi SPAN Hyperion oleh peserta training dipandu oleh Hyperion Team. Dengan uji coba interaktif ini diharapkan para peserta dapat menguasai penggunaan aplikasi untuk proses penyusunan APBN dan aplikasi untuk PNBPN secara optimal serta memperoleh manfaat dari kehadiran aplikasi ini. Keinginan yang selama ini membuncah menunggu kehadiran SPAN pun

As the presenters, Hyperion Team from LG Consultant shared topics as follows:

- Budget Process Overview (which describes the budgeting process from the planning, preparation, allocation, revision, monitoring and evaluation)
- Budget Process Overview-Business Requirements (which pointed out some budgeting applications that consists of application for preparing National /state budget, the budget revision process and application for budget monitoring and evaluation)
- Exposing the chart of APBN and PNBPN processing on SPAN Hyperion application as well as tasks of application users and application format

During the last session of the training, trial use of SPAN Hyperion application was done by the participants. Assisted by the Hyperion Team, the interactive trial is expected to enable the participants to optimally use the application for APBN compiling process and PNBPN application. The application should give most benefits for the participants. The dream for the use of SPAN is soon materialized.



APLIKASI RKA-K/L ONLINE DEMI PENELAAHAN YANG LEBIH EFISIEN

RKA-K/L ONLINE APPLICATION FOR MORE EFFICIENT REVIEW

“Telah menjadi cita-cita dari Direktorat Jenderal Anggaran untuk bersama-sama mewujudkan pelaksanaan penelaahan secara *online* sehingga kendala yang selama ini muncul dapat diminimalisir”, kata Doddy Triwibowo, Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran DJA dalam Sosialisasi Aplikasi RKA-K/L *Online* di Aula lantai 11 Gedung Sutikno Slamet (8/7). Acara ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai penggunaan aplikasi penelaahan RKA-K/L secara *online* yang akan diimplementasikan untuk penyusunan anggaran 2015. Adapun peserta sosialisasi tersebut terdiri atas perwakilan 43 K/L yang memiliki kriteria jumlah satuan kerja tidak lebih dari 25 unit.

Sosialisasi ini dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi pemaparan mengenai proses bisnis penelaahan RKA-K/L *online* dan demo penggunaan aplikasi. Pemaparan sesi pertama menjelaskan tentang proses bisnis penelaahan RKA-K/L *online*. Terdapat perubahan yang cukup mendasar dari proses penelaahan RKA-K/L yang berlaku selama ini. Proses tatap muka akan diminimalisasi dan digantikan dengan interaksi digital melalui PC/

It has been long dream for the Directorate General of Budget to jointly implement online review to minimize the recurrent constraints,” said Doddy Triwibowo, the DGB Section Head of Budgeting Information System Development during the dissemination of Online RKA-K / L application which took place in the meeting hall on the 11th floor of Sutikno Slamet Building (8/7). The event was organized to disseminate the application of online RKA-K / L review to be implemented for the preparation of the budget 2015. The event was attended by the representatives of 43 Ministries/Agencies which have no more than 25 working units.

Split into two sessions, the dissemination was filled with presentation about business process of RKA-K /L online review and demonstration of the application use. A fairly fundamental change in the process of RKA-K /L review as Face-to-face process will be replaced by digitalized interaction through PC/laptop. The process of RKA-K /L review is initiated with invitation letter to Ministries/Agencies. The, Ministries/Agencies will upload ADK RKA-K /L to the online application. This stage automatically activates the RKA-K /L review forum. Subsequently, each user from Ministries/Agencies can initiate forum by

laptop. Proses penelaahan RKA-K/L ini dimulai dengan pengiriman surat undangan dari DJA ke K/L. Selanjutnya, K/L akan melakukan upload ADK RKA-K/L ke aplikasi *online*. Pada tahap ini otomatis forum penelaahan RKA-K/L mulai berlaku. Setelah itu, tiap-tiap user dari K/L dapat memulai forum dengan memilih salah satu dari dua pilihan yang ada (forum pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran).

Pada pemaparan sesi kedua diperagakan penggunaan aplikasi RKA-K/L *online*. Ada beberapa informasi penting yang berhubungan dengan aplikasi tersebut. Beberapa diantaranya mengenai konsep percakapan, pembatasan *user*, dan batas percakapan dalam forum. Konsep percakapan yang ada dalam aplikasi bukan berbentuk *chatting* yang *real time*, melainkan dalam bentuk *discussion forum* (seperti kaskus maupun yahoo group). User yang dapat mengakses aplikasi dibatasi sebanyak 2 *user* dengan persetujuan (*approve*) dari DJA. Sedangkan untuk kapasitas percakapan, jumlah diskusi dalam forum ini tidak dibatasi. Selama dirasa masih perlu pembahasan, maka forum tetap aktif hingga tidak perlu ada revisi lagi. Penutupan forum dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan dilakukan oleh unit teknis DJA.

Perbaikan sistem penelaahan RKA-K/L yang dilaksanakan DJA ini dilakukan dalam rangka mengefisienkan proses yang sudah ada. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tentunya menjadi penunjang utama dalam proses penelaahan RKA-K/L secara *online*. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2015 nanti, 43 K/L siap melaksanakan *piloting* aplikasi RKA-K/L *online* ini secara serempak. Adapun tahun 2016 seluruh proses penelaahan telah diimplementasikan untuk seluruh K/L



choosing one of the available two options (forum of budget ceiling and the forum of budget allocation).

The second session presented the use of online RKA-K /L application. The following are important points related to the application, among other things, are the concept of chattings, restriction of user, limitation of chattings in the forum. The concept of chattings in the application not in the form of real time chattings but discussion forum (like kaskus or yahoo group) meanwhile, the user eligible for accessing the application is limited to two users only by the DGB approval. No restriction is imposed for the capacity of chattings and number of discussions. When discussion is deemed necessary, the forum will remain active and no more revision needs to be done. The forum can be closed by the shared agreement and done by the DGB technical unit.

The improvement of RKA K/L review system is a part of DGB drive to streamline the existing process. The improvement is supported by the advanced technology and science as the primary support for online review of RKA K/L. Therefore, it is expected that by 2015, 43 Ministries/ Agencies are ready to pilot the RKA-K /L online application simultaneously. By 2016, all Ministries/Agencies are targetted to have implemented the online review.



APBN MASUK KAMPUS

STATE BUDGET (APBN) GOES TO CAMPUS

Surabaya - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan Pemerintah yang menjadi landasan arah pembangunan ekonomi nasional dalam satu tahun anggaran. Dalam APBN tersebut tersedia informasi terkait pelayanan dasar yang disediakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui APBN, tersurat regulasi yang digulirkan Pemerintah dalam menentukan arah pembangunan ekonomi nasional.

Pasca ditetapkannya APBN 2015, Direktorat Jenderal Anggaran memiliki beberapa agenda untuk menyosialisasikan APBN tersebut ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya, sosialisasi ke kalangan akademisi di beberapa kampus. Tujuannya untuk mengenalkan kebijakan APBN 2015 dan menghimpun umpan balik melalui dengar pendapat dari kalangan akademisi dan mahasiswa.

Pada hari Selasa (16/10), dipilih lokasi sosialisasi di Kota Pahlawan, Surabaya. Pada kesempatan tersebut Direktorat Jenderal Anggaran berkolaborasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan acara itu. Beberapa perwakilan perguruan tinggi di sekitar Surabaya (dibawah koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII) diundang menghadiri acara tersebut. Tak kurang 14 perguruan tinggi memenuhi undangan Direktorat Jenderal Anggaran yaitu Universitas Airlangga, Universitas Widyagama

Surabaya - State Budget (APBN) is an instrument of government policy on which the direction of national economic development in a budget year is based. The state budget provides information related to the basic services provided by the Government in order to realize the people's welfare. It also explicitly contains the Government regulation to focus the direction of national economic development.

Following the enactment of the state budget 2015, the Directorate General of Budget has some agenda to disseminate the state budget to public in general, one of which is disseminating to academicians at several campuses. The move aims to introduce the national budget policies 2015 and gather feedback through hearings with the university lecturers and students.

Surabaya, the City of Heroes, was chosen to be the venue for dissemination on Tuesday (16/10). To succeed the event, the Directorate General of Budget worked together with the East Java Office of Directorate General of Treasury. Some university representatives around Surabaya (under the coordination of KOPERTIS Region VII) were invited to attend the event. They were Airlangga University, Widyagama Malang University, Dr. Soetomo University, University of Muhammadiyah Malang, Malang Islamic University, Perbanas Surabaya, STIKOM Surabaya, AKSE of Widya Mandala Surabaya, Petra Christian University, Bhayangkara University



Malang, Universitas Dr Soetomo Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, STIE Perbanas Surabaya, STIKOM Surabaya, AKSE Widya Mandala Surabaya, Universitas Kristen Petra Surabaya, Universitas Bhayangkara Surabaya, Poltek Universitas Surabaya, STIE IEU Surabaya, STIESIA, dan ITN Malang.

Acara dibuka oleh Rabindhra Aldy, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Didik Kusnaini, Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara I Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran, bertindak selaku moderator pada acara yang menggunakan format diskusi panel. Ada 4 (empat) materi yang disampaikan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pertama, materi "Postur dan Siklus APBN" yang disampaikan oleh Rachman Aptri Sapari. Kedua, materi "Pokok-pokok Kebijakan Fiskal APBN 2015" oleh Wurjanto Nopijantoro. Ketiga, materi "APBN yang Lebih Berkualitas : Realitas dan Harapan" oleh Wisynu Wardhana. Keempat, materi "Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran" oleh Achmad Wiyoso.

Dalam sesi tanya jawab mengemuka beberapa pertanyaan kritis dari peserta. Solichin, dosen Studi Pembangunan dari Universitas Airlangga, menyoroti kontribusi APBN dalam peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat, serta efisiensi alokasi subsidi BBM. Beberapa mahasiswa mengajukan pertanyaan seputar kebijakan Pemerintah khususnya dana Desa dan formulasi kebijakannya, serta implementasinya. Tanggapan dan masukan peserta acara sosialisasi tersebut merupakan masukan penting bagi Direktorat Jenderal Anggaran dalam menyusun APBN yang lebih berkualitas di masa mendatang. Selanjutnya, sosialisasi APBN 2015 akan diteruskan ke 4 kota besar lainnya, yaitu Padang, Jakarta, Denpasar, dan Banjarmasin.



Surabaya, Polytechnic of Surabaya University, STIE IEU Surabaya, STIESIA, and ITN Malang.

The event was officially opened by Rabindhra Aldy, the Head of Accounting and Financial Reporting Development, Directorate General of Treasury, Regional Office of East Java Province. Serving as the moderator for the panel discussion was Didik Kusnaini, Kasubdit of Budgetary Expenditure Budget Preparation I Directorate of the DGB. Presenting officials from the Directorate General of Budget and the Directorate General of Treasury, the forum discussed four major topics as follows: First, the "Posture and Cycle of APBN" by Rachman Aptri Sapari. Second, the material "Principles of Fiscal Policy of APBN 2015" presented by Wurjanto Nopijantoro. Third, "Better Quality APBN: Reality and Expectations" by Wisynu Wardana. Fourth, the "Execution and Reporting of Budget" highlighted by Achmad Wiyoso.

During the interactive session, some participants raised critical questions. Solichin, who teaches Development Studies in Airlangga University highlighted contribution of the state budget in improving the indicators of people's welfare and efficient allocation of fuel subsidies. Some students questioned the government policies particularly village fund, its policy formulation and implementation. The feedback given during the session was important for DGB to compile more quality state budget in the future. Next, the other four major cities i.e. Padang, Jakarta, Denpasar, Banjarmasin will be the next target of dissemination of the state budget 2015.

PRESIDEN SERAHKAN DIPA TAHUN 2015

PRESIDENT HANDED OVER DIPA 2015



Penyelesaian penerbitan DIPA Tahun Anggaran 2015 merupakan hasil upaya dan kerja keras Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Keberhasilan percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015 ini merupakan awal yang baik bagi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015, agar K/L dapat segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Pada hari Senin (8/12), Presiden Joko Widodo menyampaikan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2015 secara simbolik kepada 34 Gubernur seluruh Indonesia dan 5 K/L terpilih berdasarkan kriteria utama yaitu 3 tahun berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan memperoleh pagu anggaran tertinggi dalam UU APBN Tahun Anggaran 2015 yaitu Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. K/L tersebut dipilih berdasarkan kriteria utama, yaitu K/L dengan

Thanks to their hard work, Ministries/Agencies managed to issue DIPA Fiscal Year 2015. The accelerated accomplishment and submission of DIPA Fiscal Year 2015 serves as the milestone for good implementation of the Indonesian Budget for Fiscal Year 2015. It is expected that Ministries/Agencies take initial steps to carry out the government duties for public service and development.

On Monday (8/12), President Joko Widodo delivered DIPA Fiscal Year (FY) 2015 symbolically to 34 Governors throughout Indonesia and 5 Ministries/Agencies which were selected based on the main criteria. The criteria were the ones whose financial statements received an unqualified opinion (WTP) for 3 consecutive years from the Supreme Audit Agency and obtained the highest budget ceiling in the State Budget Law for Fiscal Year 2015. The selected Ministries/Agencies were the Ministry of Religious Affairs, the Indonesian National Police, Ministry of Finance, Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Justice and Human Rights. They were selected based on the key criteria that the financial statements received



laporan keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut. Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan, Bambang P. S. Brodjonegoro dalam laporannya menyampaikan, "Agar DIPA Tahun Anggaran 2015 tersebut dapat menjadi dokumen yang operasional untuk melaksanakan program/kegiatan di bawah Kabinet Kerja, maka bagi kementerian negara/lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur, dimohon untuk segera mengusulkan revisi atas DIPA Tahun Anggaran 2015 yang diterima pada hari ini".

an unqualified opinion (WTP) from the Supreme Audit Agency (BPK) for three consecutive years. On this occasion, the Minister of Finance, Bambang PS Brodjonegoro encouraged those attending the event to: "support DIPA Fiscal Year 2015 to be an operational document to implement programs / activities under the Working Cabinet, the Ministries / Agencies which have changes in nomenclature should propose for revised DIPA Fiscal Year 2015 received on this day".





Susunan Tim Penyusun Buku Laporan Annual Report 2014

PENGARAH:

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran

PENANGGUNG JAWAB:

Mariatul Aini, Sekretaris Direktur Jenderal Anggaran

KONTIBUTOR:

Eko Widyasmoro
Dwi Retno Hendarti
Ardiansjah
Ika Ristiananingsih
Rini Ariviani Frijanti
Hikmatullah
Hedy Gunawan
Suhardono Kusuma Mulia
I.G.A Krisna Murti
Ari Untung
Wiharso Eko Santoso
Sukrasno

EDITOR:

Shinta Putri Permata Dewi
Cahya Setiawan

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFER:

Nandang Sumirat
Medianto
Dok. Ditjen Anggaran

SEKRETARIAT:

Haritedjo Soekirno
Sri Moedji Sampurnanto
Nurokhim
Yudanto Dwi N
Hafizh Yossi

PERCETAKAN:

Bethesda Anugerah Printing - Jakarta
E-mail: bethesdaprinting@yahoo.com

